

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

(L A K I P)

Tahun 2018



**Dinas Perkebunan
Kabupaten Berau**



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

**PERJANJIAN KINERJA
Tahun 2019**



**Dinas Perkebunan
Kabupaten Berau**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat-Nya jualah akhirnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan walaupun agak terlambat dari batas waktu yang ditetapkan.

Penyusunan LAKIP Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2018 merupakan perwujudan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan serta target kinerja tahun awal pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2016-2021, berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021;

Hasil pencapaian Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Berau tidak terlepas dari kerjasama semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Berau.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2018 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Tanjung Redeb, 1 Maret 2019

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau
Kepala,

Ir. Sumaryono

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610928 198603 1 010

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan perubahan paradigma Pemerintah kearah transparansi dan akuntabilitas tersebut membawa konsekuensi logis terhadap perubahan sikap, mental, dan perilaku Aparatur yang seharusnya diarahkan untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance) dan (Clean Governance) dimana pelayanan terhadap masyarakat haruslah bersifat transparansi, akuntabel dan partisipasi menjadi pilarnya.

Berdasarkan perubahan paradigma tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor : 07 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan Badan/Dinas/Bagian/Kantor/Kecamatan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab perubahan-perubahan paradigma tersebut.

Menyadari hal tersebut dan sejalan dengan kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, bahwa LAKIP Tahun 2018 ini berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021; yang memberi arah segenap Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dalam melaksanakan berbagai aktivitas pembangunan.

Pada tahun anggaran 2018, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau telah berusaha mencapai 12 (Dua Belas) program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
6. Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan
7. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
8. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
9. Program Pengembangan Perencanaan Perkebunan
10. Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan
11. Program Pengendalian Hama Terpadu
12. Program Pengembangan Pertanian/Perkebunan

Dengan adanya LAKIP ini, diharapkan dapat meningkatkan peran aktif bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Berau untuk mendukung terlaksanakannya Good Governance dengan istilah terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih terlepas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya “Pelayanan Prima bagi Masyarakat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi.....	2
C. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	4
1. Pembangunan Sejuta Hektar Sawit Tahap Kedua .	4
2. Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan	6
3. Hilirisasi Produk Turunan Komoditi Unggulan Perkebunan.....	12
D. Struktur Organisasi	14
E. Sumber Daya Manusia	16
1. Pendidikan	17
2. Golongan dan Eselon	18
F. Sarana dan Prasarana.....	20
1. Prasarana.....	20
2. Sarana.....	21

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Penetapan Kinerja Tahun 2017	26
---------------------------------------	----

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	31
B. Realisasi Anggaran.....	115
1. Analisis Akuntabilitas Kinerja SKPD Dinas Perkebunan	121

BAB IV. P E N U T U P

Kesimpulan.....	125
-----------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2019
2. Rencana Aksi atas Pencapaian Kinerja Tahun 2018 dan 2019
3. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perkebunan Tahun 2018 dan 2019
4. Pengukuran Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar Pembentukan Organisasi berdasarkan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu dari beberapa unsur. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, sedangkan unsur pelaksana daerah diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah.

Dasar utama penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, namun tidak berarti setiap penanganan urusan daerah harus dibentuk dalam suatu organisasi sendiri. Besaran organisasi perangkat daerah harus mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa faktor, yaitu :

- a. Kemampuan keuangan daerah ;
- b. Kebutuhan daerah dan ketersediaan SDA;
- c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan;
- d. Jenis dan banyaknya tugas;
- e. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis;
- f. Jumlah kepadatan pendudukan, dan:

- g. Potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tugas;

Dari cakupan berbagai faktor diatas diharapkan Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah menganut prinsip “HEMAT STRUKTUR DAN KAYA FUNGSI” yang berarti bahwa walaupun Struktur Organisasi Minimal namun secara fungsional dapat melaksanakan tugas secara maksimal.

Perangkat Daerah Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sedangkan pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Berau di bentuk dan diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008

B. Aspek Strategis Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dalam perumusan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, Dinas Perkebunan sebagai unsur staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan di bidang perkebunan berdasarkan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, Dinas Perkebunan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerja sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan “GOOD GOVERNANCE”. Dalam lima tahun kedepan, Dinas Perkebunan

memprioritaskan pada peningkatan Kapasitas, Kecepatan dan Mutu Pelayanan serta merumuskan Kebijakan dan Koordinasi di bidang Pembangunan Perkebunan. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil program pembangunan perkebunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis Internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang Dinas Perkebunan

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian strategis pembangunan perkebunan, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh Insan Dinas Perkebunan terus dipacu mengingat produk yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur pelaksanaannya.

Terlaksananya kebijakan teknis pembangunan bidang perkebunan yang dapat mewujudkan pelayanan umum di bidang perkebunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Dinas Perkebunan mampu memberikan pelayanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan, penerapan teknologi, pemasaran hasil produksi dan peningkatan

produksi. Dinas Perkebunan akan terus melakukan segala upaya untuk menjamin tidak saja berdaya guna dan berhasil guna bagi penentu kebijakan juga dapat dimanfaatkan oleh Stakeholders.

Dasar utama penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, namun tidak berarti setiap penanganan urusan daerah harus dibentuk dalam suatu organisasi sendiri. Besaran organisasi perangkat daerah harus mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa faktor, yaitu :

1. Kemampuan keuangan daerah ;
2. Kebutuhan daerah dan ketersediaan SDA;
3. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan;
4. Jenis dan banyaknya tugas;
5. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis;
6. Jumlah kepadatan pendudukan, dan;
7. Potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tugas;

Dari cakupan berbagai faktor diatas diharapkan Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah menganut prinsip “Hemat Struktur dan Kaya Fungsi” yang berarti bahwa walaupun Struktur Organisasi Minimal namun secara fungsional dapat melaksanakan tugas secara maksimal.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Dinas Perkebunan adalah sebagai unsur pelaksana bidang perkebunan berdasarkan azas Otonomi dan Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Berau, melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Dinas Perkebunan adalah melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perkebunan berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perkebunan Kabupaten Berau mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang perkebunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan;
4. Penyelenggaraan urusan sekretariat;
5. Pelaksanaan UPTD;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

D. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Produksi, membawahi :
 - 1. Seksi Budidaya Tanaman
 - 2. Seksi Teknologi Alat dan Mesin
 - 3. Seksi Bahan Tanaman
- d. Bidang Bina Usaha Perkebunan, membawahi :
 - 1. Seksi Sumber Daya
 - 2. Seksi Perizinan Usaha Perkebunan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran
- e. Bidang Perlindungan Perkebunan, membawahi :
 - 1. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Sarana Perlindungan Perkebunan
 - 2. Seksi Pemantauan, Pengamatan dan Pengendalian OPT
 - 3. Seksi Penataan Konservasi Tanah dan Air
- f. UPTD

g. Kelompok Jabatan Fungsional

E. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, secara umum menyampaikan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum ber peradaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan Unsur Aparatur Negara yang bertugas sebagai Abdi Masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan pegawai negeri yang profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan, serta bersih KKN. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan Aparatur Negara khususnya Pegawai Negeri.

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan perkebunan khususnya Sumber daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Berikut ini data mengenai Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau berdasarkan pendidikan, pangkat, golongan dan eselonering :

1. Pendidikan

Sampai dengan Januari 2013 sumber daya manusia yang ada di Dinas Perkebunan Kabupaten Berau berjumlah 63 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SLTA sampai dengan S2. Berdasarkan rekapitulasi yang disusun oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dari 58 orang PNS kalau dirangking menurut tingkat pendidikan maka pendidikan S1 menduduki urutan kesatu dengan jumlah 28 orang dan urutan kedua adalah SLTA yaitu sebanyak 17 orang dan urutan ketiga adalah D3 sebanyak 9 orang, urutan keempat adalah S2 sebanyak 3 orang, kemudian urutan kelima adalah SLTP sebanyak 1 orang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel Rekapitulasi Pendidikan PNS di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 1

**SUMBER DAYA APARATUR DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BERAU MENURUT PENDIDIKAN**

NO	JABATAN	TAHUN 2014						JUMLAH
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas		1					1
2	Sekretaris	1						1
3	Kabidang	1	2					3
4	Kasubbag	1	1	1				3
5	Kasi		4		2			6
6	Fungsional							0
7	Staf		16	6	13	1		36
8	Honor		4	2	2			8
JUMLAH		3	28	9	17	1	0	58

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

2. Golongan dan Eselon

Dalam rangka memenuhi akan aparatur yang handal dan profesional dibidangnya maka Dinas Perkebunan Kabupaten Berau secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparturnya baik dari pendidikan maupun kepangkatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan terpenuhinya syarat Administrasi Pemerintahan.

Pangkat dan golongan seorang PNS ditentukan oleh pendidikan dan eselon. Sampai 31 Desember 2014 PNS di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau yang memiliki golongan IV sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 28 orang, golongan II sebanyak 15 orang dan golongan I sebanyak 1 orang.

Berikut ini disampaikan tentang table rekapitulasi PNS di lingkungan Dinas Perkebunan berdasarkan golongan sebagai berikut :

Tabel 2

**SUMBER DAYA APARATUR DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BERAU MENURUT GOLONGAN**

NO	JABATAN	JUMLAH GOLONGAN PNS TAHUN 2014				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	3	-	-	-	3
4	Kasi/Kasubbag	1	8	-	-	9
7	Staf	-	20	15	1	36
JUMLAH		6	28	15	1	50

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang terselenggaranya Pemerintahan adalah Formasi Jabatan Struktural yang tersedia sehingga pelaksanaan Manajemen Pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tabel 3

**SUMBER DAYA APARATUR DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN
BERAU BERDASARKAN TINGKAT GOLONGAN YANG TERSUSUN
DENGAN KRITERIA GENDER TAHUN 2014**

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris	-	1	1
3	Kabidang	3	-	3
4	Kasubbag	1	2	3
5	Kasi	5	1	6
7	Staf	24	12	36
8	Honor	6	2	8
JUMLAH		40	18	58

Sumber :

Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

F. Sarana dan Prasarana

Kemajuan teknologi membuka konsekuensi dengan tuntutan perubahan untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut, bilamana sarana dan prasarana tidak dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut berakibat mengalami ketertinggalan atau keterbelakangan disegala bidang.

Untuk menjamin terlaksananya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan sekaligus untuk dapat melaksanakan tugas pokok

dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Berau diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan data dari Subbagian Umum dan Kepegawaian sampai 31 Desember 2014, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Prasarana

- | | | |
|-----------------------|--------|----------------|
| a. Luas Tanah | 30.000 | m ² |
| b. Luas Bangunan | 5.741 | m ² |
| c. Luas Ruangan Kerja | | m ² |

2. Sarana

2.1 Mebeulair

a. Kursi

- | | |
|----------------------------------|---------|
| - Kusi putar | 30 buah |
| - Kursi Lipat | 47 buah |
| - Kursi Besi/Metal | 1 buah |
| - Kursi Kerja Pejabat Esselon II | 1 buah |
| - Kursi Kerja Pejabat Esselon IV | 36 buah |
| - Kursi Tamu | 1 buah |
| - Kursi Plastik | 1 buah |

b. Meja

- | | |
|--------------|---------|
| - Meja Rapat | 22 buah |
|--------------|---------|

- Meja Biro	78 buah
- Meja Kerja Pejabat Esselon II	1 buah
- Meja Kerja Pejabat Esselon III	1 buah
c. Lemari	
- Lemari Besi	3 buah
- Lemari Kayu	15 buah
d. Sofa	2 buah
e. Band Kas	2 buah
f. Gorden	4 buah

2.2 Alat Tulis Kantor

a. Mesin Ketik	7 buah
b. Mesin hitung	1 buah
c. Whiteboard	1 buah

2.3 Alat Komunikasi

a. Megaphone	2 buah
b. Telephone	1 buah
c. Faximilie	1 buah

2.4 Alat elektronik

a. Handycam	1 buah
b. Kamera Peliputan	1 buah
c. Proyektor	2 buah
d. Layar Proyektor	1 buah
e. Kipas Angin	1 buah

f. Compact Disk	1 buah
g. Amplifier	1 buah
h. Soundsystem	1 buah
i. Wireless	2 buah
j. Microphone	16 buah
k. Camera Video	7 buah
l. Televisi	3 buah
m. Ac Split	22 buah
n. Mixer 24 chanel	1 unit

2.5 Komputer

a. PC Unit	23 buah
b. Laptop	24 buah
c. Printer	27 buah
d. Scanner	1 buah
e. Monitor	1 buah
f. UPS	10 buah
g. Modem	1 buah
h. Note Book	6 buah

2.6 Peralatan Lapangan

a. Global Position System	7 buah
b. Teropong	1 buah
c. Penyemprot Mesin	2 buah
d. Alat Pemelihara Tanaman Lain-lain	1 buah

e. Traktor Tangan	1 buah
f. Chain Saw	11 buah
g. Alat Panen	2 buah
h. Bak Fiberglass	1 buah
i. Kakao Tester	1 buah
j. Penyangrai	1 buah
k. Pemisah Biji dan Kulit Kakao	1 buah
l. Peti Fermentasi	20 buah
m. Alat Pemecah Buah Kakao	1 buah
n. Alat Pengering Kakao	1 buah
o. Alat Sortasi	1 buah
p. Alat Press Lunak	1 buah
q. Alat Press Kasar	1 buah
r. Alat Penghalus Pasta	1 buah
s. Alat Pembubuk	1 buah
t. Alat Vacum Press	1 buah
u. Genset	1 unit
v. Tangga	2 unit
w. Gunting Galah	7 unit
x. Gunting Pangkas	20 buah
y. Freezer	1 unit
z. Mesin Bor	1 unit

2.7 Peralatan Laboratorium

a. Tabung Reaksi	20 buah
b. Gelas Ukur	12 buah
c. Termometer	3 buah
d. Lampu Sipiritus	3 buah
e. Mikroskop	1 buah
f. Rak Tabung Reaksi	3 buah
g. Handskom Kain	10 buah
h. Rotary Filling	1 buah
i. Masker Gas	10 buah
j. Beaker Glass	4 buah
k. Cawan Petri	10 buah
l. Corong	4 buah
m. Erlenmeyer	12 buah
n. Pinset	4 buah
o. Mortal & Pastle	4 unit
p. Jarum Trokulum	5 unit
q. Alat Sterilisasi	1 unit
r. Toples	30 buah
s. Blender	1 unit
t. Kompor Gas	1 unit

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penetapan visi, sebagai bagian dari Perencanaan Strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Dalam mengatasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Berau sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Berau secara terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat terobosan-terobosan baru.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana Dinas Perkebunan Kabupaten Berau harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, inovatif. Visi itu adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Berau.

Dalam rangka mewujudkan Good Governance yang ditandai dengan adanya Keseimbangan Peran Dinas Perkebunan selaku Institusi Pemerintah,

Swasta (PBS) dan Masyarakat Kebun, perlu dilakukan pemilihan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing komponen tersebut.

1. Visi

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang 22 Tahun 1999 telah mempengaruhi arah kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Memasuki Era Otonomi Daerah semangat reformasi masih terasa dan menyeruh seluruh sendi kehidupan yang bermuara kepada semangat untuk meninggalkan sistem lama yang tidak transparan menuju pemerintahan yang lebih demokratis, akuntabel, transparan sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu memotivasi tumbuh dan berkembangnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara Pemerintah, Dunia Usaha (Perusahaan Besar Swasta) dan Masyarakat Pekebun didalam menyelenggarakan berbagai aktivitasnya. Ketiga unsur tersebut diharapkan dapat berperan optimal dan terarah dalam mendorong pemerintahan yang lebih mampu mengatasi permasalahan internal dan eksternal yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dan daerah.

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau selaku unsur pelaksana bidang perkebunan yang mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Sehubungan dengan itu Dinas Perkebunan Kabupaten Berau harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas Perkebunan Kabupaten Berau akan diarahkan dan untuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat, komitmen, daya dorong, arah tugas dan fungsi, serta menyatukan cara pandang jauh kedepan seluruh sumber daya aparatur Dinas Perkebunan kearah tujuan yang akan dicapai.

Bertolak pada kondisi di atas, maka tugas di jajaran Dinas Perkebunan Kabupaten Berau kedepan semakin berat dan kompleks, sehingga memerlukan adanya upaya-upaya bertahap, terencana, dan konsisten dalam mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber daya, mengembangkan peluang dan inovasi agar tidak tertinggal dalam kemajuan zaman maka Dinas Perkebunan Kabupaten Berau menetapkan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Usaha Perkebunan Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera”

Makna yang terkandung dari visi di atas adalah sebagai berikut :

1. Perkebunan

Adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku perkebunan dan masyarakat

2. Usaha Perkebunan

Adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan

3. Berdaya saing

Adalah bahwa komoditi perkebunan yang diusahakan memiliki keunggulan tertentu baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan

4. Berwawasan lingkungan

Adalah bahwa usaha perkebunan dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah lingkungan

5. Masyarakat

Adalah sekelompok orang/individu yang membentuk sistem dimana sebagian besar terjadi interaksi antar individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut

6. Sejahtera

Adalah wujud kehidupan masyarakat yang dicita-citakan dengan terpenuhinya semua kebutuhan batiniah dan lahiriah yang selaras, seimbang dan dinamis dalam tatanan pembangunan peradaban manusia seutuhnya

Dengan pernyataan visi di atas diperlukan langkah-langkah dan strategi antisipatif dan inovatif untuk mewujudkannya. Visi tersebut juga menunjukkan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Berau. Penetapan visi tersebut juga merupakan motivasi utama bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Berau bersama-sama pihak berkepentingan lainnya untuk menentukan kearah mana Dinas Perkebunan Kabupaten Berau akan dibawa dan sekaligus merupakan konsensus bersama dalam upaya merefleksikan tujuan yang akan dicapai dalam jangka panjang.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Perkebunan Kabupaten Berau sebagaimana yang telah digariskan di atas maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perkebunan Kabupaten Berau yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan percepatan peningkatan sumber daya Dinas Perkebunan
2. Mewujudkan percepatan tumbuh dan berkembangnya usaha perkebunan yang memiliki daya saing
3. Mewujudkan peningkatan kemampuan masyarakat/pekebun/kelompok dalam mengelola usaha perkebunan
4. Mewujudkan peningkatan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
5. Mewujudkan pembangunan, pengembangan dan peningkatan kawasan sentra produksi unggulan perkebunan

3. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (Das Solen) dengan kenyataan (Das Sen) pada kurun waktu tertentu.

Karakteristik tujuan pada Rencana Strategis dapat diartikan sebagai berikut :

- 1 Idealistik, artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan suatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan lebih baik dan berhasil;
- 2 Jangkauan, kedepan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Berau ;
- 3 Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang;
- 4 Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Upaya perwujudan Misi Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dalam tahun 2011 – 2015 yang akan datang, akan diarahkan pada pencapaian tujuan masing-masing Misi sebagai berikut :

Tabel 4

**MISI DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BERAU**

NO	MISI	NO	TUJUAN
1	Mewujudkan percepatan peningkatan sumber daya Dinas Perkebunan	1	Meningkatkan kapasitas sumber daya Dinas Perkebunan
2	Mewujudkan percepatan tumbuh dan berkembangnya usaha perkebunan yang memiliki daya saing	2	Meningkatkan percepatan tumbuh dan berkembangnya usaha perkebunan yang memiliki daya saing
3	Mewujudkan peningkatan kemampuan masyarakat/pekebun/kelompok dalam mengelola usaha perkebunan	3	Meningkatkan kemampuan masyarakat/pekebun/kelompok dalam mengelola usaha perkebunan
4	Mewujudkan peningkatan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	4	Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
5	Mewujudkan pembangunan, pengembangan dan peningkatan kawasan sentra produksi unggulan perkebunan	5	Mewujudkan pembangunan, pengembangan dan peningkatan kawasan sentra produksi unggulan perkebunan

4. Sasaran

Sasaran merupakan tujuan antara dari perwujudan kondisi atau keadaan ideal yang diharapkan. Sasaran merupakan bagian integral dalam system Perencanaan strategis yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan dan aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, maupun semesteran, triwulan atau bulanan.

Karakteristik dari sasaran yang baik paling tidak terdiri dalam bentuk “SMART” yaitu :

S = Specific

Jelas dan secara spesifik menunjukkan sasaran apa yang ingin dicapai

M = Measureable

Sasaran yang ada harus bisa diukur sehingga memudahkan dalam penyusunan LAKIP dan evaluasinya.

A = Acceptable

Sasaran yang ada walaupun menantang namun masih bisa dicapai oleh instansi yang bersangkutan.

R = Result

Sasaran yang ada lebih berorientasi pada hasil yang ingin dicapai bukan hanya sekadar output

T = Timelines

Dapat dicapai dalam hitungan waktu misalnya semesteran, triwulan maupun tahunan.

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau menetapkan sasaran dalam periode tahun 2011 sampai dengan periode tahun 2015 yang akan datang, yaitu sebagai berikut :

Tabel 5

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BERAU

NO	TUJUAN	NO	SASARAN
1	Meningkatnya produktivitas sumber daya Dinas Perkebunan	1	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani karet dan kakao
		2	Meningkatnya pengetahuan petani dalam penguasaan teknologi sarana dan prasarana perlindungan perkebunan
		3	Meningkatnya jumlah petani yang menguasai teknologi tepat guna kakao dan lada
		4	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani lada, kakao dan karet
2	Meningkatnya percepatan tumbuh dan berkembangnya usaha perkebunan yang memiliki daya saing	5	Meningkatnya harga pasar komoditi perkebunan
		6	Lebih dikenalnya produk unggulan perkebunan daerah
		7	Meningkatnya pengembangan usaha produksi sesuai permintaan pasar
		8	Terjalinnya hubungan kemitraan dan informasi teknologi bagi petani
3	Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	9	Pengendalian serangan OPT pada tanaman perkebunan
		10	Meningkatnya produktifitas lahan petani non produktif
		11	Meningkatnya mutu hasil olahan komoditas perkebunan dan tertibnya penggunaan alat berat bagi PBS dalam pembangunan perkebunan besar
		12	Terbangunnya kebun demplot budidaya tanaman perkebunan
4	Meningkatnya kemampuan masyarakat/pekebun/kelompok dalam mengelola usaha perkebunan	13	Terwujudnya kesejahteraan petani dan pelaku agribisnis
		14	Terbentuknya beberapa Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)
		15	Terwujudnya kesepakatan kerjasama kemitraan antara masyarakat dan Perkebunan Besar Swasta (PBS)
		16	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan
		17	Pembuatan buku data statistik perkebunan

5	Terwujudnya pembangunan, pengembangan dan peningkatan kawasan sentra produksi unggulan perkebunan	18	Meningkatnya penggunaan bibit unggul tanaman perkebunan
		19	Penggunaan bahan tanaman unggulan perkebunan
		20	Tertibnya pelaksanaan perijinan usaha perkebunan besar di Kabupaten Berau
		21	Sinkronisasi Pembangunan Perkebunan di Kalimantan Timur

5. Indikator Kinerja

Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan indikator kinerja sasaran yang sangat berguna untuk memudahkan perhitungan kinerja pada penyusunan LAKIP setiap tahunnya.

Adapun Indikator Kinerja sasaran tersebut secara lengkap dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 6

PENENTUAN INDIKATOR KINERJA SASARAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BERAU

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani karet dan kakao	1	Terlatihnya petani karet dan kakao
2	Meningkatnya pengetahuan petani dalam penguasaan teknologi sarana dan prasarana perlindungan perkebunan	2	Peningkatan Penguasaan teknologi sarana dan prasarana perlindungan perkebunan
3	Meningkatnya jumlah petani yang menguasai teknologi tepat guna kakao dan lada	3	Petani menguasai teknologi budidaya tepat guna kakao dan lada
4	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani lada, kakao dan karet	4	Terlatihnya petani perkebunan lada, kakao dan karet

5	Meningkatnya harga pasar komoditi perkebunan	5	Terciptanya mutu produksi komoditi perkebunan sesuai pangsa pasar
6	Lebih dikenalnya produk unggulan perkebunan daerah	6	Terpromosinya produk unggulan perkebunan daerah
7	Meningkatnya pengembangan usaha produksi sesuai permintaan pasar	7	Tersebar luasnya data informasi harga pasar komoditi perkebunan
8	Terjalinnnya hubungan kemitraan dan informasi teknologi bagi petani	8	Terlaksananya kegiatan PENAS
9	Pengendalian serangan OPT pada tanaman perkebunan	9	Terkendalnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
10	Meningkatnya produktifitas lahan petani non produktif	10	Terealisasinya penanaman lahan petani non produktif
11	Meningkatnya mutu hasil olahan komoditas perkebunan dan tertibnya penggunaan alat berat bagi PBS dalam pembangunan perkebunan besar	11	Tersedianya dan dimanfaatkannya sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna berupa alat dan mesin pengolahan hasil perkebunan serta terlaksananya pembinaan penggunaan alat berat bagi PBS dan pembangunan perkebunan
12	Terbangunnya kebun demplot budidaya tanaman perkebunan	12	Terselenggaranya demplot pemupukan tanaman perkebunan
13	Terwujudnya kesejahteraan petani dan pelaku agribisnis	13	Terlatihnya petani dan pelaku Agribisnis dalam meningkatkan kesejahteraan petani
14	Terbentuknya beberapa Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)	14	Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani / koperasi
15	Terwujudnya kesepakatan kerjasama kemitraan antara masyarakat dan Perkebunan Besar Swasta (PBS)	15	Tersusunnya naskah kesepakatan kerjasama kemitraan
16	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan	16	Tersusunnya dan terlaksanakannya monitoring, evaluasi dan pelaporan Program / Kegiatan
17	Pembuatan buku data statistik perkebunan	17	Tersusunnya buku data statistik komoditi unggulan perkebunan

18	Meningkatnya penggunaan bibit unggul tanaman perkebunan	18	Tersedianya bibit unggul tanaman perkebunan, pupuk dan obat-obatan
19	Penggunaan bahan tanaman unggulan perkebunan	19	Meningkatnya pemahaman tentang bahan tanaman unggulan perkebunan
20	Tertibnya pelaksanaan perijinan usaha perkebunan besar di Kabupaten Berau	20	Terkendalnya perijinan usaha perkebunan besar
21	Sinkronisasi Pembangunan Perkebunan di Kalimantan Timur	21	Terlaksananya musrenbang, rapat koordinasi perkebunan

B. Penetapan Kinerja Tahun 2014

Pada dasarnya Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2014 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Berau selama tahun 2014. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun 2014 untuk tujuan Pengukuran Efisiensi dan efektivitas Kegiatan.

Untuk dapat mengukur Keberhasilan dan Implementasi Rencana Kerja Strategik diatas, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Sedangkan target ditetapkan untuk setiap Indikator Kinerja, baik untuk indicator tingkat sasaran maupun indikator kinerja (*Input, Output, Outcome*) tingkat kegiatan.

Pada tahun anggaran 2014, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau menetapkan 22 sasaran dengan 22 indikator kinerja, dengan penambahan satu sasaran yaitu Penyusunan Database Komoditi Unggulan Perkebunan dengan indikator sasaran terlaksananya pendataan komoditi unggulan perkebunan Kabupaten Berau. Pada tingkat sasaran beserta targetnya adalah, sesuai table 7 berikut ini :

Tabel 7

PENETAPAN KINERJA SASARAN BESERTA INDIKATORNYA TAHUN 2014

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani karet dan kakao	Terlatihnya petani karet dan kakao	Orang	75	216.100.000	
2	Meningkatnya pengetahuan petani dalam penguasaan teknologi sarana dan prasarana perlindungan perkebunan	Peningkatan penguasaan teknologi sarana dan prasarana perlindungan perkebunan	Persen	100	150.000.000	
3	Meningkatnya jumlah petani yang menguasai teknologi tepat guna kakao dan lada	Petani menguasai teknologi budidaya tepat guna kakao dan lada	Petani	150	500.000.000	
4	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani lada, kakao dan karet	Terlatihnya petani perkebunan lada, kakao dan karet	Persen	30	200.000.000	
5	Meningkatnya harga pasar komoditi perkebunan	Terciptanya mutu produksi komoditi perkebunan sesuai pangsa pasar	Tahun	1	157.500.000	
6	Lebih dikenalnya produk unggulan	Terpromosinya produk unggulan	Persen	100	100.000.000	

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

	perkebunan daerah	perkebunan daerah				
7	Meningkatnya pengembangan usaha produksi sesuai permintaan pasar	Tersebar luasnya data informasi harga pasar komoditi perkebunan	Tahun	1	164.000.000	
8	Terjalannya hubungan kemitraan dan informasi teknologi bagi petani	Terlaksananya kegiatan PENAS	Persen	100	250.000.000	
9	Pengendalian serangan OPT pada tanaman perkebunan	Terkendalnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Petani	90	386.000.000	
10	Meningkatnya produktifitas lahan petani non produktif	Terealisasinya penanaman lahan petani non produktif	Persen	96	972.700.000	
11	Meningkatnya mutu hasil olahan komoditas perkebunan dan tertibnya penggunaan alat berat bagi PBS dalam pembangunan perkebunan besar	Tersedianya dan dimanfaatkan sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna berupa alat dan mesin pengolahan hasil perkebunan serta terlaksananya pembinaan penggunaan alat berat bagi PBS dan pembangunan perkebunan	Tahun	1	1.081.685.000	
12	Terbangunnya kebun demplot budidaya tanaman perkebunan	Terlaksananya demplot pemupukan tanaman perkebunan	Persen	30	151.340.000	

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

13	Terwujudnya kesejahteraan petani dan pelaku agribisnis	Terlatihnya petani dan pelaku agribisnis dalam meningkatkan kesejahteraan petani	Kampung	5	300.000.000	
14	Terbentuknya beberapa Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)	Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani/koperasi	-	-	215.000.000	
15	Terwujudnya kesepakatan kerjasama kemitraan antara masyarakat dan Perkebunan Besar Swasta (PBS)	Tersusunnya naskah kesepakatan kerjasama kemitraan			241.730.000	
16	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan	Tersusunnya dan terlaksanakannya monitoring, evaluasi dan pelaporan Program/Kegiatan	Persen	80	150.000.000	
17	Pembuatan buku data statistik perkebunan	Tersusunnya buku data statistic komoditi unggulan perkebunan	Tahun	1	349.470.000	
18	Meningkatnya penggunaan bibit unggul tanaman perkebunan	Tersedianya bibit unggul tanaman perkebunan, pupuk dan obat-obatan	Tahun	1	3.516.829.000	
19	Penggunaan bahan tanaman unggulan perkebunan	Meningkatnya pemahaman tentang bahan tanaman unggulan	Persen	30	257.160.000	

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

20	Tertibnya pelaksanaan perijinan usaha perkebunan besar di Kabupaten Berau	perkebunan Terkendalnya perijinan usaha perkebunan besar	PBS	15	300.150.000	
21	Sinkronisasi Pembangunan Perkebunan di Kalimantan Timur	Terlaksananya musrenbang, rapat koordinasi perkebunan	Tahun	1	259.000.000	
22	Penyusunan Database Komoditi Unggulan Perkebunan	Terlaksananya pendataan komoditi unggulan perkebunan Kabupaten Berau.	Tahun	1	250.000.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sub program dengan capaian kinerja. Metode perbandingan capaian kinerja dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan upaya-upaya organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh gambaran pengukuran kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Berau menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Hasil yang diperoleh, semakin tinggi realisasi berarti semakin baik kinerjanya atau sebaliknya bila kecil realisasinya berarti semakin rendahnya kinerja. Selanjutnya untuk membuat simpulan hasil evaluasi, skala pengukuran kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. 85 % atau lebih dari rencana..... = berhasil dengan baik
- b. 70 s/d 85% dari rencana = berhasil
- c. 55 s/d 70 % dari rencana = cukup berhasil
- d. s.d 55 % dari rencana = kurang berhasil

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran, Adapun Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, sebagai berikut :

TABEL.8

**PERBANDINGAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BERAU
TAHUN 2012 SAMPAI DENGAN 2014**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			Realis asi (%)
				2012	2013	2014	
1	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani karet dan kakao	Terlatihnya petani karet dan kakao	Orang	100	100	75	
2	Meningkatnya pengetahuan petani dalam penguasaan teknologi sarana dan prasarana perlindungan perkebunan	Peningkatan penguasaan teknologi sarana dan prasarana perlindungan perkebunan	Persen	100	100	100	
3	Meningkatnya jumlah petani yang menguasai teknologi tepat guna kakao dan lada	Petani menguasai teknologi budidaya tepat guna kakao dan lada	Petani	150	175	150	
4	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani lada, kakao dan karet	Terlatihnya petani perkebunan lada, kakao dan karet	Orang	30	75	75	
5	Meningkatnya harga pasar komoditi perkebunan	Terciptanya mutu produksi komoditi perkebunan sesuai pangsa pasar	Tahun	-	-	1	
6	Lebih dikenalnya produk unggulan perkebunan daerah	Terpromosinya produk unggulan perkebunan daerah	Persen	100	100	100	

7	Meningkatnya pengembangan usaha produksi sesuai permintaan pasar	Tersebar luasnya data informasi harga pasar komoditi perkebunan	Tahun	1	1	1	
8	Terjalannya hubungan kemitraan dan informasi teknologi bagi petani	Terlaksananya kegiatan PENAS	Persen	-	100	100	
9	Pengendalian serangan OPT pada tanaman perkebunan	Terkendalnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Petani	6 kampung	5 kampung	90	
10	Meningkatnya produktifitas lahan petani non produktif	Terealisasinya penanaman lahan petani non produktif	Persen	100	100	96	
11	Meningkatnya mutu hasil olahan komoditas perkebunan dan tertibnya penggunaan alat berat bagi PBS dalam pembangunan perkebunan besar	Tersedianya dan dimanfaatkannya sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna berupa alat dan mesin pengolahan hasil perkebunan serta terlaksananya pembinaan penggunaan alat berat bagi PBS dan pembangunan perkebunan	Tahun	1	1	1	
12	Terbangunnya kebun demplot budidaya tanaman perkebunan	Terlaksananya demplot pemupukan tanaman perkebunan	Persen	1,5 Ha	1,5 Ha	30	
13	Terwujudnya kesejahteraan petani dan pelaku agribisnis	Terlatihnya petani dan pelaku agribisnis dalam meningkatkan kesejahteraan petani	Kampung	100 Persen	100 Persen	5	

14	Terbentuknya beberapa Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)	Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani/koperasi	Persen	100	100	-	
15	Terwujudnya kesepakatan kerjasama kemitraan antara masyarakat dan Perkebunan Besar Swasta (PBS)	Tersusunnya naskah kesepakatan kerjasama kemitraan	Persen	-	60	-	
16	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan	Tersusunnya dan terlaksanakannya monitoring, evaluasi dan pelaporan Program/Kegiatan	Persen	100	100	80	
17	Pembuatan buku data statistik perkebunan	Tersusunnya buku data statistic komoditi unggulan perkebunan	Tahun	20 buku	20 buku	1	
18	Meningkatnya penggunaan bibit unggul tanaman perkebunan	Tersedianya bibit unggul tanaman perkebunan, pupuk dan obat-obatan	Tahun	1	1	1	
19	Penggunaan bahan tanaman unggulan perkebunan	Meningkatnya pemahaman tentang bahan tanaman unggulan perkebunan	Persen	30	30	30	
20	Tertibnya pelaksanaan perijinan usaha perkebunan besar di Kabupaten Berau	Terkendalnya perijinan usaha perkebunan besar	PBS	24	24	15	
21	Sinkronisasi Pembangunan Perkebunan di Kalimantan Timur	Terlaksananya musrenbang, rapat koordinasi perkebunan	Persen	100	100	100	

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

22	Penyusunan Database Komoditi Unggulan Perkebunan	Terlaksananya pendataan komoditi unggulan perkebunan Kabupaten Berau.	Tahun	-	-	1	
----	--	---	-------	---	---	---	--

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Evaluasi Kinerja Kegiatan

Kegiatan merupakan tindakan kongkrit yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan mengacu pada kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Jumlah seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Berau pada Tahun 2014 sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) kegiatan.

Dari 9 (Sembilan) Program dan 43 (Empat Puluh Tiga) Kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, pada tahun 2014 secara keseluruhan telah dievaluasi. Analisis diarahkan terhadap Capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang menghasilkan nilai dengan kategori sampai dengan 55 % berkategori kurang berhasil, 55-70% berkategori cukup berhasil, 70-85% berkategori berhasil dan capaian kinerja yang bernilai 85-100% dengan berkategori berhasil dengan baik.

Evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan diarahkan terhadap indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari: Input, Output dan Outcome. Hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau yang mempunyai visi "*Terwujudnya Usaha Perkebunan yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera*" dapat dilihat pada table Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang dianalisis yaitu sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Kegiatan: 15 (Lima Belas) Kegiatan

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input: Output: Outcome:	1.500.000,- 120 surat 100%	1.500.000,- 120 surat 100%	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input: Output: Outcome:	120.700.000,- 1 Tahun 100%	112.320.338,- 1 Tahun 93,06%	93,06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Input: Output: Outcome:	202.700.000,- 42 unit 100%	124.149.650,- 42 unit 61,25%	61,25
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input: Output: Outcome:	191.370.000,- Honor tepat waktu 100%	171.560.000,- Honor tepat waktu 89,65%	89,65
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input: Output: Outcome:	43.400.000,- 1 Tahun 100%	43.160.000,- 1 Tahun 99,45%	99,45
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input: Output: Outcome:	20.000.000,- 1 tahun 100%	17.935.000,- 1 tahun 89,68%	89,68
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input: Output: Outcome:	32.000.000,- 1 tahun 100%	32.000.000,- 1 tahun 100%	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input: Output: Outcome:	20.000.000,- 1 tahun 100%	19.979.000,- 1 tahun 99,9%	99,9
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input: Output: Outcome:	10.000.000,- 1 Tahun 100%	9.997.850,- 1 Tahun 99,98%	99,98
Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	Input: Output: Outcome:	129.855.000,- 1 tahun 100%	116.343.000,- 1 tahun 89,59%	89,59
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input: Output: Outcome:	7.200.000,- 1 Tahun 100%	4.200.000,- 1 Tahun 58,33%	58,33
Penyediaan Makanan dan Minuman	Input: Output: Outcome:	29.000.000,- 1 Tahun 100%	28.707.200,- 1 Tahun 98,99%	98,99
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Input: Output: Outcome:	300.000.000,- 1 Tahun 100%	276.748.362,- 1 Tahun 92,25%	92,25
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Input: Output: Outcome:	250.000.000,- 1 Tahun 100%	218.969.950,- 1 Tahun 87,59%	87,59
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran	Input: Output: Outcome:	60.600.000,- 1 Tahun 100%	60.600.000,- 1 Tahun 100%	100

Berdasarkan Tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan berhasil dengan baik,dengan pencapaian sebesar 87,30%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Kegiatan: 2 (dua) Kegiatan

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input: Output: Outcome:	Rp. 74.800.000,- 1 tahun 100%	Rp. 74.692.000,- 1 tahun 99,86%	99,86
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Input: Output: Outcome:	Rp. 5.000.000,- 1 Tahun 100%	Rp. 5.000.000,- 1 Tahun 100%	100

Berdasarkan Tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dapat dilaksanakan berhasil dengan baik, dengan pencapaian sebesar 99,93%.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Kegiatan: 2 (satu) Kegiatan

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Input: Output: Outcome:	Rp.160.000.000,- 1 Tahun 100%	Rp.107.868.100,- 1 tahun 67,42%	67,42
Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Input: Output: Outcome:	Rp.150.000.000,- 1 tahun 100%	Rp.90.578.200,- 1 tahun 60,39%	60,39

Berdasarkan Tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, cukup berhasil dengan pencapaian sebesar 64,01%.

Kegiatan Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Berau pada Tahun Anggaran 2014 dengan output Terlaksananya Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan Outcome Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku.

Dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*) realisasi anggaran hanya sebesar Rp. 90.578.200 (*Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*) dengan capaian kinerja sebesar 60,39%, sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp. 59.421.800,- (*Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Kegiatan Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dilaksanakan dibawah pengarahannya dari Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III (PKP2A III) Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Samarinda. Kegiatan Pelatihan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali Pelatihan, Pelatihan Pertama dilaksanakan di Ruang Pertemuan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dan diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta dan Pelatihan ke dua dilaksanakan di Gedung Pelatihan PKP2A III LAN di Samarinda dan diikuti oleh 6 Orang Peserta dan 2 Orang Pendamping.

Adanya sisa anggaran pada Kegiatan Standar Operasional Prosedur (SOP) disebabkan adanya perbedaan beban biaya narasumber antara standar yang telah ditetapkan LAN dengan DPA Dinas Perkebunan Kabupaten Berau. Pihak LAN Samarinda tidak bersedia menerima honor narasumber sesuai DPA

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau karena akan kesulitan dalam proses administrasi sesuai prosedur LAN. Namun demikian pelaksanaan Pelatihan SOP Dinas Perkebunan Kabupaten Berau tetap dapat dilaksanakan.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Kegiatan: 2 (dua) Kegiatan

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input: Output: Outcome:	Rp. 5000.000,- 10 Buku 100%	Rp. 5.000.000,- 10 Buku 100%	100
Sosialisasi Kinerja Program SKPD	Input: Output: Outcome:	25.000.000,- 1 paket 100%	23.560.000,- 1 Paket 94,24%	94,24

Berdasarkan Tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dapat dilaksanakan berhasil dengan baik dengan pencapaian sebesar 95,20%.

Kegiatan Sosialisasi Kinerja Program SKPD dilaksanakan dengan Keikutsertaan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dalam kegiatan Expo Kabupaten Berau dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Berau yang merupakan even dua tahunan dijadikan sebagai ajang promosi dan informasi yang terkait dengan komoditas perkebunan dan kinerja program SKPD Dinas Perkebunan kepada masyarakat pekebun di Kabupaten Berau, melalui Kegiatan Sosialisasi Kinerja Program SKPD dengan pagu anggaran Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) realisasi kegiatan sebesar Rp. 23.560.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) digunakan untuk sewa stand pameran dan pembangunan stand pameran serta bahan-bahan material untuk pameran berupa contoh komoditi

hasil perkebunan maupun leaflet dan buku sebagai bahan informasi bagi pengunjung pameran.

e. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Jumlah Kegiatan: 4 (empat) Kegiatan

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Input: Output: Outcome:	Rp. 300.000.000,- 5 Kampung 100%	Rp. 98.124.750,- - 32,71%	32,71
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan Pembinaan Pelaksanaan Kemitraan/Plasma Masyarakat dengan PBS	Input: Output: Outcome:	Rp. 241.730.000,- 10 Kampung 60%	Rp. 211.156.900,- 10 Kampung 87,35%	87,35
Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif Bagi Petani/Kelompok Tani	Input: Output: Outcome:	Rp. 215.000.000,- 2 Kampung 40%	Rp. 105.185.350,- - 48,92%	48,92
Konservasi Lahan dengan Komoditas Perkebunan	Input: Output: Outcome:	Rp.972.700.000,- 2 Kampung 40%	Rp. 871.310.250,- 2 Kampung 90,80%	90,80

Berdasarkan Tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Peningkatan Kesejahteraan Petani adalah sebesar 75,03% yang bermakna Program berhasil dilaksanakan, namun terdapat dua kegiatan yang menunjukkan **kurang berhasil** dilaksanakan yaitu Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis, capaian kinerjanya hanya sebesar 32,71% dan Kegiatan Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi Petani / Kelompok Tani yang capaian kinerjanya hanya sebesar 48,92%.

- f. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Jumlah Kegiatan: 5 (lima) Kegiatan

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Input: Output: Outcome:	Rp. 100.000.000,- 1 Tahun 100%	Rp. 86.977.900,- 1 Tahun 86,98%	86,98
Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat	Input: Output: Outcome:	Rp.164.000.000,- 1 Tahun 100%	Rp.138.907.000,- 1 Tahun 84,70%	84,70
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Input: Output: Outcome:	Rp.150.000.000,- 8 Kampung 80%	Rp. 112.129.600,- 8 Kampung 74,75%	74,75
Pendampingan Pekebun dan Pelaku Agribisnis(Pekan Nasional Kontak tani Pekebun Andalan)	Input: Output: Outcome:	Rp.250.000.000,- 11Petani 100%	Rp. 220.686.300,- 11Petani 88,27%	88,27
Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Input: Output: Outcome:	Rp.157.500.000,- 7 kampung 100%	Rp. 139.795.300,- 7 kampung 88,76%	88,76

Berdasarkan Tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dapat berhasil dilaksanakan dengan pencapaian sebesar 85,03%.

g. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Jumlah Kegiatan: 5 (lima) Kegiatan

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan	Input: Output: Outcome:	Rp.1.081.685.000,- alsin 100%	Rp.793.252.530,- alsin 73,33%	73,33
Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Input: Output: Outcome:	Rp.151.340.000,- 1,5 Ha 30%	Rp. 119.739.801,- 1,5 Ha 79,12%	79,12
Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam	Input: Output: Outcome:	Rp.216.100.000,- 75 Orang 100%	Rp. 144.681.300,- 75 Orang 66,95%	66,95
Pengembangan Pengetahuan Sarana dan Prasarana Perlindungan Petani Perkebunan	Input: Output: Outcome:	Rp.150.000.000,- 11 kampung 100%	Rp. 132.629.775,- 11 kampung 88,42%	88,42
Sekolah Lapang Penerapan Teknologi Budi Daya Tepat Guna (SL-PHT)	Input: Output: Outcome:	Rp. 500.000.000,- 150 Orang 100%	Rp. 430.170.100,- 150 Orang 86,03%	86,03

Berdasarkan Tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dapat berhasil dilaksanakan dengan pencapaian sebesar 77,20%, namun terdapat satu Kegiatan yaitu Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam yang pencapaiannya hanya sebesar 66,95 yang bermakna cukup berhasil.

h. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Jumlah Kegiatan: 6 (enam) Kegiatan

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Input: Output: Outcome:	Rp. 3.516.829.000,- - bibit - pupuk dan obat-obatan 100%	Rp. 2.703.076.476,- - bibit - pupuk dan obat-obatan 76,86%	76,86
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Input: Output: Outcome:	Rp.200.000.000,- 75 Orang 100%	Rp. 94.627.900,- - 47,31%	47,31
Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Input: Output: Outcome:	Rp.257.160.000,- 5 Kampung 100%	Rp.191.683.650,- 5 Kampung 74,54%	74,54
Pengolahan Data Statistik Perkebunan (Pembuatan Buku Data Statistik Komoditi Unggulan)	Input: Output: Outcome:	Rp.349.470.000,- 50 buku 100%	Rp. 299.828.665,- 50 buku 85,80%	85,80
Pengendalian dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Input: Output: Outcome:	Rp.386.000.000,- 90 Orang 100%	Rp. 213.014.025,- - 55,18%	55,18
Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Besar	Input: Output: Outcome:	Rp. 300.150.000,- 15 PBS 100%	Rp. 259.832.700,- 15 PBS 86,57%	86,57

Berdasarkan Tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dapat berhasil dilaksanakan dengan pencapaian sebesar 75,10%, namun terdapat dua kegiatan yang menunjukkan Pelaksanaan Kegiatan **Kurang Berhasil** yaitu Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan dengan capaian kinerja hanya 47,31% dan Kegiatan Pengendalian dan Perlindungan Tanaman Perkebunan dengan capaian kinerja sebesar 55,18% .

i. Program Pengembangan Perencanaan Perkebunan

Jumlah Kegiatan: 2 (dua) Kegiatan

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Konsolidasi Pembangunan Perkebunan	Input:	Rp.259.000.000,- Rakorbun, Musrembang dan rakornis 100%	Rp.203.363.750,- Rakorbun dan musrembang 78,52%	78,52
	Output:			
	Outcome:			
Penyusunan Database Komoditi Unggulan Perkebunan	Input:	Rp.250.000.000,- Database 100%	242.463.400,- Database 96,99%	96,99
	Output:			
	Outcome:			

Berdasarkan Tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Pengembangan Perencanaan Perkebunan berhasil dilaksanakan dengan baik sehingga pencapaian berkategori 87,59%.

2. Analisis Capaian Indikator Kinerja

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
1	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani karet dan kakao	Terlatihnya petani karet dan kakao	Orang	75	75	66,95

Pencapaian Sasaran 1 :

Sasaran Pertama yaitu Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan Petani Karet dan Kakao dengan Indikator Kinerja Terlatihnya Petani Karet dan Kakao tercover dalam Kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 216.100.000,- (Dua Ratus Enam Belas Juta Seratus Ribu Rupiah), realisasi anggaran sebesar Rp. 144.681.300 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan capaian kinerja sebesar 66,95% sehingga menyisakan anggaran sebesar 71.418.700,- (Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Inti Kegiatan adalah pelaksanaan pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Komoditi Karet di 3 (tiga) kampung yaitu Kampung Batu Rajang, Kampung Labanan Makmur dan Kampung Sukan dengan jumlah peserta pelatihan 25 orang tiap kampung.

Adanya sisa anggaran kegiatan disebabkan karena biaya transportasi dan akomodasi serta honorarium narasumber tidak dapat dicairkan karena narasumber untuk kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam adalah PNS Dinas Perkebunan Kab.Berau. Pelaksanaan Pelatihan tetap dapat dilaksanakan dengan menggunakan beban anggaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana tertuang dalam Anggaran Perubahan (DPPA) Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2014.

Selain itu sisa anggaran juga disebabkan penyerapan anggaran perjalanan dinas dalam daerah sebagian dilaksanakan oleh staf dengan menyesuaikan standarisasi perjalanan dinas Kabupaten Berau.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
2	Meningkatnya pengetahuan petani dalam penguasaan teknologi sarana dan prasarana perlindungan perkebunan	Peningkatan Penguasaan teknologi sarana dan prasarana perlindungan perkebunan	Kampung	11	11	88,42

Pencapaian Sasaran 2 :

Meningkatnya Pengetahuan Petani dalam Penguasaan Teknologi Sarana dan Prasarana Perlindungan Perkebunan merupakan Sasaran kedua dengan Indikator Kinerja Peningkatan Penguasaan Teknologi Sarana dan Prasarana Perlindungan Perkebunan yang dilaksanakan dalam

Kegiatan Pengembangan Pengetahuan Sarana dan Prasarana Perlindungan Petani Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.

Inti Kegiatan Monitoring Sarana dan Prasarana Perlindungan Perkebunan di 11 Kampung, yaitu:

- Kampung Cipuak (PT. Tanjung Buyu Perkasa)
- Kampung Gunung Sari (PT. Hutan Hijau Mas)
- Kampung Merapun (PT. Yudha Perkasa)
- Kampung Tanjung Batu (PT. Sentosa Kalimantan Jaya)
- Kampung Teluk Sulaiman
- Kampung Tanjung Perepat
- Kampung Bukit Makmur Jaya
- Kampung Sidobangen
- Kampung Tubaan
- Kampung Bukit Makmur
- Kampung Harapan Jaya

Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), realisasi anggaran mencapai Rp. 132.629.775,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan capaian Kinerja sebesar 88,42% sehingga dapat diartikan bahwa pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pengetahuan Sarana dan Prasarana Perlindungan Petani Perkebunan dapat dilaksanakan dengan baik.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
3	Meningkatnya jumlah petani yang menguasai teknologi tepat guna kakao dan lada	Petani menguasai teknologi budidaya tepat guna kakao dan lada	Orang	150	150	86,03

Pencapaian Sasaran 3 :

Sasaran ketiga yaitu Meningkatkan jumlah petani yang menguasai teknologi tepat guna Kakao dan Lada dengan Indikator Kinerja Petani menguasai teknologi budidaya tepat guna Kakao dan Lada dilaksanakan melalui Kegiatan Sekolah Lapang Penerapan Teknologi Budi Daya Tepat Guna (SL-PHT) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.

Pada Tahun Anggaran 2014, Kegiatan SL-PHT menitik beratkan materi pelatihan pada komoditi Lada. Pagu Anggaran Kegiatan SL-PHT untuk Tahun 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan penyerapan anggaran kegiatan sebesar Rp. 430.170.100,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Rupiah), Capaian Kinerja sebesar 86,03% sehingga dapat diartikan pelaksanaan Kegiatan SL-PHT Komoditi Lada Tahun 2014 dapat berhasil dengan baik.

Adapun sisa anggaran sebesar Rp. 69.829.900,- (Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) merupakan selisih antara realisasi biaya pengadaan dan belanja perjalanan dinas untuk kegiatan Persiapan Lokasi dan Calon Peserta Pelatihan.

Pelaksanaan Pelatihan SL-PHT Komoditi Lada diadakan di 6 Kampung yaitu:

- Kampung Pesayan pada Kelompok Belajar Setia Bersatu dengan jumlah peserta 25 orang dan waktu pelatihan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan.
- Kampung Buyung-Buyung pada Kelompok Belajar Maju Bersama dengan jumlah peserta 25 orang dan waktu pelatihan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan.
- Kampung Biatan Bapinang pada Kelompok Belajar Debora dengan jumlah peserta 25 orang dan waktu pelatihan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan.
- Kampung Suka Muria pada Kelompok Belajar Bina Bersama dengan jumlah peserta 25 orang dan waktu pelatihan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan.
- Kampung Tembudan pada Kelompok Belajar Manunggal Jaya dengan jumlah peserta 25 orang dan waktu pelatihan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan.
- Kampung Maluang pada Kelompok Belajar Sahang Lestari dengan jumlah peserta 25 orang dan waktu pelatihan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan.

Sebagai penunjang kegiatan pelatihan (SL-PHT), dilaksanakan pengadaan gunting pangkas sebanyak 156 unit untuk 150 peserta dan 6 orang pemandu. Selain itu sebagai perlengkapan pakaian kerja lapang diberikan pula

sepatu lapang (156 buah), Baju Kaos (156 buah), jashujan (6 buah) dan tas ransel untuk pemandu sebanyak 6 buah.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
4	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani lada, kakao dan karet	Terlatihnya Petani Perkebunan lada, kakao dan karet	Kampung	5	-	47,31

Pencapaian Sasaran 4 :

Sasaran ke empat yaitu Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani lada, kakao dan karet dengan indicator kinerja terlatihnya petani perkebunan lada, kakao dan karet tertuang dalam Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

Pagu Anggaran Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan penyerapan anggaran hanya sebesar Rp. 94.627.900,- (Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau capaian kinerja kegiatan hanya sebesar 47,31% yang berarti kegiatan kurang berhasil dilaksanakan dengan baik, sehingga menyisakan sisa anggaran sebesar Rp. 105.372.100,- (Seratus Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).

Inti Kegiatan adalah Pelatihan Perbanyak Bahan Tanaman dengan tujuan Meningkatnya pemahaman petani/pekebun tentang bahan tanaman unggulan perkebunan yang akan dilaksanakan di 3 Kampung yaitu Kampung Harapan Maju, Kampung Labanan Makmur dan Kampung Punan Malinau. Namun pelaksanaan kegiatan pelatihan tidak dapat dilaksanakan disebabkan Belanja Bantuan Biaya Transportasi dan Akomodasi untuk instruktur dan panitia pelatihan tidak dapat direalisasikan karena berdasarkan hasil Ekspos dari Inspektorat Kabupaten Berau untuk Instruktur atau narasumber PNS biaya tersebut telah tercover dalam perjalanan dinas dalam daerah. Dengan demikian anggaran belanja makan dan minum kegiatan pelatihan, bantuan biaya transportasi peserta pelatihan dan pembuatan spanduk pelatihan tidak dapat direalisasikan.

Honorarium Pembuatan Laporan dan Panduan Teknis Kegiatanpun tidak dapat direalisasikan karena belanja cetak tidak digunakan.

Selain Kegiatan Pelatihan Perbanyak Bahan Tanaman, inti Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan adalah Pemberian bantuan kepada masyarakat berupa pemberian bibit kelapa tembisan/kacang sebanyak 50 pohon untuk Kampung Payung-Payung Kecamatan Maratua dan Bibit Kelapa Genjah sebanyak 50 pohon untuk Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan. Bantuan bibit Kelapa Tembisan dan Kelapa Genjah pun tidak dapat dilaksanakan karena terdapat perbedaan harga antara harga pasar (Balitka Manado) dengan harga yang telah ditetapkan dalam DPA Dinas Perkebunan

Kabupaten Berau, dengan demikian anggaran Upah Harian Lepas untuk Honor Tenaga Pembuatan Lubang Tanam dan Pembuatan Pagar Individu dalam rangka penanaman bibit Kelapa Tembisan dan Kelapa Genjah juga tidak dapat direalisasikan.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
5	Meningkatnya harga pasar komoditi perkebunan	Terciptanya mutu produksi komoditi perkebunan sesuai pangsa pasar	Kampung	7	7	88,76

Pencapaian Sasaran 5 :

Dalam upaya meningkatkan mutu hasil produksi komoditi unggulan perkebunan dilaksanakan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau untuk memenuhi sasaran ke lima yaitu Meningkatkan harga pasar komoditi perkebunan dengan indikator kinerja terciptanya mutu produksi komoditi perkebunan sesuai pangsa pasar melalui Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dengan jalan melakukan pembinaan kepada petani pekebun dalam rangka pemanfaatan peralatan dan mesin pengolahan hasil perkebunan.

Pagu Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan pada tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 157.500.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 139.795.300,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga

RatusRupiah) atau 88,76% sehingga dapat diartikan pelaksanaan kegiatan dapat berhasil dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan berupa Pembinaan dan Pemanfaatan alat dan mesin Pengolahan Komoditi Perkebunan yang dilaksanakan di beberapa kampung yaitu Kampung Biduk-Biduk, Giring-Giring, Eka Sapta, Campur Sari, Sido Bangen, Tumbit Melayu, dan Merasa.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
6	Lebih dikenalnya produk unggulan perkebunan daerah	Terpromosinya produk unggulan perkebunan daerah	Kota	3	3	86,98

Pencapaian Sasaran6 :

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau mengusahakan lebih dikenalnya produk unggulan perkebunan daerah sebagai sasaran keenam dengan indikator kinerja terpromosinya produk unggulan perkebunan daerah melalui Kegiatan Promosi Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dengan mengikuti kegiatan pameran / ekspo yang dilaksanakan di dalam wilayah Kalimantan Timur maupun wilayah Nasional.

Kegiatan Promosi Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan tersebut bertujuan memperkenalkan atau mempromosikan hasil komoditi

unggulan daerah Kabupaten Berau kepada masyarakat Kabupaten Berau maupun masyarakat Luar Kabupaten Berau.

Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah merupakan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau untuk mempromosikan komoditi unggulan perkebunan Kabupaten Berau yang dilaksanakan di Luar Daerah Kabupaten Berau, dengan mengikuti Expo di Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Expo di Jakarta, dan Expo di Jogjakarta. Dengan Pagu Anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), kegiatan dapat berhasil dilaksanakan dengan baik dengan realisasi anggaran mencapai 86.977.900,- (Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau 86,98%.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
7	Meningkatnya pengembangan usaha produksi sesuai permintaan pasar	Tersebar luasnya data informasi harga pasar komoditi perkebunan	Tahun	1	1	84,70

Pencapaian Sasaran 7 :

Informasi harga pasar sangat erat hubungannya dengan tata niaga komoditi perkebunan dimana petani/pengusaha dapat mengakses informasi harga pasar komoditi perkebunan dan lokasi pasar komoditi sebagai dasar

untuk menentukan jenis dan mutu komoditas yang akan diproduksi dan ditingkatkan harga jualnya.

Kegiatan Pengolahan Informasi Pasar atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan pada tahun anggaran 2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 164.000.000,- (SeratusEnam Puluh Empat Juta Rupiah) melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi harga pasar komoditi perkebunan kepada para petani pekebun diwilayah Kabupaten Berau dengan realisasi kegiatan sebesar Rp. 138.907.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Rupiah)dengan capaian kinerja sebesar 84,70% sehingga dapat diartikan pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan berupa pengumpulan dan pengolahan harga pasar yang diperoleh dengan jalan survey pasar tentang harga jual komoditas perkebunan di tingkat petani, pedagang maupun pengecer di masyarakat pekebun di Kabupaten Berau. Selain itu diikuti pula kegiatan penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) bersama tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk menetapkan standart harga TBS KelapaSawit dari umur tanaman 3 tahun sampai dengan umur 10 tahun keatas sesuai ketetapan Dinas Perkebunan Kalimantan Timur.

Berdasarkan informasi harga pasar hasil komoditas perkebunan Kabupaten Berau tahun 2014, diperoleh informasi peningkatan harga pada komoditi jika dibandingkan dengan harga jual komoditas tersebut di tahun 2012 dan tahun 2013. Hal ini memberikan dampak positif bagi petani pekebun

sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat dan motivasi petani pengelola usaha perkebunan untuk lebih meningkatkan produksi hasil perkebunan sehingga produktivitas petani pekebunpun juga dapat meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan petani pengelola komoditas perkebunan.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
8	Terjalannya hubungan kemitraan dan informasi teknologi bagi petani	Terlaksananya kegiatan PENAS	Orang	11	11	88,76

Pencapaian Sasaran8 :

Terlaksananya hubungan kemitraan dan informasi teknologi bagi petani dengan indikator kinerja terlaksananya kegiatan PENAS, tertuang dalam kegiatan Pendampingan Pekebun dan Pelaku Agribisnis (Pekan Nasional Kelompok Tani Pekebun Andalan=PENAS), Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.

Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah), realisasi anggaran mencapai Rp. 220.686.300,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Delapan Pulu Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau 88,27% sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan menyisakan anggaran sebesar Rp. 29.313.700 (Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Sisa Anggaran pada Kegiatan Pendampingan Pekebun dan Pelaku Agribisnis (Pekan Nasional Kelompok Tani Pekebun Andalan) disebabkan karena adanya kelebihan standar belanja transportasi dan akomodasi serta uang saku non PNS pada DPA SKPD Tahun 2014 dengan standarisasi yang telah ditetapkan Kabupaten Berau.

Even PENAS dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Pada tahun 2014, Kegiatan PENAS diadakan di Kota Malang, Jawa Timur, Kegiatan Pendampingan Pekebun dan Pelaku Agribisnis dilaksanakan selama 7 hari dengan jumlah petani sebanyak 11 petani dan pendamping sebanyak 11 orang dari PNS Dinas Perkebunan Kab. Berau.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
9	Pengendalian Serangan OPT pada tanaman perkebunan	Terkendalnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Orang	90	-	55,18

Pencapaian Sasaran 9 :

Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman dengan Indikator Kinerja Terkendalnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) merupakan Sasaran ke 9 (Sembilan) dari Dinas Perkebunan Kabupaten Berau yang tertuang dalam Kegiatan Pengendalian dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

Pagu anggaran Kegiatan Pengendalian dan Perlindungan Tanaman Perkebunan adalah sebesar Rp. 386.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 213.014.025,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Empat Belas Ribu Dua Puluh Lima Rupiah atau capaian kinerja kegiatan sebesar 55,18% yang berarti Kegiatan kurang berhasil dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Perlindungan Tanaman Perkebunan dititik beratkan pada pelaksanaan Pelatihan Pengendalian OPT dengan target pelaksanaan di 3 (tiga) kampung yaitu Kampung Gunung Sari, Kampung Tanjung Batu dan Kampung Teluk Sulaiman. Namun Kegiatan Pelatihan OPT Tanaman Perkebunan tidak dapat dilaksanakan karena terkendala adanya ketentuan Tidak boleh diberikannya Biaya Transportasi dan Akomodasi untuk Instruktur/Narasumber dan Panitia Pelatihan yang berasal dari PNS. Dengan demikian anggaran untuk makan dan minum kegiatan, Biaya Uang Saku untuk masyarakat peserta pelatihan, Biaya Sewa Balai Pertemuan, Biaya Sewa Meja Kursi untuk Kegiatan Pelatihan dan Honorarium Instruktur/Narasumber Pelatihan juga tidak dapat direalisasikan.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
10	Meningkatnya Produktifitas Lahan Petani Non Produktif	Terealisasinya Penanaman lahan petani non produktif	Kampung	2	2	90,80

Pencapaian Sasaran 10 :

Untuk Meningkatkan Produktifitas Lahan Pertanian Non Produktif, Kegiatan Konservasi lahan dengan komoditas perkebunan pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dilaksanakan dengan indikator Terealisasinya Penanaman lahan pertanian non produktif. Pada tahun anggaran 2014 inti kegiatan tetap menitik beratkan pada Pengadaan Bibit Pala untuk lahan terlantar menindak lanjuti pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2013 di Kecamatan Biduk-Biduk.

Kegiatan bantuan ke masyarakat melalui pengadaan bibit pala tersebut merupakan hasil musrenbang 2013 Kabupaten Berau yang dilaksanakan untuk Kampung Tanjung Perepat sebanyak 5.600 bibit pala dan di Kampung Teluk Sulaiman sebanyak 4.300 bibit pala untuk melengkapi sisa permohonan masyarakat Kampung Teluk Sulaiman yang pada tahun 2013 telah menerima bantuan sebanyak 5.700 bibit pala.

Sebagai penunjang pengadaan bibit pala di kedua kampung tersebut, diberikan pula bantuan Insektisida dan Pupuk melalui Pengadaan Bahan Kimia dan Pupuk untuk kedua kampung tersebut, terdiri dari :

a. Kampung Tajung Perepat, meliputi:

- Herbisida Merk Round Up, sebanyak 400 liter
- Insektisida, sebanyak 75 liter dan
- Pupuk Organik merk Manggala, sebanyak 400 liter.

b. Kampung Teluk Sulaiman, meliputi:

- Herbisida merk Round Up, sebanyak 345 liter
- Insektisida, sebanyak 55 liter dan
- Pupuk Organik merk Manggala, sebanyak 345 liter.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
11	Meningkatnya mutu hasil olahan komoditas perkebunan dan tertibnya penggunaan alat berat bagi PBS dalam pembangunan perkebunan besar	Tersedianya dan dimanfaatkannya sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna berupa alat dan mesin pengolahan hasil perkebunan serta terlaksananya pembinaan penggunaan alat berat bagi PBS dan pembangunan perkebunan	Tahun	1	1	73,33

Pencapaian Sasaran 11 :

Guna mendorong meningkatnya mutu hasil olahan komoditas perkebunan dan tertibnya penggunaan alat berat bagi PBS dalam pembangunan perkebunan besar, Dinas perkebunan menetapkan indicator kinerja sasaran melalui tersedianya dan dimanfaatkannya sarana dan prasarana

teknologi perkebunan tepat guna berupa alat dan mesin pengolahan hasil perkebunan serta terlaksananya pembinaan penggunaan alat berat bagi PBS dan pembangunan perkebunan yang terlaksana melalui Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna adalah pemberian barang yang akan diserahkan ke masyarakat berupa alat dan mesin (Alsin) pengolah hasil produksi komoditas perkebunan untuk meningkatkan kualitas nilai produk hasil olahan perkebunan serta pelaksanaan pelatihan pengoperasian alsin pengolahan hasil perkebunan. Dengan pagu anggaran untuk tahun 2014 sebesar Rp. 1.081.685.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), realisasi anggaran mencapai Rp. 793.252.530,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan capaian kinerja 73,33% yang berarti kegiatan berhasil dilaksanakan.

Pemberian barang yang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga dengan target anggaran sebesar Rp. 569.800.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 476.800.000, terdiri dari:

- a. Kampung Sambakungan, Kec. Gunung Tabur, berupa 1 unit Alsin Perontok biji lada dan 1 unit Alsin Pengupas biji lada
- b. Kampung Pesayan, Kec. Sambaliung, berupa 1 unit Alsin Perontok biji lada dan 1 unit Alsin Pengupas biji lada

- c. Kampung Tubaan Kec. Tabalar, berupa 1 unit alsin pengering biji kakao.
- d. Kampung Maluang, berupa 8 unit lantai jemur kakao
- e. Kampung Tubaan, berupa 6 unit lantai jemur kakao
- f. Kampung Biatan Ilir, berupa 6 unit lantai jemur kakao

❖ Pengadaan Lantai Jemur Kakao untuk Kampung Maluang, Kampung Tubaan dan Kampung Biatan Ilir dilaksanakan melalui paket Lelang dengan nilai kontrak Rp. 213.573.000,-

- g. KT. Indosari, Kampung Gunung Sari, berupa 100 pcs pisau sadap, 200 pcs mangkuk lateks dan 200 pcs talang sadap.
- h. Kampung Batu Rajang, berupa 75 pcs pisau sadap, 150 pcs mangkuk lateks dan 150 pcs talang sadap.
- i. Kampung Biatan Ilir, berupa 75 pcs pisau sadap, 150 pcs mangkuk lateks dan 150 pcs talang sadap.

Adapun sisa anggaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna sebesar Rp. 288.432.470,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah), disebabkan karena:

- a. Pengadaan 1 unit Alsin Pengering Biji Kakao untuk Kampung Gunung Tabur tidak dilaksanakan karena Petani Calon Penerima tidak mampu untuk menyediakan rumah mesin/bangunan penyimpanan mesin, disamping itu tidak adanya tenaga operasional alsin tersebut.

- b. Pelaksanaan pelatihan alat dan mesin pengolahan hasil perkebunan di Kampung Biatan Lampake Kecamatan Biatan tidak dapat dilaksanakan, disebabkan Pelatih/Narasumber yang ada di daerah tidak sanggup untuk melatih dikarenakan belum ada yang memiliki sertifikat sebagai pelatih alat dan mesin perkebunan, sedangkan untuk mendatangkan narasumber dari luar daerah terkendala factor ketersediaan dana yang tidak mencukupi. Dengan demikian Honorarium Pelatih/Narasumber Pelatihan, Uang Saku Peserta Pelatihan, Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelatihan serta belanja Bantuan Transportasi dan Akomodasi untuk peserta dan narasumber pelatihan tidak dapat direalisasikan karena Pelaksanaan Pelatihan tidak dilaksanakan.
- c. Tidak terlaksanakannya pelatihan untuk pelatih (TOT) Pengoperasian alat dan mesin pengolahan kopi di Puslitkoka, Jember, Jawa Timur disebabkan tidak disetujui oleh Kepala Dinas Perkebunan Kab. Berau, sehingga Biaya Kontribusi peserta pelatihan tidak dapat direalisasikan atau dibayarkan ke Puslit Koka Jember, Jawa Timur.
- d. Tidak direalisaiakannya Pembuatan Panduan Teknis dan Laporan Kegiatan.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
12	Terbangunnya kebun demplot budidaya tanaman perkebunan	Terselenggaranya demplot pemupukan tanaman perkebunan	Ha	1,5	1,5	79,12

Pencapaian Sasaran 12 :

Terbangunnya Kebun Demplot budidaya tanaman perkebunan merupakan upaya Dinas Perkebunan Kabupaten Berau untuk memberikan pemahaman pada para petani dalam mengolah kebunnya. Dengan indikator kinerja terselenggaranya demplot pemupukan tanaman perkebunan melalui Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna bertujuan terbangunnya Demplot pemupukan kakao di Kampung Batu Rajang, Kampung Biatan Ilir, dan Kampung Makasang.

Pada Tahun 2014, pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 151.340.000,- realisasi kegiatan sebesar Rp. 119.739.801,- Capaian kinerja mencapai 79,12%, berarti pelaksanaan kegiatan berhasil dilaksanakan.

Adanya sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 31.600.199 disebabkan adanya pembayaran honorarium kegiatan (Honorarium tim pembuatan laporan Kegiatan, Honorarium Penanggung jawab pengelola keuangan yaitu Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pengelola Bendahara Pengeluaran Pembantu) yang telah terakomodir dalam kegiatan lain.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
13	Terwujudnya kesejahteraan petani dan pelaku agribisnis	Terlatihnya petani dan pelaku agribisnis dalam meningkatkan kesejahteraan petani	kampung	5	-	32,71

Pencapaian Sasaran 13 :

Sasaran ke 13 yaitu Terwujudnya Kesejahteraan Petani dan Pelaku Agribisnis dengan indikator kinerja Terlatihnya petani dan Pelaku Agribisnis dalam meningkatkan kesejahteraan petani dilaksanakan melalui Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Program Peningkatan Kesejahteraan Petani yang pada Tahun Anggaran 2014 dengan Pagu Anggaran Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tidak dapat terlaksana dengan baik, dengan realisasi anggaran hanya sebesar Rp 98.124.750,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) tingkat capaiannya sebesar 32,71% yang berarti Pelaksanaan Kegiatan kurang berhasil dilaksanakan dan menyisakan anggaran sebesar Rp. 201.875.250,- (Dua Ratus Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Inti Kegiatan adalah pelaksanaan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis dengan target pelaksanaan di 5 kampung yaitu Kampung Biatan Lampake, Kampung Campur Sari, Kampung Kayu Indah, Kampung Biatan Baru dan Kampung Eka Sapta. Kegiatan pendataan Calon Peserta Pelatihan telah

dilaksanakan, namun pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan.

Tidak dapat dilaksanakannya Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis di Tahun Anggaran 2014 ini disebabkan karena kesalahan penganggaran sesuai pengarahannya dari Inspektorat Kabupaten Berau pada saat ekspose dengan Dinas Perkebunan di Kantor Itwilda Kabupaten Berau pada awal tahun 2014 yang menyatakan bahwa pada kode rekening Biaya Transportasi dan Akomodasi tidak boleh dicairkan atau dibayarkan untuk PNS, sedangkan dalam hal ini narasumber dalam kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis merupakan PNS di Dinas Perkebunan Kabupaten Berau. Pada saat kegiatan ekspose tersebut DPA Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2014 telah tersusun.

Biaya Transportasi dan Akomodasi tersebut dapat digeser ke rekening Perjalanan Dinas melalui pergeseran anggaran atau objek belanja melalui persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 145 ayat (3) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Pre Audit pada Dinas Perkebunan Kabupaten Berau oleh Inspektorat Kabupaten Berau Nomor 900/50/ltkab-Irban.III/XI/2014 Tanggal 17 November 2014

Pihak Pengelola Kegiatan dalam hal ini PPTK telah mengupayakan kegiatan revisi atau perbaikan tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Berau untuk mendapatkan

Persetujuan Pergeseran Kode Rekening sesuai arahan dari Inspektorat Kabupaten Berau, selain itu juga melaksanakan konsultasi dengan DPPKK Kabupaten Berau.

Dari hasil konsultasi dengan DPPKK yang dilaksanakan pada saat Asistensi Anggaran Perubahan diperoleh penjelasan bahwa pergeseran Kode rekening dalam system SIMDA yang ada sulit dilaksanakan.

Dengan demikian Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis tidak dapat dilaksanakan di tahun 2014 dan akan diakomodir di tahun anggaran 2015.

Sisa anggaran dalam Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis merupakan objek belanja dalam kode rekening penunjang pelaksanaan kegiatan pelatihan yang tidak dapat dibayarkan atau direalisasikan, meliputi:

- Honorarium Panitia
- Belanja Makan dan Minum Kegiatan
- Belanja Transportasi dan Akomodasi
- Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber
- Honorarium Non PNS (Masyarakat)

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
14	Terbentuknya beberapa Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)	Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani / koperasi				

Pencapaian Sasaran 14 :

Kegiatan Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi petani/kelompok tani, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani memiliki sasaran yaitu terbentuknya beberapa Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dengan indikator kinerja meningkatnya kemampuan kelembagaan petani/koperasi.

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemitraan antara masyarakat dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan petani/koperasi dengan melakukan pembinaan Penguatan Kelompok Tani Perkebunan yang dilaksanakan di Kampung Biduk-Biduk, Dumaring, Suka Muria, Ampean Medang dan Batu Putih.

Untuk menunjang kegiatan pembinaan tersebut pada tahun 2014 dilaksanakan kegiatan pelatihan Penilaian Usaha Perkebunan di Yogyakarta dan ditunjang pula pelaksanaan Pelatihan dasar AMDAL di Yogyakarta.

Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 215.000.000 (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah), realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 105.185.350,- (Seratus Lima Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah dengan capaian kinerja sebesar Rp. 48,92% sehingga

dapat diartikan pelaksanaan kegiatan kurang berhasil dilaksanakan, dan menyisakan anggaran sebesar Rp. 109.814.650,-. (Seratus Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

Adanya sisa anggaran sebesar Rp. 109.814.650,- disebabkan karena Pelatihan Kelembagaan Pembentukan GAPOKTAN di Kampung Tumbit Dayak dan Tumbit Melayu tidak dapat dilaksanakan karena sesuai pengarahannya dari Inspektorat Kabupaten Berau bahwa biaya transportasi dan akomodasi bagi instruktur dan panitia PNS tidak dapat dicairkan karena telah tercover dalam rekening perjalanan dinas dalam daerah.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
15	Terwujudnya kesepakatan kerjasama kemitraan antara masyarakat dan Perkebunan Besar Swasta (PBS)	Tersusunnya naskah kesepakatan kerjasama kemitraan	tahun	1	1	87,35

Pencapaian Sasaran 15 :

Terwujudnya kesepakatan kerjasama kemitraan antara masyarakat dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) merupakan sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Berau untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pekebun dengan indikator kinerja tersusunnya naskah kesepakatan kerjasama kemitraan yang tertuang dalam Kegiatan Peningkatan Kemampuan

Lembaga Petani dan Pembinaan Pelaksanaan Kemitraan/Plasma Masyarakat dengan PBS Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemitraan antara masyarakat dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS) bertujuan terwujudnya kesepakatan kerjasama kemitraan antara masyarakat dan PBS dengan tersusunnya naskah kesepakatan kerjasama kemitraan (MoU) dan terbinanya 36 koperasi perkebunan yang dilaksanakan dikampung Dumaring, Bumi Jaya, Batu Putih, Ampean Medang, Suka Muria, Long Ayan dan Punan Malinau. Selain itu dilaksanakan pula Pembinaan Penguatan Kelompok Tani Perkebunan di Kampung Biduk-Biduk, Pantai Harapan dan Tanjung Perepat.

Dengan Pagu dana Rp.241.730.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) realisasi kegiatan mencapai Rp.211.156.900,- (Dua Ratus Sebelas Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan capaian kinerja sebesar 87,35% sehingga dapat diartikan pelaksanaan kegiatan berhasil dilaksanakan dengan baik.

Adanya sisa anggaran sebesar Rp. 30.573.100,- dari kegiatan disebabkan karena sesuai dari pengarahan Inspektorat Kabupaten Berau bahwa Honorarium Tim Pembuat Laporan Kegiatan tidak boleh dicairkan karena Pembuatan Laporan merupakan tanggung jawab dari PPTK Kegiatan. Selain itu terjadi efisiensi biaya ATK, Penggandaan, Biaya Transportasi dan uang Non PNS sehingga menyisakan sisa anggaran setelah mengikuti kegiatan pelatihan di Balitka (Balai Penelitian Kelapa dan Palma lainnya) di Manado, Sulawesi Utara.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
16	Monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan /	Tersusunnya dan terlaksanakannya monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Kegiatan /	Kampung	8	8	74,75

Pencapaian Sasaran 16 :

Tersusunnya dan terlaksanakannya monitoring, evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan tahun anggaran 2012/2013 merupakan Indikator Kinerja dari sasaran dilaksanakannya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan serta informasi capaian kinerja kegiatan pada tahun anggaran 2012/2013 serta menggambarkan hambatan dan permasalahan serta cara pemecahannya. Pada Tahun 2014 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan di 8 kampung yaitu Kampung Teluk Sulaiman, Giring-Giring, Tanjung Perepat, Purnasari Jaya, Labanan Makmur, Labanan Makarti, Melati Jaya dan Suka Muria.

Pagu Anggaran Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada tahun anggran 2014 adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 112.129.600,- (Seratus Dua Belas Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan capaian kinerja sebesar 74,75%, menunjukkan pelaksanaan kegiatan berhasil dilaksanakan dan menyisakan anggaran sebesar Rp. 37.870.400,-

Adanya sisa anggaran kegiatan tersebut disebabkan karena adanya efisiensi anggaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
17	Pembentukan buku data statistik	Tersusunnya buku data statistik komoditi unggulan perkebunan	buku	50	50	85,80

Pencapaian Sasaran 17 :

Buku Statistik Komoditi Unggulan Perkebunan terdiri dari 2 (dua) Semester yang menggambarkan pelaksanaan tugas pokok Dinas Perkebunan Kabupaten Berau yang secara garis besar berisi data tentang hasil-hasil yang dilaksanakan dan dicapai dalam pelaksanaan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Berau pada Semester I dan Semester II tahun 2014.

Data yang disajikan selain data primer dari hasil kegiatan langsung Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Berau, juga menampilkan data hasil survey (Monitoring dan Evaluasi serta Pendataan Data Statistik Perkebunan) oleh Tim, yaitu data yang menggambarkan tentang luasan areal kebun, Produksi, dan Jumlah Tenaga Kerja Pengelola Usaha Perkebunan di 13 Kecamatan di Kabupaten Berau.

Tahun Anggaran 2014 dana untuk Kegiatan Pengolahan data Statistik Perkebunan (Pembuatan Buku Data Statistik Komoditi Unggulan) sebesar Rp. 349.470.000,- direalisasikan sebesar Rp. 299.828.665,- atau 85.80 % dan masih ada sisa dana sebesar Rp. 49.641.335,-

Adapun sisa dana kegiatan disebabkan karena tidak dilaksanakan Pendataan Data Statistik Perkebunan disebabkan karena adanya efisiensi anggaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
18	Meningkatnya penggunaan bibit unggul tanaman perkebunan	Tersedianya bibit unggul tanaman perkebunan dan obat-obatan	Bibit dan obat-obatan	1 tahun	1 tahun	76,86

Pencapaian Sasaran 18 :

Usaha meningkatkan luas area, produksi dan produktifitas komoditi unggulan perkebunan dilaksanakan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dengan memberikan bantuan berupa prasarana dan sarana produksi pertanian/perkebunan berupa bibit komoditi unggulan perkebunan dan sarana penunjangnya berupa pupuk, obat-obatan sebagai motivasi bagi petani/pekebun untuk mencapai sasaran meningkatnya penggunaan bibit unggul tanaman perkebunan dengan indicator kinerja tersedianya bibit unggul tanaman perkebunan dan obat-obatan.

Pemberian bantuan kepada masyarakat pekebun diharapkan dapat mendorong berkembangnya komoditas unggulan perkebunan yang mempunyai daya saing tinggi, yaitu kelapa sawit, karet, lada, kakao dan kelapa dalam, juga untuk mendukung percepatan pembangunan sector perkebunan guna meningkatkan kapasitas dan produktivitas secara keseluruhan sehingga

pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan akan mampu memberikan sumbangan yang nyata terhadap peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani maupun pertumbuhan perekonomian daerah.

Sasaran tersebut terakomodir dalam Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan yang pada tahun anggaran 2014 sasaran kegiatan dititik beratkan pada Kelompok Tani pengelola komoditi karet, lada dan pala. Kelompok Tani yang terpilih sebelumnya telah mengirimkan proposal permohonan bantuan berupa bibit tanaman maupun bahan-bahan kimia yang dikirimkan ke Bupati maupun langsung ke Dinas Perkebunan. Masing-masing kelompok menerima bantuan sesuai jenis komoditi yang dimohonkan, namun tidak semua kelompok tani penerima bantuan mendapatkan sesuai dengan jumlah yang dimohonkan, hal ini disesuaikan dengan ketersediaan dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Berau di Tahun Anggaran 2014.

Pendataan terhadap calon petani dan calon lahan (CP/CL) dilaksanakan dengan tujuan agar bantuan yang diberikan benar-benar dapat ditanam atau dimanfaatkan sesuai dengan permohonan sebelumnya. Pendataan CP/CL dilakukan berkaitan dengan status kepemilikan lahan serta ketersediaan dan kesanggupan para petani calon penerima bantuan.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.516.829.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah), kegiatan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.703.076.476,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam

Rupiah) dengan capaian kinerja sebesar 76,86% yang berarti kegiatan berhasil dilaksanakan.

Inti pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan adalah Penyerahan Bantuan ke Masyarakat melalui anggaran Belanja Barang yang akan diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga, dengan pagu anggaran 2.243.640.000,- realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2. 167.045.600, yang ditujukan untuk:

No.	Kampung	Komoditi	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	
1	Bukit Makmur Jaya, Gapoktan Tunas Mekar Jaya	Bibit Karet Okulasi	10.323 pohon	Lelang Paket I dengan nilai kontrak Rp. 245.500.600,-
2	Tabalar Ulu	Bibit Karet Okulasi	10.000 pohon	
3	Merasa	Bibit Karet Okulasi	10.000 pohon	Lelang Paket II dengan nilai kontrak Rp. 415.290.000,-
4	Tumbit Dayak, KT. Mapedeceng	Bibit Karet Okulasi	12.722 pohon	
5	Long Lanuk	Bibit Karet Okulasi	10.000 pohon	
6	Bukit Makmur, KT. Harapan Maju I	Bibit Karet Okulasi	10.000 pohon	Lelang Paket III dengan nilai kontrak Rp. 243.576.000,-
7	Pandan Sari	Bibit Karet Okulasi	10.000 pohon	
8	Gunung Tabur RT. 09	Bibit Karet Okulasi	10.000 pohon	
9	Karangan, KT. Tunas Muda	Bibit Lada	10.000 pohon	
10	Tasuk	Bibit Lada	10.000 pohon	
11	Siduung Indah KT. Nengayatna	Bibit Lada	10.000 pohon	
12	Tanjung Perepat	Bibit Pala	1000 pohon	

Selain memberikan bantuan bibit tanaman pekebunan, untuk menjaga dan meningkatkan produksi hasil komoditi perkebunan, maka Dinas

Perkebunan Kabupaten Berau memberikan bantuan pupuk untuk meningkatkan produktivitas komoditi perkebunan yang telah dikembangkan dan obat-obatan atau bahan kimia untuk menanggulangi serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman perkebunan. Bantaun Pupuk dan Obat-Obatan yang diberikan kepada masyarakat pekebun di Kabupaten Berau pada Tahun Anggaran 2014 terdiri dari:

No.	Kampung	Jenis Bantuan	Jumlah
1	Teluk Sumbang	Herbisida Insektisida Handspreyer	50 lliter 50 liter 20 Unit
2	Long Beliu	Pupuk NPK Herbisida Handspreyer	3.000 kg 100 liter 15 unit
3	Sidobangen, KT. Sumber Pangan	Pupuk NPK Handspreyer	14.450 kg 33 unit
4	Merasa	Pupuk NPK Herbisida	1.500 kg 150 liter
5	Tummbit Melatu, KT. Maju Bersama	Pupuk NPK Herbisida Insektisida	14.100 kg 326 liter 250 liter
6	Kebun Dinas Kamp. Tumbit Melayu	Pupuk Kandang	4.000 kg
7	Tanjung Perepat, KT. Batu Sempit	Pupuk Hayati Herbisida Insektisida Handspreyer	400 liter 200 liter 100 liter 16 unit
8	Pesayan, KT. Berkah Setia Bersatu	Pupuk Hayati Herbisida Handspreyer	1.200 liter 200 liter 20 unit

Adapun sisa anggaran dari pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan sebesar Rp. 813.752.524,- disebabkan karena:

- a. Bantuan Bibit Aren untuk Kampung Ampean Medang sebanyak 150 pohon dan Kampung Tanjung Perengat 150 pohon batal dilaksanakan

karena berdasarkan data lapangan tidak layak untuk diberikan bantuan (komoditi tidak ada).

- b. Pengadaan Pupuk Hayati sebanyak 650 liter, Herbisida sebanyak 370 liter, Insektisida sebanyak 160 liter dan Handspreyer sebanyak 20 unit untuk Kelompok Tani Harapan Baru, Kampung Teluk Semanting tidak dapat dilaksanakan.
- c. Sisa Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah, Sewa Sarana Mobilitas serta efisiensi anggaran belanja barang dan jasa.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
19	Penggunaan bahan tanaman unggulan perkebunan	Meningkatnya pemahaman tentang bahan tanaman unggulan perkebunan	kampung	5	5	74,54

Pencapaian Sasaran 19 :

Pembentukan kawasan sentra produksi unggulan daerah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pekebun untuk penggunaan bahan tanaman unggul perkebunan dengan indicator kinerja meningkatnya pemahaman tentang bahan tanaman unggul perkebunan melalui Kegiatan Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan penggunaan bibit bersertifikat yang bertujuan agar masyarakat pekebun tidak membeli bibit secara illegal yang nantinya akan merugikan masyarakat pekebun sendiri.

Pada tahun anggaran 2014, inti kegiatan adalah sosialisasi / bimbingan ke Kelompok Tani penggunaan bibit sawit berserifikat di lima kampung, yaitu Kampung Merasa, Kampung Harapan Jaya, Kampung Punan Malinau, Kampung Labanan Makmur dan Kampung Tanjung Batu. Selain itu juga dilaksanakan pengadaan bibit aren genjah untuk kebun dinas melalui kode rekening belanja modal.

Dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 257.160.000,- realisasi kegiatan sebesar Rp. 191.683.650,- dengan capaian kinerja 74,54% yang berarti pelaksanaan kegiatan berhasil dilaksanakan.

Capaian kegiatan sebesar 74,54% disebabkan karena:

- a. Adanya kendala dalam hal pengadaan bibit aren genjah untuk kebun dinas disebabkan tidak ada penyedia yang sanggup menyediakan bibitnya, sehingga tidak dapat dilaksanakan.
- b. PPTK Kegiatan dalam hal ini Kasi Bahan Tanaman mengundurkan diri pada bulan Juni 2014, sehingga honorarium PPTK hanya diampurkan selama 10 bulan, dan dilanjutkan PPTK yang lain.
- c. Selain itu belanja cetak laporan dan panduan teknis kegiatan tidak dilaksanakan sehingga honorarium pembuatan laporan dan panduan teknis kegiatanpun tidak dapat dilaksanakan.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
20	Tertibnya pelaksanaan perijinan Usaha Perkebunan Besar di Kabupaten Berau	Terkendalnya Perijinan Usaha Perkebunan Besar	PBS	15	15	86,57

Pencapaian Sasaran 20 :

Untuk Tertibnya pelaksanaan perijinan Usaha Perkebunan Besar di Kabupaten Berau dengan Indikator kinerja Terkendalnya Perijinan Usaha Perkebunan Besar terlaksana melalui Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Besar, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

Pagu Anggaran kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Besar pada tahun 2014 sebesar Rp. 300.150.000,- (Tiga Ratus Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan capaian kinerja kegiatan mencapai 86,57 % atau sebesar Rp. 259.832.700,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang berarti kegiatan berhasil dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan Tahun 2014 untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Besar ini diarahkan kepada 15PBS untuk dilakukan pembinaan yang terdiri dari Pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan (Klasifikasi Kebun) di Kampung Batu Putih dan Kampung Long Ayan, dan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Perijinan yaitu :

- a. Kampung Biatan Lempake
- b. Kampung Biatan Bapinang
- c. Kampung Talisayan
- d. Kampung Dumaring
- e. Kampung Batu Putih
- f. Kampung Ampean Medang
- g. Kampung Merapun
- h. Kampung Tanjung Batu
- i. Kampung Batu-Batu
- j. Kampung Gunung Sari
- k. Kampung Long Ayan
- l. Kampung Long Beliu
- m. Kampung Muara Lesan dan
- n. Kampung Punan Malinau

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
21	Sinkronisasi pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur	Terlaksananya musrenbang, rapat koordinasi perkebunan	tahun	1	1	78,52

Pencapaian Sasaran 21 :

Tahun 2014 Kegiatan Konsolidasi Pembangunan Perkebunan dianggarkan dana sebesar Rp. 259.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan

Juta Rupiah) dengan realisasi kegiatan mencapai sebesar Rp. 203.363.750,- dengan capaian kinerja 78,52 %. Berarti pelaksanaan kegiatan berhasil dilaksanakan.

Arah kegiatan Tahun 2014 untuk kegiatan Konsolidasi Pembangunan Perkebunan, yaitu :

1. Mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan se Kalimantan Timur Tahun 2014 yang dilaksanakan di Kota Samarinda
2. Orientasi Lapangan Pengembangan Pembangunan Komoditas Kelapa Dalamdi Manado, Sulawesi Utara ;
3. Musyawarah Rencana Pembangunan di Kecamatan Biduk-Biduk dan Tabalar
4. Mengikuti Kegiatan PENAS di Kabupaten Malang, Jawa Timur ;
5. Konfirmasi dan Koordinasi ke Pengembangan Perencanaan Perkebunan di Samarinda;
6. Konsolidasi Perencanaan Pengembangan Perkebunan di Samarinda;
7. Penjajakan dalam rangka kerjasama pemetaan satelit terhadap komoditas perkebunan di Jakarta.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
22	Tersusunnya data komoditi unggulan perkebunan	Terlaksananya pendataan komoditi unggulan perkebunan Kab. Berau	1 tahun	100%	96,99%	96,99

Pencapaian Sasaran 22 :

Sasaran Tersusunnya data Komoditi Unggulan Perkebunan dengan indikator kinerja Terlaksananya pendataan komoditi unggulan perkebunan Kabupaten Berau merupakan sasaran yang tertuang dalam Kegiatan baru pada tahun anggaran 2014 yaitu Penyusunan Database Komoditi Unggulan Perkebunan Program Pengembangan Perencanaan Perkebunan.

Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan realisasi kegiatan sebesar Rp. 242.463.400,- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) atau capaian kinerja mencapai 96,99% yang berarti pelaksanaan kegiatan berhasil dengan baik.

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Database Komoditi Unggulan Perkebunan pada tahun anggaran 2014 dititik beratkan untuk membuat database perkebunan pada komoditi Kakao melalui kegiatan Lelang Jasa Konsultasi. Tujuan Kegiatan adalah untuk memperoleh gambaran kondisi potensi pada wilayah sentra produksi Kakao diwilayah Kabupaten Berau mengenai Kondisi Kebun yang ada menyangkut populasi tanaman per hektar

dan luas serta potensi perluasan pengembangannya, sumber daya manusia, social ekonomi dan budaya serta aksesibilitas wilayah.

Study Kelayakan dari Kegiatan Penyusunan Database Komoditi Unggulan Perkebunan Program Pengembangan Perencanaan Perkebunan adalah untuk mendapatkan gambaran faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan usaha perkebunan Kakao sebagai database atau dasar untuk penetapan wilayah-wilayah sentra produksi Kakao yang berpotensi tinggi.

Adapun ruang lingkup dan sasaran kegiatan meliputi 5 Kecamatan yang merupakan sentra komoditi kakao, yaitu:

1. Kecamatan Gunung Tabur : Kampung Maluang dan Kampung Gunung Tabur
2. Kecamatan Teluk Bayur : Kampung Tumbit Melayu
3. Kecamatan Sambaliung : Kampung Tumbit Dayak, Kampung Long Lanuk, dan Kampung Suaran
4. Kecamatan Segah : Kampung Tepian Buah, Kampung Punan Malinau dan Kampung Batu Rajang
5. Kecamatan Kelay : Kampung Merasa

3. Aspek Keuangan

Tahun Anggaran 2014, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) mendapat Alokasi Dana sebesar Rp. 16.649.630.000,- dengan rinciannya, terdiri dari :

1. Belanja Tak Langsung	=	Rp.	4.642.841.000,00
- Belanja Pegawai	=	Rp.	4.642.841.000,00
2. Belanja Langsung	=	Rp.	12.006.789.000,00
- Belanja Pegawai	=	Rp.	1.039.430.000,00
- Belanja Barang dan Jasa	=	Rp.	10.801.204.000,00
- Belanja Modal	=	Rp.	166.155.000,00
Total (1+2)	=	Rp.	16.649.630.000,00

Sampai Tanggal 31 Desember 2014 Pagu Dana sebesar Rp.16.649.630.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 13.408.454.935,00 atau 80,53 %. Sehingga ada sisa dana yang disetorkan ke Kas Daerah melalui Dinas PPKK Kabupaten Berau sebesar Rp. 3.241.175.065,00- atau 19,47%.

Adapun rincian Penggunaan Alokasi Dana tersebut, dapat dilihat pada Tabel 9 Dan Tabel 10 Sebagai berikut :

TABEL 9
BELANJA TIDAK LANGSUNG DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKEN ING	URAIAN	ANGGARAN (DPPA-SKPD) (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	SISA ANGGARAN (DPPA-SKPD) (Rp)
5.1.1	BELANJA PEGAWAI				
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.940.641.000,00	2.590.585.663,00	88,09	350.055.337,00
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1.702.200.000,00	1.449.375.000,00	85,15	252.825.000,00
TOTAL		4.642.841.000,00	4.039.960.663,00		

Sumber Data : Subbagian Keuangan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

TABEL 10
BELANJA LANGSUNG DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (DPPA-SKPD) (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	SISA ANGGARAN (DPPA- SKPD) (Rp)
I	PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000	1,500,000	100.00	0
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA, dan Listrik	120,700,000	112,320,338	93.06	8,379,662
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	202,700,000	124,149,650	61.25	78,550,350
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	191,370,000	171,560,000	89.65	19,810,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	43,400,000	43,160,000	99.45	240,000
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20,000,000	17,935,000	89.68	2,065,000
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	32,000,000	32,000,000	100.00	0
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,000,000	19,979,000	99.90	21,000
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	9,997,850	99.98	2,150
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129,855,000	116,343,000	89.59	13,512,000
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	7,200,000	4,200,000	58.33	3,000,000
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	29,000,000	28,707,200	98.99	292,800
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	300,000,000	276,748,362	92.25	23,251,638
14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	250,000,000	218,069,950	87.23	31,930,050
15	Penyediaan Jasa Administrasi /Teknis Perkantoran	60,600,000	60,600,000	100.00	0
JUMLAH (I)		1,418,325,000	1,237,270,350	87.23	181,054,650

II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	74,800,000	74,692,000	99.86	108,000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleir	5,000,000	5,000,000	100	0
JUMLAH (II)		79,800,000	79,692,000	99.86	108,000
III	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	160,000,000	107,868,100	67.42	52,131,900
2	Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP)	150,000,000	90,578,200	60.39	59,421,800
JUMLAH (III)		310,000,000	198,446,300	64.01	111,553,700
IV	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,000,000	5,000,000	100.00	0
2	Sosialisasi Kinerja Program SKPD	25,000,000	23,560,000	94.24	1,440,000
JUMLAH (IV)		30,000,000	28,560,000	95.20	1,440,000
V	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI				
1	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	300,000,000	98,124,750	32.71	201,875,250
2	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan Pembinaan Pelaksanaan Kemitraan/Plasma Masyarakat dengan PBS	241,730,000	211,156,900	87.35	30,573,100
3	Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi Petani/Kelompok Tani	215,000,000	105,185,350	48.92	109,814,650
4	Konservasi Lahan dengan Komoditas Perkebunan	972,700,000	883,198,450	90.80	89,501,550
JUMLAH (V)		1,729,430,000	1,297,665,450	75.03	431,764,550

VI	PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN				
1	Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	157,500,000	139,795,300	88.76	17,704,700
2	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	100,000,000	86,977,900	86.98	13,022,100
3	Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat	164,000,000	138,907,000	84.70	25,093,000
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	150,000,000	112,129,600	74.75	37,870,400
5	Pendampingan Pekebun dan Pelaku Agribisnis (Penas)	250,000,000	220,686,300		
JUMLAH (VI)		821,500,000	698,496,100	85.03	123,003,900
VII	PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/ PERKEBUNAN				
1	Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna	1,081,685,000	793,252,530	73.33	288,432,470
2	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna	151,340,000	119,739,801	79.12	31,600,199
3	Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam	216,100,000	144,681,300	66.95	71,418,700
4	Pengembangan Pengetahuan Sarana dan Prasarana Perlindungan Petani Perkebunan	150,000,000	132,629,775	88.42	17,370,225
5	Sekolah Lapang Penerapan Teknologi Budidaya Tepat Guna	500,000,000	430,170,100	86.03	69,829,900
JUMLAH (VII)		2,099,125,000	1,620,473,506	77.20	478,651,494

VIII	PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN				
1	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	3,516,829,000	2,703,076,476	76.86	813,752,524
2	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	200,000,000	94,627,900	47.31	105,372,100
3	Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	257,160,000	191,683,650	74.54	65,476,350
4	Pengolahan Data Statistik Perkebunan (Pembuatan Buku Data Statistik Komoditi Unggulan Produksi Pertanian/Perkebunan	349,470,000	299,828,665	85.80	49,641,335
5	Pengendalian dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	386,000,000	213,014,025	55.18	172,985,975
6	Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Besar	300,150,000	259,832,700	86.57	40,317,300
JUMLAH (VIII)		5,009,609,000	3,762,063,416	75.10	1,247,545,584
IX	PENGEMBANGAN PERENCANAAN PERKEBUNAN				
1	Konsolidasi Pembangunan Perkebunan	259,000,000	203,363,750	78.52	55,636,250
2	Penyusunan Database Komoditi Unggulan Perkebunan	250,000,000	242,463,400	96.99	7,536,600
JUMLAH (IX)		509,000,000	445,827,150	87.59	63,172,850
TOTAL (I S/D IX)		12,006,789,000	9,368,494,272	78.03	2,638,294,728
Sumber Data : Subbagian Keuangan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau					

4. Analisis Akuntabilitas Kinerja SKPD Dinas Perkebunan

Memperhatikan Hasil Evaluasi Kinerja SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2014, yaitu DPPA-SKPD untuk Belanja Tidak Langsung berupa Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Berau tersedia Dana sebesar Rp.4.642.841.000,- dengan tingkat Prosentase Capaian Kinerja 88,09%. Kemudian untuk Belanja Langsung Dinas Perkebunan dengan 9 (Sembilan) Program dan 43 (Empat puluh tiga) kegiatan disediakan dana sebesar Rp.12.006.789.000,- dengan prosentase Capaian Kinerja mencapai hanya 78,03 %.

Hasil Evaluasi Kinerja SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2014 untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung total mencapai Rp. 16.649.630.000,- dengan realisasi Capaian Kinerja sebesar Rp. 13.408.454.935,- atau 80,53 %.

Jika kita memperhatikan Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD Dinas Perkebunan Tahun 2014 dari 22 Sasaran dan 22 Indikator Kinerja. Maka, tidak semua sasaran yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2014 dapat dilaksanakan dengan baik, adanya kendala atau permasalahan tersebut dapat diketahui sebagaimana penjelasan yang tertuang dalam analisa capaian kinerja indicator.

Namun secara umum dimana 9 Program dan 43 Kegiatan tersebut, berdasarkan Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, bahwa ada beberapa faktor penghambatnya, yaitu :

1. Adanya kelemahan dibidang Administrasi pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga berpengaruh pada Kinerja SKPD Dinas Perkebunan dalam mengoperasionalkannya;
2. Kurangnya SDM yang dimiliki SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Berau yang dapat berdampak pada operasional Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Berau ;
3. Belum paduserasinya memahami peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga berdampak lemahnya pencapaian Kinerja;
4. Belum seluruhnya personil Dinas Perkebunan Kabupaten Berau mampu mendukung Kinerja SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Berau sehingga setiap Indikator Kinerja belum mampu diserap 100 %;
5. Pelaksanaan beberapa kegiatan yang direncanakan dan telah diestimasi oleh PPTK, namun tidak dapat dilaksanakan, karena tidak sesuai dengan peraturan-peraturan Teknis dan Persyaratan Administrasi keuangan yang tertuang dalam ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sebagaimana arahan dari Inspektorat Kabupaten Berau, sehingga pelaksanaan kegiatan pelatihan yang

diselenggarakan Dinas Perkebunan tahun 2014 tidak dapat dilaksanakan.

6. Penerapan aturan-aturan yang berhubungan dengan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah antara Tim Inspektorat dengan Dinas PPKK Kabupaten Berau belum paduserasi sehingga berakibat sulitnya menyelesaikan permasalahan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, misalnya masalah SPJ dan Administrasi lainnya; Berdasarkan point 1 s/d 6 inilah yang merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014, sehingga mempengaruhi Kinerja SKPD Dinas Perkebunan.

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut, maka perlu dilakukan pemecahan persoalan sehingga kedepan tidak ada lagi faktor-faktor penghambat tersebut. Diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi kelemahan dibidang Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan langkah-langkah awal agar tidak terjadi kesalahan, yaitu melakukan Bimbingan Teknis tentang Sistem Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik dan benar, kemudian selalu melakukan Koordinasi dengan Dinas PPKK selaku Pelaksanan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Atau melakukan Konsultasi denga Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah atau dengan BPK. Sehingga dapat memecahkan permasalahan kelemahan tersebut, khususnya dibidang Administrasi;

2. Kekurangan SDM terhadap SKPD Dinas Perkebunan perlu didukung oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan cara menempatkan personil, sesuai dengan kebutuhan SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, sesuai dengan keahlian yang diperlukan;
3. Karena tidak didukung oleh personil Dinas Perkebunan Kabupaten Berau tersebut, maka jalan pemecahannya dilakukan pendekatan-pendekatan atau diadakan Koordinasi Teknis yang membahas masalah-masalah perlunya dukungan dari personil SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, sehingga hambatan dapat dihilangkan. dengan malakukan rapat-rapat staf;
4. Mengenai belum paduserasinya memahami Peraturan-Peraturan tentang Sistem Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah, maka perlu malakukan Konsultasi Teknis dibidang yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, atau perlu mengikuti sosialisasi Peraturan-peraturan Teknis Keuangan Daerah atau yang lainnya;
5. Adapun agar tidak melanggar Peraturan-Peraturan atau Syarat Teknis Administrasi tersebut, sebaiknya lebih banyak memahami Peraturan-peraturan, atau perlu berkonsultasi dengan Tim Pemeriksa yaitu Inspektorat Daerah maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

6. Apabila Peraturan yang diterapkan /dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Darah berbeda dengan Peraturan/ Surat Edaran dari Dinas PPKK yang ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah untuk di pedomani, maka jalan yang dilakukan adalah melakukan Konsultasi Teknis ;

BAB IV

P E N U T U P

Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Berau ini disusun masih mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP Tahun 2014 ini masih belum sepenuhnya sempurna, hal ini tercermin dari Kondisi sebagai berikut :

1. Beberapa Indikator baik input, proses, output maupun benefit masih belum mempunyai Standar Baku. Untuk selanjutnya standar ini perlu disempurnakan untuk setiap tahunnya oleh Bagian Ortal Setda Kabupaten Berau, kemudian disosialisasikan ke SKPD-SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Berau untuk mengikutinya :
2. Belum ada Benchmarking yang jelas untuk kegiatan – kegiatan yang bisa di bandingkan dengan Instansi sejenis di Pemerintah Kabupaten Berau. Hal ini akan terbaiki di masa-masa yang akan datang dengan

- cara study banding dengan instansi Pemerintah lain yang sejenis, sehingga menghasilkan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan;
3. Beberapa Elemen Indikator masih dalam bentuk Prosentase, sehingga belum begitu akurat hasil pengukurannya. Untuk Tahun depan direncanakan menggunakan perhitungan-perhitungan dengan cara perhitungan tersebut diperoleh dari Bagian Ortal Setda Kabupaten Berau yang disosialisasikan dengan SKPD-SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau;
 4. Beberapa Elemen Indikator Input seperti SDM, Sarana dan Prasarana masih belum terinci dengan jelas, sehingga masih belum informatif bagi yang membacanya. Untuk yang akan datang hal ini hendaknya dijadikan perhatian;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Perkebunan Kabupaten Berau ini diharapkan dapat memacu Pelaksanaan CLEAN GOVERNMENT dalam rangka mewujudkan GOOD GOVERNMENT, sehingga kedepan akan terwujud sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan atau Akuntabel secara transparansi, kemudian menjadi umpan balik bagi Stake Holder.

Akhirnya berkat kerja keras serta dukungan penuh oleh Bidang-bidang dan terlebih lagi dukungan Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) terhadap Subbagian Penyusunan Program, maka Laporan Akuntabilitas KINerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

ini dapat disusun sekalipun agak terlambat dari batas waktu yang telah ditetapkan oleh Bagian Ortal Setda Kabupaten Berau, dengan harapan dapat dipergunakan sebagai bentuk Transparansi terhadap masyarakat. Terima Kasih.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran IB/5-5

PENETAPAN KINERJA

DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2015

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Perkebunan

Tahun Anggaran : 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1. Terwujudnya Kesejahteraan Petani dan Pelaku Agribisnis	1. Terlatihnya petani dan pelaku agribisnis dalam meningkatkan kesejahteraan petani	6 Kampung	Peningkatan Kesejahteraan Petani/Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	350.000.000
2. Terwujudnya kesepakatan kerjasama kemitraan antara masyarakat dan Perkebunan Besar Swasta (PBS)	2. Tersusunnya naskah kesepakatan kerjasama kemitraan	60 %	Peningkatan Kesejahteraan Petani/Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan Pelaksanaan Kemitraan/ Plasma Masyarakat dengan PBS	200.000.000
3. Terbentuknya beberapa Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)	3. Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani/koperasi	40%	Peningkatan Kesejahteraan Petani/Peningkatan system Insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani	235.000.000
4. Meningkatnya Produktivitas Lahan Petani Non Produktif	4. Terealisasinya Penanaman Lahan Petani Non Produktif	1 Kec. 3 Kampung	Peningkatan Kesejahteraan Petani / Konservasi Lahan dengan Komoditas Perkebunan	600.000.000
5. Meningkatnya harga pasar komoditi perkebunan	5. Terciptanya mutu produksi komoditi perkebunan sesuai pangsa pasar	1 tahun	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan/ Penelitian dan Pengembangan	175.000.000

			Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	
6. Lebih dikenalnya produk unggulan perkebunan daerah	6. Terpromosinya produk unggulan perkebunan daerah	100 %	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan / Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	150.000.000
7. Meningkatnya pengembangan usaha produksi sesuai permintaan pasar	7. Tersebar luasnya data informasi harga pasar komoditi perkebunan	1 tahun	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan / Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil pertanian/perkebunan masyarakat	200.000.000
8. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2014	8. Tersusunnya dan terlaksanakannya monitoring, evaluasi, dan pelaporan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2014	1 tahun	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan/ MONEV Tahun 2014	100.000.000
9. Meningkatnya mutu hasil olahan komoditas perkebunan dan tertibnya penggunaan alat berat bagi PBS dalam pembangunan perkebunan Besar	9. Tersedianya dan dimanfaatkannya sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna berupa alat dan mesin pengolahan hasil perkebunan serta terlaksanakannya pembinaan penggunaan alat berat bagi PBS dan pembangunan perkebunan	1 tahun	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan/ Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	986.500.000

10. Terbangunnya kebun demplot budidaya tanaman	10. Terlaksananya demplot pemupukan tanaman perkebunan	2 lokasi demplot	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan/ Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan tepat guna	160.000.000
11. Terlatihnya Petani Karet dan Kakao	11. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan karet dan Kakao	75 Orang	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan/ Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam	160.000.000
12. Meningkatnya pengetahuan petani dalam penguasaan teknologi sarana dan prasarana perlindungan perkebunan	12. Peningkatan penguasaan teknologi sarana dan prasarana perlindungan perkebunan	100 %	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan/ Pengembangan Pengetahuan Sarana dan Prasarana Perlindungan Petani Perkebunan	160.000.000
13. Meningkatnya jumlah petani yang menguasai teknologi tepat guna kakao dan lada	13. Petani menguasai teknologi budidaya tepat guna kakao dan lada	125 Orang	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan/ Sekolah Lapang Penerapan Teknologi Budidaya Tepat Guna (SL-PHT)	500.000.000
14. Meningkatnya penggunaan bibit unggul tanaman perkebunan	14. Tersedianya bibit unggul tanaman perkebunan, pupuk dan obat-obatan	1 tahun	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan / Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	3.400.000.000
15. Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petani Lada, kakao dan karet	15. Terlatihnya petani perkebunan lada, kakao dan karet	3 lokasi	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan / Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	200.000.000

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

16. Penggunaan bahan tanaman unggulan perkebunan	16.Meningkatnya Pemahaman tentang bahan tanaman unggulan perkebunan	1 tahun	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/ Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	200.000.000
17. Pembuatan buku data statistic perkebunan	17.Tersusunnya Buku Data Statistik komoditi unggulan perkebunan	50 buku	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/ Pengolahan Data Statistik Perkebunan (Pembuatan Buku Data Statistik Komoditi Unggulan)	150.000.000
18. Pengendalian serangan OPT pada tanaman perkebunan	18. Terkendalnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman	60 Petani	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/ Pengendalian dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	250.000.000
19. Tertibnya Perijinan Usaha Perkebunan Besar (PBS) di Kabupaten Berau	19.Terkendalnya Perijinan Usaha Perkebunan Besar (PBS)	23 PBS	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/ Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Besar	250.000.000
20. Sinkronisasi Pembangunan Perkebunan di Kalimantan Timur	20.Terlaksananya musrenbang, rapat koordinasi perkebunan	1 tahun	Pengembangan Perencanaan Perkebunan/ Konsolidasi Pembangunan Perkebunan	150.000.000
21.Tersusunnya data komoditi unggulan perkebunan	21.Terlaksananya pendataan komoditi unggulan perkebunan Kabupaten Berau	1 tahun	Pengembangan Perencanaan Perkebunan/ Penyusunan Data base Komoditi Unggulan Perkebunan	250.600.000

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

Jumlah Anggaran	Rp. 9.999.100.000,-
Program : 9	

Menyetujui :
Bupati Berau,

Tanjung Redeb, 20 Januari 2015
Kepala Dinas Perkebunan

Drs.H.Makmur, HAPK,MM

Drs.Basri Sahrin
NIP. 19581003 198203 1 006

Lampiran II/2-3

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2014

DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BERAU

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Terwujudnya Kesejahteraan Petani dan Pelaku Agribisnis	1. Terlatihnya petani dan pelaku agribisnis dalam meningkatkan kesejahteraan petani	5 kampung
2. Terwujudnya kesepakatan kerjasama kemitraan antara masyarakat dan Perkebunan Besar Swasta (PBS)	2. Tersusunnya naskah kesepakatan kerjasama kemitraan	10 kampung
3. Terbentuknya beberapa Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)	3. Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani/koperasi	2 kampung
4. Meningkatnya Produktivitas Lahan Petani Non Produktif	4. Terealisasinya Penanaman Lahan Petani Non Produktif	2 kampung
5. Meningkatnya harga pasar komoditi perkebunan	5. Terciptanya mutu produksi komoditi perkebunan sesuai pangsa pasar	7 kampung
6. Lebih dikenalnya produk unggulan perkebunan daerah	6. Terpromosinya produk unggulan perkebunan daerah	1 tahun
7. Meningkatnya pengembangan usaha produksi sesuai permintaan pasar	7. Tersebar luasnya data informasi harga pasar komoditi perkebunan	1 tahun
8. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2014	8. Tersusunnya dan terlaksanakannya monitoring, evaluasi, dan pelaporan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2014	8 kampung
9. Terjalinnnya hubungan kemitraan dan informasi teknologi bagi petani	9. Terlaksananya kegiatan PENAS	11 petani

10. Meningkatnya mutu hasil olahan komoditas perkebunan dan tertibnya penggunaan alat berat bagi PBS dalam pembangunan perkebunan Besar	10. Tersedianya dan dimanfaatkannya sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna berupa alat dan mesin pengolahan hasil perkebunan serta terlaksanakannya pembinaan penggunaan alat berat bagi PBS dan pembangunan perkebunan	100%
11. Terbangunnya kebun demplot budidaya tanaman	11. Terlaksananya demplot pemupukan tanaman perkebunan	1,5 Ha
12. Terlatihnya Petani Karet dan Kakao	12. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan karet dan Kakao	75 orang
13. Meningkatnya pengetahuan petani dalam penguasaan teknologi sarana dan prasarana perlindungan perkebunan	13. Peningkatan penguasaan teknologi sarana dan prasarana perlindungan perkebunan	11 kampung
14. Meningkatnya jumlah petani yang menguasai teknologi tepat guna kakao dan lada	14. Petani menguasai teknologi budidaya tepat guna kakao dan lada	150 orang
15. Meningkatnya penggunaan bibit unggul tanaman perkebunan	15. Tersedianya bibit unggul tanaman perkebunan, pupuk dan obat-obatan	100%
16. Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petani Lada, kakao dan karet	16. Terlatihnya petani perkebunan lada, kakao dan karet	75 orang
17. Penggunaan bahan tanaman unggulan perkebunan	17. Meningkatnya Pemahaman tentang bahan tanaman unggulan perkebunan	5 kampung
18. Pembuatan buku data statistic perkebunan	18. Tersusunnya Buku Data Statistik komoditi unggulan perkebunan	50 buku
19. Pengendalian serangan OPT pada tanaman perkebunan	19. Terkendalinya serangan Organisme Pengganggu Tanaman	100%
20. Tertibnya Perijinan Usaha Perkebunan Besar (PBS) di Kabupaten Berau	20. Terkendalinya Perijinan Usaha Perkebunan Besar (PBS)	15 PBS
21. Sinkronisasi Pembangunan Perkebunan di Kalimantan Timur	21. Terlaksananya musrenbang, rapat koordinasi perkebunan	100 %

- | | | |
|---|--|------|
| 22. Tersusunnya data komoditi unggulan perkebunan | 22. Terlaksananya pendataan komoditi unggulan perkebunan Kabupaten Berau | 100% |
|---|--|------|

Tanjung Redeb, 20 Januari 2015

Kepala Dinas Perkebunan

Drs. Basri Sahrin

NIP. 19581003 198203 1 006

Lampiran II 1/5-5

PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2014

Provinsi/Kabupaten : Berau

Nama SKPD : Dinas Perkebunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1. Terwujudnya Kesejahteraan Petani dan Pelaku Agribisnis	1. Terlatihnya petani dan pelaku agribisnis dalam meningkatkan kesejahteraan petani	5 kampung	-	32,71
2. Terwujudnya kesepakatan kerjasama kemitraan antara masyarakat dan Perkebunan Besar Swasta (PBS	2. Tersusunnya naskah kesepakatan kerjasama kemitraan	10 kampung	10 kampung	87,35
3. Terbentuknya beberapa Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)	3. Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani/koperasi	2 kampung	-	48,92
4. Meningkatnya Produktivitas Lahan Petani Non Produktif	4. Terealisasinya Penanaman Lahan Petani Non Produktif	2 kampung	2 kampung	90,80
5. Meningkatnya harga pasar komoditi perkebunan	5. Terciptanya mutu produksi komoditi perkebunan sesuai pangsa pasar	7 kampung	7 kampung	88,76
6. Lebih dikenalnya produk unggulan perkebunan daerah	6. Terpromosinya produk unggulan perkebunan daerah	1 tahun	1 tahun	86,98
7. Meningkatnya pengembangan usaha produksi sesuai permintaan pasar	7. Tersebar luasnya data informasi harga pasar komoditi perkebunan	1 tahun	1 tahun	84,70
8. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2014	8. Tersusunnya dan terlaksanakannya monitoring, evaluasi, dan pelaporan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2014	8 kampung	8 kampung	74,75

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

9. Terjalinnnya hubungan kemitraan dan informasi teknologi bagi petani	9. Terlaksananya kegiatan PENAS	11 petani	11 petani	88,76
10. Meningkatnya mutu hasil olahan komoditas perkebunan dan tertibnya penggunaan alat berat bagi PBS dalam pembangunan perkebunan Besar	10. Tersedianya dan dimanfaatkan sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna berupa alat dan mesin pengolahan hasil perkebunan serta terlaksanakannya pembinaan penggunaan alat berat bagi PBS dan pembangunan perkebunan	100%	73,33%	73,33
11. Terbangunnya kebun demplot budidaya tanaman	11. Terlaksananya demplot pemupukan tanaman perkebunan	1,5 Ha	1,5 Ha	79,12
12. Terlatihnya Petani Karet dan Kakao	12. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan karet dan Kakao	75 Orang	75 Orang	66,95
13. Meningkatnya pengetahuan petani dalam penguasaan teknologi sarana dan prasarana perlindungan perkebunan	13. Peningkatan penguasaan teknologi sarana dan prasarana perlindungan perkebunan	11 kampung	11 kampung	88,42
14. Meningkatnya jumlah petani yang menguasai teknologi tepat guna kakao dan lada	14. Petani menguasai teknologi budidaya tepat guna kakao dan lada	150 Orang	150 Orang	86,03
15. Meningkatnya penggunaan bibit unggul tanaman perkebunan	15. Tersedianya bibit unggul tanaman perkebunan, pupuk dan obat-obatan	100%	76,86%	76,86
16. Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petani Lada, kakao dan karet	16. Terlatihnya petani perkebunan lada, kakao dan karet	75 orang	-	47,31
17. Penggunaan bahan tanaman unggulan perkebunan	17. Meningkatnya Pemahaman tentang bahan tanaman unggulan perkebunan	5 kampung	5 kampung	74,54

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

18. Pembuatan buku data statistic perkebunan	18. Tersusunnya Buku Data Statistik komoditi unggulan perkebunan	50 buku	50 buku	85,80
19. Pengendalian serangan OPT pada tanaman perkebunan	19. Terkendalinya serangan Organisme Pengganggu Tanaman	90 orang	-	55,18
20. Tertibnya Perijinan Usaha Perkebunan Besar (PBS) di Kabupaten Berau	20. Terkendalinya Perijinan Usaha Perkebunan Besar (PBS)	15 PBS	15 PBS	86,57
21. Sinkronisasi Pembangunan Perkebunan di Kalimantan Timur	21. Terlaksananya musrenbang, rapat koordinasi perkebunan	1 tahun	1 tahun	78,52
22. Tersusunnya data komoditi unggulan perkebunan	22. Terlaksananya pendataan komoditi unggulan perkebunan Kabupaten Berau	1 tahun	1 tahun	96,69

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 **Rp. 16.649.630.000,-**

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014 **Rp. 13.408.454.935,-**

Tanjung Redeb, 20 Januari 2014

Kepala Dinas Perkebunan

Drs. Basri Sahrin
NIP. 19581003 198203 1 006

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dalam pelaksanaan peran Dinas Perkebunan sebagai koordinator pelaksanaan teknis pada pembangunan subsektor perkebunan, setiap potensi baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam sebagai pendukung utama subsektor perkebunan perlu ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas terutama dalam hal penerapan teknologi terhadap teknis perkebunan. . Di samping itu, Dinas Perkebunan terus melakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dengan anggaran yang ditujukan untuk pembangunan subsektor perkebunan melalui peningkatan sinkronisasi antara sasaran dalam dokumen rencana strategis dengan penganggaran setiap program/kegiatan.

Secara umum, untuk mengetahui setiap permasalahan yang mengiringi proses pembangunan subsektor perkebunan maka perlu dilakukan suatu kajian dan analisis terhadap hambatan, tantangan, hingga isu-isu strategis baik yang memiliki efek positif maupun negatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan. Dari telaahan permasalahan yang telah dikaji dan dianalisis, maka dapat disusun suatu tujuan sasaran pembangunan yang berujung pada perumusan visi dan misi dari Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Berau.

B. Tugas dan Fungsi

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau, yang membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian untuk membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang perkebunan, maka disusunlah Peraturan Bupati Berau Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Berau yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pertanian pada sektor perkebunan. Seiring perjalanan waktu Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 kembali diubah dan digantikan dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Berau. Hal ini dilakukan karena terjadi perubahan struktur pada Dinas Perkebunan Kabupaten Berau. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Produksi, membawahi :
 - 1. Seksi Budidaya dan Bahan Tanaman
 - 2. Seksi Rehabilitasi dan Peremajaan
 - 3. Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan
- d. Bidang Pembinaan dan Pengembanagn Usaha, membawahi :
 - 1. Seksi Bina Usaha
 - 2. Seksi Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran
 - 3. Seksi Pembinaan Kemitraan
- e. Bidang Perlindungan Perkebunan, membawahi :
 - 1. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Sarana Perlindungan Perkebunan
 - 2. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

3. Seksi Dampak Lingkungan dan Pencegahan Kebakaran
- f. Bidang Penyuluhan
1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan
 2. Seksi Ketenagaan Penyuluh
 3. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan
- g. UPTD
1. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD-P2TP) di Rinding
 2. UPTD Pengembangan Bahan Tanaman dan Penanganan Pasca Panen (UPTD-PBTP3) di Tumbit Melayu.

D. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, secara umum menyampaikan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum ber peradaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan Unsur Aparatur Negara yang bertugas sebagai Abdi Masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan pegawai negeri yang profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan, serta bersih KKN. Kelancaran

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan Aparatur Negara khususnya Pegawai Negeri.

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan perkebunan khususnya Sumber daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Berikut ini rekapitulasi data mengenai Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau sapai dengan 31 Desember 2018:

Tabel 1

**SUMBER DAYA APARATUR DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BERAU**

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1		1					1				
Sekretaris		1	1				1					
Kepala Bidang	3		3				1	2				
Kasubbag	1	2		3				2	1			
Kasi	11	5		16				11	3	2		
Staf	17	13		18	11	1	1	9	6	13	1	
Honor	9	3						5	2	4		1
<i>Jumlah</i>	42	24	5	37	11	1	3	30	12	19	1	1

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

E. Aspek Strategis Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dalam perumusan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, Dinas Perkebunan sebagai unsur staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan di bidang perkebunan berdasarkan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, Dinas Perkebunan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerja sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan “GOOD GOVERNANCE”. Dalam lima tahun kedepan, Dinas Perkebunan memprioritaskan pada peningkatan Kapasitas, Kecepatan dan Mutu Pelayanan serta merumuskan Kebijakan dan Koordinasi di bidang Pembangunan Perkebunan. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil program pembangunan perkebunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis Internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang Dinas Perkebunan

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian strategis pembangunan

perkebunan, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh Insan Dinas Perkebunan terus dipacu mengingat produk yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur pelaksanaannya.

Terlaksananya kebijakan teknis pembangunan bidang perkebunan yang dapat mewujudkan pelayanan umum di bidang perkebunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Dinas Perkebunan mampu memberikan pelayanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan, penerapan teknologi, pemasaran hasil produksi dan peningkatan produksi. Dinas Perkebunan akan terus melakukan segala upaya untuk menjamin tidak saja berdaya guna dan berhasil guna bagi penentu kebijakan juga dapat dimanfaatkan oleh Stakeholders.

Dasar utama penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, namun tidak berarti setiap penanganan urusan daerah harus dibentuk dalam suatu organisasi sendiri. Besaran organisasi perangkat daerah harus mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa faktor, yaitu :

1. Kemampuan keuangan daerah ;
2. Kebutuhan daerah dan ketersediaan SDA;
3. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan;
4. Jenis dan banyaknya tugas;

5. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis;
6. Jumlah kepadatan pendudukan, dan;
7. Potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tugas;

Dari cakupan berbagai faktor diatas diharapkan Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah menganut prinsip “Hemat Struktur dan Kaya Fungsi” yang berarti bahwa walaupun Struktur Organisasi Minimal namun secara fungsional dapat melaksanakan tugas secara maksimal.

F. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Isu strategis merupakan permasalahan pokok maupun tantangan yang berkaitan dengan fenomena global baik regional, nasional, maupun internasional baik yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya maupun situasi baru yang muncul akibat perubahan era. Fenomena dalam isu strategis tersebut memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga perlu diantisipasi dan diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan subsektor perkebunan oleh Dinas Perkebunan, meliputi:

1. Pembangunan Sejuta Hektar Kelapa Sawit Tahap Kedua

Dalam isu strategis terkait perluasan areal tanam komoditas kelapa sawit, telah ditetapkan program “pembangunan perkebunan sejuta hektar kelapa

sawit” pada perencanaan pembangunan subsektor perkebunan periode sebelumnya. Pada periode kali ini, sebagai lanjutan periode sebelumnya akan dilaksanakan pembangunan sejuta hektar perkebunan kelapa sawit tahap kedua yang merupakan:

1. Keberlanjutan dari program pembangunan perkebunan sejuta hektar kelapa sawit tahap pertama;
2. Kondisi agroekosistem dimana kondisi geografis Kabupaten Berau sesuai untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit;
3. Mempunyai prospek sangat baik sebagai sumber devisa, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan wilayah bagi pembangunan Kabupaten Berau dimasa mendatang; dan
4. Program yang telah ditetapkan lahan dan perizinannya oleh bupati Kabupaten Berau.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Timur, target program pengembangan dua juta hektar kelapa sawit (sejuta hektar tahap pertama dan sejuta hektar tahap kedua) diproyeksikan dapat direalisasikan pada tahun 2018. Dari hasil Rapat Koordinasi Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 24-25 April 2014 di Samarinda, telah disepakati kontribusi kabupaten Berau untuk mewujudkan pengembangan dua juta hektar kelapa sawit (sejuta hektar tahap kedua) adalah seluas 130.000hektar (PBS 110.000ha dan Perkebunan Rakyat seluas 20.000 ha).

2. Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan

Persepsi negatif mengenai perluasan perkebunan kelapa sawit sebagai penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap perubahan iklim dan pemanasan global, semakin berkembang luas di kalangan masyarakat. Kampanye negatif yang merugikan perencanaan pengembangan perkebunan kelapa sawit kemungkinan akan terus berkembang di dalam usaha perluasan perkebunan kelapa sawit. Hal ini dikarenakan isu ini cukup sensitif terutama bagi pelaku usaha mengingat hasil yang “menggiurkan” bagi yang berhasil mengelola lahan kelapa sawit. Berkenaan dengan hal tersebut, selain melanjutkan kampanye positif bersama seluruh pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri, pemerintah harus terus berupaya menghindari praktek yang dapat mengundang kritik dari berbagai pihak. Perlu adanya rencana aksi untuk mensosialisasikan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit sudah dilaksanakan dengan berkelanjutan sehingga meminimalisir dampak degradasi lingkungan, bahkan dalam program ini terkandung berbagai peluang potensial yang dapat dimanfaatkan bagi masa depan pertanian dan perekonomian Kabupaten Berau dan Indonesia pada umumnya.

Sesuai ciri budidaya tanaman kelapa sawit yang dikenal sebagai pohon industri, kelapa sawit memiliki manfaat besar dan luas bahkan termasuk limbah dan hasil sampingan yang sangat melimpah. Seiring dengan menipisnya cadangan energi fosil, maka limbah dan hasil sampingan tersebut dapat menjadi alternatif sumber energi baru dan terbarukan yang dapat menjadi sumber dan kekuatan andalan masa depan perekonomian bangsa. Limbah dan

hasil sampingan yang dimaksud merupakan bagian dari hasil proses produksi industri kelapa sawit yang sudah ada, terus berlanjut, dan masih terus berkembang. Demikian pula ketersediaan limbah dan hasil sampingan juga akan terus berlanjut dan semakin bertambah pula.

Pada konsep ekonomi hijau, limbah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan sehingga perlu dilakukan pengelolaan limbah agar menjadi ramah lingkungan walaupun memerlukan tambahan biaya. Dalam rangka mendukung ekonomi hijau maka diadakan program dan kegiatan yang dilaksanakan **REDD+**(Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan dan lahan gambut plus)dan **RAD GRK** (Rencana Aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca) bekerjasama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada setiap kegiatan pembangunan perkebunan besar maupun rakyat. Pelaksanaan program ramah lingkungan ini berkepentingan untuk menekan laju pemanasan global dengan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penerapan prinsip **3R** (Reduce, Recycle, dan Reused) dalam setiap proses pembangunan perkebunan menuju ekonomi hijau.

Dalam setiap tahapan pembangunan perkebunan dilaksanakan kegiatan **mitigas**isebagai upaya penurunan emisi dari degradasi hutan dan/atau degradasi lahan.Upaya pencegahan kerusakan lingkungan ini meliputi:

1. Pengendalian Kebakaran Lahan Kebun Rakyat.
2. Konservasi Lahan Komoditas Unggulan

3. Penggunaan pupuk secara berimbang dan pengembangan pembuatan kompos/pupuk organik;
4. Rehabilitasi kebun dan penyesuaian tanaman pelindung bagi komoditi yang membutuhkan; dan
5. Penerapan teknik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP).

Sedangkan upaya yang dilaksanakan untuk menciptakan manfaat tambahan bersamaan dengan peningkatan manfaat dari karbon, dilaksanakan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, peningkatan kelestarian keanekaragaman hayati, dan peningkatan kelestarian produksi jasa ekosistem. Secara aplikatifnya, kegiatan mitigasi meliputi:

1. Pengembangan Teknologi dan Bioteknologi bidang Perkebunan
2. Fasilitasi Biomassa sebagai energy terbarukan
3. Penerapan teknologi budidaya PHT dan penanggulangan dampak anomali iklim yang pada dasarnya dilakukan dengan pendekatan kelestarian lingkungan hidup baik biotik maupun abiotik;
4. Membangun embung-embung/tangkapan air;
5. Mengembangkan teknologi konservasi lahan dan budidaya lorong;
6. Peningkatan produktivitas lahan melalui pemanfaatan BIOCHAR;
7. Kebijakan penggunaan limbah biomasa/cair untuk energi baru terbarukan (POME/Palm Oil Mill Effluent); dan
8. Meng-inclave area bernilai konservasi tinggi (HCV-A) pada usaha perkebunan.

Khusus terhadap pembangunan perkebunan kelapa sawit, Indonesia sejak tahun 2012 menjadi negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia yakni sebesar 44 persen dari produksi minyak nabati dunia dan menggeser Malaysia (41%). Oleh karena itu, sudah menjadi kewajaran jika Negara Indonesia memiliki standar dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan (sustainable) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011. Selain itu, harga minyak dunia (crude oil) yang selalu meningkat juga menjadi topik pembicaraan hangat level internasional bahkan terdapat dugaan mengenai kemungkinan penggunaan minyak kelapa sawit sebagai biofuel.

Beberapa tahun terakhir ini minyak sawit sedang menjadi sorotan dunia termasuk isu-isu yang berkembang di pasar Internasional mengenai permasalahan lingkungan sebagai dampak dari perluasan perkebunan kelapa sawit dimana salah satunya perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang dianggap tidak berkelanjutan dan tidak ramah lingkungan. Bahkan ada yang menuduh bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebelumnya berasal dari kawasan hutan, selain itu banyak pula yang menuding kelapa sawit di Indonesia menyebabkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh berkurangnya penangkapan air ekosistem sekitar dan terlalu banyaknya penggunaan pupuk yang meracuni lingkungan di areal perkebunan. Isu-isu yang berkembang tersebut menjadi tantangan bagi Negara Indonesia pada umumnya dan khususnya Provinsi Kalimantan timur dan terlebih lagi Kabupaten Berau untuk membuktikan bahwa perkebunan kelapa sawit di

Indonesia memiliki sifat yang berkelanjutan dan ramah lingkungan agar produk kelapa sawit Indonesia dapat diterima oleh pasar Internasional.

Beberapa tahun sebelumnya telah terdapat standar pengelolaan kebun dan pengolahan kelapa sawit yang berkelanjutan yakni RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) yang secara sukarela (voluntary) dapat di terapkan di Indonesia. Standar RSPO merupakan standar yang dibuat berdasarkan kesepakatan/roundtable para pemangku kepentingan dalam industri kelapa sawit seperti konsumen, produsen, hingga LSM lingkungan internasional. RSPO menjadi wadah komunikasi para pihak yang berkepentingan untuk menyamakan persepsi tentang konsep berkelanjutan terutama pada pembangunan perkebunan kelapa sawit (sustainability).

Kemudian muncul **ISPO** sebagai inisiatif Pemerintah Negara Indonesia terutama Kementerian Pertanian atas kesadaran/deklarasi bahwa pengelolaan sumber daya alam termasuk perkebunan kelapa sawit harus di lakukan secara berkelanjutan (sustainable). Sertifikasi ISPO bukan untuk mengganti atau menyaingi sertifikasi RSPO yang sebelumnya sudah ada terlebih dahulu karena penerapan ISPO bersifat mandatory (harus/wajib) dalam artian semua ketentuan terkait yang berlaku di Indonesia wajib dipatuhi dan diterapkan oleh seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit bahkan ada ketentuan akan ditindak bagi yang melanggar ISPO.

Adapun tujuan mengembangkan dan menerapkan ISPO bagi pemerintah Indonesia adalah untuk:

1. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya memproduksi minyak sawit yang lestari;
2. Meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global;
3. Mendukung komitmen Indonesia untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK);
4. Mendukung komitmen unilateral Pemerintah Indonesia di Kopenhagen (2009) dan Program Based Line on LOI Indonesia dan Norwegia (2010);
5. Memposisikan pembangunan kelapa sawit sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi Indonesia;
6. Memantapkan sikap dasar bangsa Indonesia untuk memproduksi minyak kelapa sawit berkelanjutan sesuai tuntutan masyarakat global; dan
7. Mendukung komitmen Indonesia dalam pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.

Menteri Pertanian dalam rangka penerbitan standar/pedoman ISPO menyatakan bahwa sebagai amanat konstitusi UUD pasal 33 ayat 3, bahwa perekonomian nasional di selenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, dengan menerapkan ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) secara konsisten, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi industri kelapa sawit, yakni:

1. Meningkatkan posisi tawar produk kelapa sawit di mata pelanggan;
2. Memperbaiki citra perusahaan;

3. Mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem;
4. Meningkatkan mutu produk dan pelayanan;
5. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, masyarakat, serta kesejahteraan sosial;
6. Menciptakan keunggulan comparative; serta
7. Menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis.

3. Hilirisasi Produk Turunan Komoditi Unggulan Perkebunan

Pengembangan usahatani tanaman perkebunan (khususnya tanaman perkebunan rakyat seperti Kakao), pada umumnya masih sebagai usaha monokultur sehingga belum disertai pengembangan cabang usahatani yang sesuai lainnya, baik dari kelompok tanaman perkebunan maupun jenis pertanian yang masuk dalam ruang lingkup kelompok tanaman pangan, hortikultura, maupun ternak. Disatu pihak, dengan usaha monokultur maka tingkat produktivitas usaha budidaya tanaman dapat tercapai sesuai dengan potensi normalnya secara berkelanjutan apabila dilakukan program yang mendukung hilirisasi produk perkebunan. Tanaman kakao merupakan komoditi unggulan perkebunan namun belum bisa meningkatkan taraf hidup dan pendapatan petani dikarenakan nilai jual ditingkat petani masih relative rendah. Sehingga memungkinkan para petani untuk beralih kepada komoditi lain. Hal ini juga akan dapat mengurangi tingkat produktifitas dan pendapatan petani. Guna mendukung program tersebut akan dilakukan kegiatan pembukaan pusat-pusat pengembangan komoditi unggulan yaitu kakao.

Selain pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian, pengentasan kemiskinan di Kabupaten Berau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, hingga pembangunan sarana dan prasarana publik.

Angka kemiskinan di Kabupaten Berau ± 363.887 jiwa (6.38%) dimana sebagian besar berada pada daerah pedesaan, pedalaman, dan daerah tertinggal. Minimnya infrastruktur baik sarana maupun prasarana publik menjadi salah satu penyebab awal dari munculnya kemiskinan di suatu wilayah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya pembukaan aksesibilitas menuju ke wilayah-wilayah pedesaan, pedalaman, maupun tertinggal agar pembangunan kewilayahan secara merata dapat terealisasi sehingga secara otomatis terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dinas Perkebunan sebagai instansi yang juga memiliki andil dalam program pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan yang berada pada masyarakat sektor pertanian, harus berupaya optimal dalam memberikan kesempatan bagi petani perkebunan untuk memajukan kualitas hidupnya dengan cara memberikan berbagai pelatihan keterampilan teknis perkebunan, memfasilitasi sistem perkebunan modern, mendampingi dalam penerapan teknologi perkebunan, hingga memberikan wadah kelembagaan agar

masyarakat tani dapat melakukan kemitraan dengan swasta. Dengan adanya usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia maupun kelembagaan di bidang perkebunan, diharapkan masyarakat di pedesaan, pedalaman, maupun wilayah tertinggal mulai dapat melakukan usaha perkebunan berkualitas dengan harapan peningkatan kesejahteraan hidupnya.

G. Sarana dan Prasarana

Kemajuan teknologi membuka konsekuensi dengan tuntutan perubahan untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut, bilamana sarana dan prasarana tidak dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut berakibat mengalami ketertinggalan atau keterbelakangan disegala bidang.

Untuk menjamin terlaksananya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan sekaligus untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Berau diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan data dari Subbagian Umum dan Kepegawaian sampai 31 Desember 2018, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1.	Tanah dan Bangunan Kantor Disbun	8.066	m ²
2.	Bangunan Kantor Semi Permanen (UPTD PBTP3)	30	m ²
3.	Rumah Negara Golongan III Type C, Semi Permanen (UPTD PBTP3)	36	m ²

4.	Bangunan Gedung Kantor permanen Disbun	1.224	m ²
5.	Tanah Kebun dll	100.000	m ²
6.	Mobil	4	unit
7.	Motor	5	unit
8.	Sarana (Kursi, Meja, Lemari, Sofa, Band Kas, Gorden)	210	buah
9.	Alat Tulis Kantor (Mesin Ketik, Mesin Hitung dan White Board)	9	buah
10	Alat Komunikasi (Megaphone, Telephone dan Faximilie)	4	buah
11.	Alat Elektronik (Handycam, Proyektor, Sound system dll)	24	buah
12.	Komputer (PC Unit, Laptop, Printer, Note Book, UPS dll)	100	buah
13.	Peralatan Lapangan (GPS, Teropong, Chain Saw, Genset, Kakao Tester, Vacum Press, Freezer, Penyangrai, dll)	75	buah
14.	Peralatan Laboratorium (Tabung Reaksi, Gelas Ukur, Termometer, Mikroskop, Erlenmeyer dll)	161	buah
Hibah dari Disbun Provinsi Kaltim			
15	Peralatan Lapangan (Gergaji, Kampak, Garpu pacul, dll)	36	buah
16	Peralatan Satgas Karlabung (Pakaian Panas lengkap, HT, Ransel, Helm savety, Sepatu savety, kaca mata savety, dll)	106	buah
17	Aset Bergerak (Sepeda Motor, Traktor Tangan dan traktor impement	3	unit

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Setiap tahapan pelaksanaan pembangunan daerah merupakan serangkaian upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan kualitas kehidupan masyarakatnya melalui perbaikan perekonomian di berbagai sektor. Dalam memperbaiki perekonomian masyarakat harus disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang ada di suatu wilayah sehingga konsistensi dan kontinuitas pembangunan tetap terjaga. Oleh karena itu, dalam realisasi pelaksanaan pembangunan sektoral perlu adanya langkah-langkah taktis dan nyata berupa rencana strategis pembangunan sektoral yang secara teknis memiliki spesifikasi khusus dalam menjalankannya.

Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada rencana strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, maka disusun langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah subsektor perkebunan kurun waktu lima tahun ke depan (2016-2021) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Dalam perumusan perencanaannya, rencana strategi beserta turunannya harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis Dinas Perkebunan dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021.

Tujuan	Indikator Tujuan								

Program dan kegiatan pemerintah daerah dalam spesifikasi subsektoral perkebunan merupakan upaya Dinas Perkebunan dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi isu-isu strategi yang berkembang untuk pencapaian tujuan dan sasaran renstra maupun pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau. Terdapat dua jenis program dalam pelaksanaan pembangunan yakni program strategis yang merupakan bentuk program atau kegiatan yang merujuk langsung pada sasaran renstra dan program operasional yang dalam penjabarannya tidak dikaitkan secara langsung dengan renstra Dinas Perkebunan. Meskipun begitu, keseluruhan program dan kegiatan dalam pengembangan subsektor perkebunan harus diturunkan lebih lanjut ke dalam indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

B. Indikator Kinerja Utama

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Pada dasarnya Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Berau selama tahun 2018. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun 2018 untuk tujuan Pengukuran Efisiensi dan efektivitas Kegiatan.

Untuk dapat mengukur Keberhasilan dan Implementasi Rencana Kerja Strategik diatas, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai.

Pada tahun anggaran 2018, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau menetapkan2 sasaran dengan 25 indikator kinerjabeserta targetnya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017 yang telah disetujui oleh Bupati Kabupaten Berau, Bpk H. Muharram,S.Pd, M.M dan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Bpk Ir. Sumaryono pada tanggal 22 Januari 2017. Perjanjian Kinerja tersebut sesuai table 4 berikut ini :

Tabel 4

PENETAPAN KINERJA SASARAN BESERTA INDIKATORNYA TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Terpromosikannya Produk Unggulan Perkebunan Daerah melalui PENAS-KTNA	produk	4	500.000.000	
2	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Periodesasi Informasi Pasar Komoditi Perkebunan	bulan	12	100.000.000	
3	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah Petani/Pekebun yang disuluh	orang	75	100.000.000	
4	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah Petani yang mengikuti Pelatihan Perkebunan Modern	petani	50	100.000.000	
5	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah unit teknologi tepat guna perkebunan yang tersedia	unit	16	300.000.000	
6	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah penangkar dan bibit unggul perkebunan yang bersertifikat	komoditi / penangkar	1	95.000.000	

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

7	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah alat pengolahan yang tersedia dan petani yang terlatih	unit	1	650.000.000	
8	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Luas tanaman perkebunan yang terkendali dari serangan OPT	Ha	10	90.000.000	
9	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah Ijin Usaha Perkebunan yang dibina	PBS	11	120.000.000	
10	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Terfasilitasinya pembibitan komoditas unggulan perkebunan	komoditas	4	235.000.000	
11	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah dokumen rumusan pembangunan bidang perkebunan yang disusun	rumusan	2	50.000.000	
12	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pembuatan pelaporan program / kegiatan	dokumen	1	50.000.000	
13	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah dokumen data statistik komoditi unggulan perkebunan	dokumen	2	83.042.000	
14	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Lahan Kebun	kali	3	125.000.000	

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

15	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah Luasan Lahan Yang Terkonservasi	Ha	30	175.000.000	
16	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah Petani Kebun yang Menggunakan Bioteknologi	Petani / Ha	50 / 5	200.000.000	
17	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengolahan Limbah Cair Kelapa Sawit (POME) di Perusahaan Kelapa Sawit (PKS)	PKS	7	70.000.000	
18	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah Brigade Proteksi Perkebunan	regu	2	150.000.000	
19	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah Petani/Pekebun yang menerapkan Teknologi Budidaya Tepat Guna	petani	50	150.000.000	
20	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Jumlah Petani dan Pelaku Agribisnis yang dilatih	orang	60	100.000.000	
21	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Jumlah Kelompok Tani (Gapoktan) / Asosiasi yang dibina	Kelompok Tani	5	50.000.000	
22	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Luas Kebun Kemitraan yang terbangun	Ha	1000	75.000.000	

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

23	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Terlaksananya Kaji Terap Teknologi Pertanian	demplot	3	100.000.000	
24	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Peningkatan Kapasitas Penyuluh	Orang	25	100.000.000	
25	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	BPP	2	100.000.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka Akuntabilitas Instansi Pemerintah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan maka untuk mengetahui Capaian Kinerja Organisasi dilakukan dengan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai salah satu bentuk instrument pertanggungjawabandalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan juga merupakan bentuk mekanisme memberikan umpan balik guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah. Evaluasi Kinerja menjadi sangat penting bagi Instansi Pemerintah untuk memperbaiki kinerja organisasinya.

Sebagai langkah awal dalam proses penyusunan LAKIP adalah pengukuran kinerja yang merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan daalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintahan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indicator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra.

Evaluasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien sebagai ukuran keberhasilan masing-masing tingkatan organisasi dalam perencanaan tahunan, penganggaran, evaluasi dan menilai kinerja. Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang

Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkatan efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Dalam melakukan evaluasi kinerja perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lainnya:

- Target kinerja tahun ini dibandingkan dengan realisasi tahun lalu;
- Realisasi tahun ini dan tahun lalu;
- Capaian tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu;
- Permasalahan dan solusi

Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan Indikator Kinerja Sasaran tahun berjalan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya. Adapun

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dari Tahun 2015 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut :

TABEL.5

PERBANDINGAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BERAU

TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN 2017

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			REALISASI (%)
				2015	2016	2017	
1	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Terpromosikannya Produk Unggulan Perkebunan Daerah melalui PENAS-KTNA	produk	4	4	4	78,85
2	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Periodesasi Informasi Pasar Komoditi Perkebunan	bulan	12	12	12	90,56
3	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah Petani/Pekebun yang disuluh	orang	75	75	75	75,43
4	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah Petani yang mengikuti Pelatihan Perkebunan Modern	petani	75	75	50	67,86
5	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah unit teknologi tepat guna perkebunan yang tersedia	unit	1 tahun	62	16	86,48
6	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah penangkar dan bibit unggul perkebunan yang bersertifikat	komoditi / penangkar	1 tahun	4 kampung	0	32,26

7	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah alat pengolahan yang tersedia dan petani yang terlatih	unit	0	0	1	35,90
8	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Luas tanaman perkebunan yang terkendali dari serangan OPT	Ha	5 Kampung	5 Kampung	7,5	81,04
9	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah Ijin Usaha Perkebunan yang dibina	PBS	23	12	11	89,34
10	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Terfasilitasinya pembibitan komoditas unggulan perkebunan	komoditas	0	0	1	85,90
11	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah dokumen rumusan pembangunan bidang perkebunan yang disusun	rumusan	6	4	2	87,43
12	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pembuatan pelaporan program / kegiatan	dokumen	1	1	1	75,52
13	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah dokumen data statistik komoditi unggulan perkebunan	dokumen	2	2	2	92,32
14	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Lahan Kebun	kali	0	0	3	79,32

15	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah Luasan Lahan Yang Terkonservasi	Ha	165	13	30	94,49
16	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah Petani Kebun yang Menggunakan Bioteknologi	Petani / Ha	0	0	50 / 5	91,08
17	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengolahan Limbah Cair Kelapa Sawit (POME) di Perusahaan Kelapa Sawit (PKS)	PKS	0	0	7	82,72
18	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah Brigade Proteksi Perkebunan	regu	0	0	2	94,75
19	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah Petani/Pekebun yang menerapkan Teknologi Budidaya Tepat Guna	petani	100	125	50	92,75
20	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Jumlah Petani dan Pelaku Agribisnis yang dilatih	orang	180	150	25	81,67
21	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Jumlah Kelompok Tani (Gapoktan) / Asosiasi yang dibina	Kelompok Tani	40%	16 Kampung	5 Gapoktan / 37 Kelompok Tani	83,98
22	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Luas Kebun Kemitraan yang terbangun	Ha	60%	5 Kampung	397,14	85,85

23	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Terlaksananya Kaji Terap Teknologi Pertanian	demplot	0	0	4	73,45
24	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Peningkatan Kapasitas Penyuluh	Orang	0	0	0	10,75
25	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	BPP	0	0	2	48,55

Dari 12 (Dua Belas) Program dan 43 (Empat Puluh Satu) Kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, pada tahun 2017 secara keseluruhan telah dievaluasi. Evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan diarahkan terhadap kesesuaian antara target dari indikator kinerja kegiatan dan sasaran strategis dengan hasil realisasi kinerja yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi terhadap kesesuaian antara target dari indikator kinerja kegiatan dan sasaran strategis dengan hasil realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dapat diketahui dari analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Sesuai penjabaran dalam Renstra Dinas Perkebunan 2016-2021, melalui Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, diharapkan Dinas Perkebunan dapat mendampingi dan melakukan langkah pembinaan bagi petani/pekebun Kabupaten Berau dalam menghadapi pasar global untuk menguatkan sistem pemasaran hasil produksi perkebunan yang lebih baik terutama dalam hal promosi, pengolahan informasi harga pasar, maupun pelatihan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia. Target Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan adalah Jumlah Produk yang dipasarkan adalah sebanyak 5 komoditi.

Realisasi pelaksanaan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan pada tahun 2017, telah dipasarkan 5 komoditi untuk pasar lokal dan ekspor (Khusus untuk komoditi kelapa sawit), terdiri dari:

- Kelapa Sawit, dalam wujud produksi Tandan Buah Segar (TBS),
Crude Palm Oil (CPO), dan Kernel
- Karet, dalam wujud produksi Lumb,
- Kakao, dalam wujud produksi biji kering,
- Lada, dalam wujud produksi Lada kering,
- Kelapa Dalam, dalam wujud buah segar.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
					FISIK	KEUANGAN (%)
1	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Terpromosikannya Produk Unggulan Perkebunan Daerah melalui PENAS-KTNA	produk	4	4	78,85

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau mengusahakan lebih dikenalnya produk unggulan perkebunan daerah sebagai sasaran pertama dengan indikator kinerja terpromosinya produk unggulan perkebunan daerah melalui PENAS-KTNA tertuang dalam pelaksanaan Kegiatan Promosi Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan. Inti pelaksanaan kegiatan adalah dengan mengikuti kegiatan pameran / ekspo yang dilaksanakan di dalam wilayah Kalimantan Timur maupun wilayah Nasional.

Pada tahun 2017, Berdasarkan arahan tim asistensi Bappelitbang disebabkan adanya defisit anggaran Kabupaten Berau, maka Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah dengan target untuk mempromosikan 4 (empat) komoditi unggulan disatukan dengan pelaksanaan Kegiatan PENAS, sehingga pelaksanaan kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah mengikuti Kegiatan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) yang dilaksanakan di Provinsi Aceh. Selain sebagai ajang kegiatan promosi komoditi unggulan perkebunan Kabupaten Berau ditingkat nasional, Kegiatan tersebut sebagai ajang tukar pikiran dan menambah pengetahuan bagi 11 petani/pekebun beserta pendamping sebagai peserta Kegiatan Penas KTNA dari Kabupaten Berau.

Dengan pagu anggaran kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), realisasi kegiatan mencapai Rp. 394.237.400,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 78,85%, sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp. 105.762.600,- (Seratus Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah). Adanya sisa anggaran tersebut disebabkan efisiensi Biaya perjalanan dinas luar daerah dan biaya transportasi dan akomodasi luar daerah untuk peserta kegiatan Penas KTNA.

Pada tahun 2016, kegiatan promosi komoditi unggulan perkebunan direncanakan dalam 4 kali kegiatan promosi keluar daerah dengan Pagu

Anggaran yang disediakan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 139.500.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Namun, realisasi kegiatan hanya sebesar Rp. 105.890.888 (Seratus Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) atau 75,91%. Kegiatan promosi hanya dapat dilaksanakan di 2 kali kegiatan promosi/pameran, disebabkan karena BPPT sebagai koordinator penyelenggaraan kegiatan promosi tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagai dampak dari pengurangan anggaran, sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp. 33.609.112,- (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Seratus Dua Belas Rupiah).

Pada tahun anggaran 2015, Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah dilaksanakan dengan mengikuti Pameran Expo Investasi Daerah di Jogjakartadan Expo Pembangunan di Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Dengan Pagu Anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp. 183.750.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kegiatan dapat berhasil dilaksanakan dengan baik dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 107.669.836,- (Seratus Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) atau 58,60% sehingga menyisakan dana sebesar Rp. 76.080.164 (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah).

Secara garis besar, Kegiatan Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah dapat dilaksanakan dengan baik.

Adanya sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 76.080.164 (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah) disebabkan adanya penyesuaian biaya perjalanan dinas luar daerah yang tertuang dalam DPPA SKPD Tahun 2015 dengan standarisasi perjalanan dinas luar daerah yang ditetapkan Kabupaten Berau untuk Tahun Anggaran 2015.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
					FISIK	KEUANGAN (%)
2	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Periodesasi Informasi Pasar Komoditi Perkebunan	bulan	12	12	90,56

Informasi harga pasar sangat erat hubungannya dengan tata niaga komoditi perkebunan dimana petani/pengusaha dapat mengakses informasi harga pasar komoditi perkebunan dan lokasi pasar komoditi sebagai dasar untuk menentukan jenis dan mutu komoditas yang akan diproduksi dan ditingkatkan harga jualnya.

Dengan indikator kinerja periodesasi informasi pasar komoditi perkebunan selama 12 bulan, Pagu Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Informasi Pasar atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dengan realisasi anggaran Rp. 90.562.676,- (Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) atau 90,56% dan menyisakan anggaran sebesar Rp. 9.437.324,-

(Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah). Adanya sisa anggaran tersebut disebabkan sisa belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas untuk menunjang kegiatan supervisi informasi harga pasar komoditi perkebunan tingkat kecamatan dan sisa perjalanan dinas luar daerah dalam rangka menghadiri rapat penetapan harga TBS Kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil supervisi Informasi harga pasar komoditi perkebunan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan melalui Kegiatan Pengolahan Informasi Pasar atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan pada tahun anggaran 2017, diperoleh informasi harga pasar komoditi perkebunan di Kabupaten Berau dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2017. Untuk Komoditi Kelapa Dalam, pada tahun 2017 harga rata-rata per biji buah segar adalah sebesar Rp. 3.313,-. Harga Kelapa dalam mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan harga rata-rata Kelapa Dalam pada tahun 2016 sebesar Rp. 3.160,-; Harga ini mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2015, harga rata-rata sebesar Rp.2.200,-.

Komoditi Kopi yang dikembangkan di Kabupaten Berau adalah Jenis Kopi Robusta. Pada tahun 2017, harga Kopi Robusta per kilo rata-rata adalah sebesar Rp. 20.250,- Pada tahun 2016 harga rata-rata per kilogram untuk Komoditi Kopi Robusta adalah sebesar 17.000,- dan Pada tahun 2015, harga Kopi per kilogram sebesar Rp. 16.000,-.

Pada Komoditi Lada, pada tahun 2017, harga lada mengalami penurunan jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Harga Lada pada

tahun 2017 mengalami harga tertinggi sebesar Rp. 100.000,-/kg pada awal tahun 2017, dan terendah pada akhir tahun 2017 yang hanya sebesar Rp. 57.667/kg sehingga diperoleh harga rata-rata untuk komoditi lada pada tahun 2017 sebesar Rp. 74.385,- per kilogram biji kering lada. Jika dibandingkan, Harga Komoditi Lada terendah pada tahun 2016 adalah Rp. 90.000,-/kg di puncak musim panen sekitar bulan Oktober-November 2016, dan harga Lada tertinggi hanya sebesar Rp. 135.000,-/kg terjadi di Semester pertama 2016 dan pada tahun 2015 harga lada mencapai Rp. 150.000,-/kg.

Untuk Komoditi Kakao di Kabupaten Berau dari tahun 2014-2015 harga cenderung stabil berkisar antara Rp. 20.000,- sampai Rp. 28.000,- per kilogram biji kering, namun pada tahun 2016, harga kakao mengalami kenaikan hingga mencapai Rp. 30.000,-/kg. Hal ini dirasakan dapat memberikan dampak positif bagi petani untuk tetap intens dalam membudidayakan komoditi Kakao di Kabupaten Berau. Namun harga Komoditi Kakao pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali hanya berkisar antara Rp. 17.000,- sampai dengan Rp. 21.000,-. Dengan memperhatikan analisa harga pasar untuk Komoditi Kakao tersebut, maka pada tahun 2017 Dinas Perkebunan Kabupaten Berau bekerja sama dengan PT. Berau Coal dalam program CSR untuk menampung hasil panen kakao masyarakat dengan harga yang layak untuk diolah/difermentasi sehingga menarik kembali minat petani/pekebun kakao dalam usaha budidaya komoditi kakao.

Untuk Komoditi Kemiri harga per kilogram biji kering pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 16.525,- jika dibandingkan dengan tahun 2015 harga kemiri sebesar Rp. 18.000,-, di tahun 2016 harga kemiri hanya mencapai Rp. 15.000,-

Untuk Komoditi Karet pada tahun 2016 harga masih berkisar antara Rp. 5000,- sampai Rp. 6.500,- per kilogram Lumb, namun di akhir tahun 2016, harga cenderung meningkat sampai Rp. 8.000,-/kg. Pada tahun 2017 harga komoditi karet rata-rata adalah sebesar Rp. 6.883,-/kg lumb. Untuk meningkatkan kualitas komoditi karet sehingga diharapkan dapat meningkatkan harga jual karet dipasaran, maka Dinas Perkebunan Kabupaten Berau memberikan bantuan berupa Mesin *Rubber Crep* untuk masyarakat Kampung Sidobangen yang merupakan sentra komoditi karet.

Untuk penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit ditentukan bersama tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk menetapkan standart harga TBS KelapaSawit dari umur tanaman 3 tahun sampai dengan umur 10 tahun keatas sesuai ketetapan Dinas Perkebunan Kalimantan Timur.

Pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 186.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 165.172.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) atau 88,80%.

Pada tahun anggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 214.700.000,- (Dua Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), realisasi kegiatan sebesar Rp.172.986.525,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta

Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)dengan capaian kinerja sebesar 80,57%.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
					FISIK	KEUANGAN (%)
3	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah Petani/Pekebun yang disuluh	orang	75	75	75,43

Guna meningkatkan pemahaman petani/pekebun tentang bahan tanaman unggulan perkebunan maka perlu disertai dengan meningkatnya pemahaman petani/pekebun tersebut dalam hal penggunaan dan aplikasi pupuk sesuai dosis anjuran.Dengan indikator kinerja jumlah petani/pekebun yang disuluh, Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna pada tahun 2011 sampai dengan 2016 merupakan penjabaran dari Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, namun pada tahun 2017 terjadi pengalihan program menjadi Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan.

Jika dianalisis, Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna dalam bentuk pelatihan Demplot Pemupukan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, dapat dilaksanakan dengan baik.

Pada tahun 2017, Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna dititik beratkan pada demplot pemupukan lada yang dilaksanakan di tiga kampung yaitu Kampung Pesayan, Kampung Semurut dan Kampung Biatan Ilir dengan masing-masing kampung diikuti oleh 25 orang peserta pelatihan. Sebagai perlengkapan untuk bahan demplot disertakan pula bahan kimia dan pupuk ke masyarakat berupa 30 liter Herbisida, 30 liter Insektisida, 30 liter Fungisida, 1050 kg pupuk kandang, Selain itu diserahkan pula 3 buah cangkul dan gagangnya, 3 buah timbangan duduk, 3 buah gunting pangkas, 3 buah plang demplot dan 3 unit Hanspreyer Solo 425.

Dengan pagu anggaran kegiatan pada tahun 2017 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), serapan realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 75.434.300,- (Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah),- atau 75,43%, sehingga menyisakan anggaran kegiatan sebesar Rp. 24.565.700,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Adanya sisa anggaran kegiatan tersebut disebabkan karena adanya sisa belanja bahan kimia dan pupuk, sisa belanja perlengkapan bahan demplot, sisa belanja pembelian bahan bakar minyak dan pelumas untuk mobilitas ke kampung dan sisa belanja perjalanan dinas luar daerah.

Pada tahun 2016, Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Demplot Pemupukan) dilaksanakan di tiga Kampung yaitu Kampung Siduung Indah (Poktan Nengayatna), Kampung Bukit Makmur Jaya (Poktan Sari Makmur), dan Poktan Berkah Tani Sejahtera

dengan masing-masing kampung diberikan perlengkapan untuk demplot berupa Handsprayer, Gunting Pangkas, Cangkul beserta tangkainya, Timbangan duduk, Herbisida 10 liter, Insektisida 10 liter dan NPK 300 kg. Selain itu pada tahun 2016 dilaksanakan pula Bantuan Barang yang diserahkan ke masyarakat berupa Bibit Karet Okulasi sebanyak 2000 pohon disertai Insektisida 20 liter dan Pupuk NPK 700 kg untuk masyarakat Kampung Long Ayan Poktan “Cih Sang”. Untuk Kampung Punan Malinau Poktan “Deh Blom” diserahkan Bibit Karet Okulasi 2000 pohon dan Herbisida 20 liter.

Pagu anggaran pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna tahun 2016 adalah sebesar Rp. 241.240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) realisasi kegiatan sebesar Rp. 232.981.400,- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta, Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 96,58%, sehingga menyisakan dana sebesar Rp. 8.258.600,- (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pada tahun 2015, Pelaksanaan Demplot Pemupukan Komoditi Lada dilaksanakan Kampung Teluk Semanting Kecamatan Pulau Derawan dan Kampung Harapan Maju Kecamatan Tabalar, serta Demplot Pemupukan Kakao di Kampung Suaran Kecamatan Sambaliung.

Pada Tahun 2015, pagu anggaran yang disediakan untuk Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna adalah sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 138.134.300,- (Seratus Tiga Puluh Delapan

Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau 86,33% sehingga menyisakan dana sebesar Rp. 21.865.700,- (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah)

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
					FISIK	KEUANGAN (%)
4	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah Petani yang mengikuti Pelatihan Perkebunan Modern	petani	50	50	67,86

Peningkatan wawasan dan pengetahuan bagi petani/pekebunyang merupakan sasaran ke empat adalah dengan Indikator Kinerja jumlah petani yang mengikuti pelatihan perkebunan modern, tercover dalam Kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam. Kegiatan ini dari tahun 2011 sampai dengan 2016 termasuk dalam Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, namun pada tahun 2017 terjadi pengalihan program menjadi program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan.

Dengan target Kegiatan sebanyak 50 petani, Anggaran Kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dengan realisasi kegiatan sebesar Rp. 67.857.000,- (Enam Puluh

Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau 67,86% sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp. 32.143.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Inti pelaksanaan kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam pada tahun 2017 adalah Pelatihan teknis budidaya lada di Kampung Pilanjau dan Kampung Bukit Makmur Jaya yang masing-masing kampung diikuti oleh 25 orang peserta pelatihan.

Adanya sisa anggaran kegiatan disebabkan adanya:

- Honorarium KPA selama satu bulan tidak dapat dibayarkan karena KPA melaksanakan ibadah Haji.
- Sisa Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
- Sisa Belanja makan minum kegiatan, honorarium tenaga ahli/instruktur pelatihan dan uang saku non pegawai, karena pelaksanaan pelatihan yang jadwalnya dilaksanakan selama tiga hari, namun pelaksanaan kegiatan pelatihan hanya dilaksanakan selama dua hari.
- Adanya sisa perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

Pada tahun 2016, dengan pagu anggaran Kegiatan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), Inti Kegiatan adalah pelaksanaan pelatihan teknik budidaya Lada di tiga kampung yaitu Kampung Batu Rajang, Kampung Pesayan, dan Kampung Karang, dengan masing-masing Kampung diikuti oleh 30 orang peserta pelatihan. Realisasi Kegiatan sebesar Rp. 173.838.825,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh

Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau 86,92% sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp. 26.161.175,- (Dua Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah). Adanya sisa anggaran disebabkan karena adanya sisa perjalanan dinas dalam dan luar daerah selain itu juga karena adanya efisiensi anggaran belanja langsung sebesar 5%.

Pada Tahun Anggaran 2015, Pagu Anggaran yang disediakan untuk Kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam adalah sebesar Rp. 194.600.000,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 138.810.700,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan capaian kinerja sebesar 71,33% sehingga menyisakan anggaran sebesar 55.789.300,- (Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Inti pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam pada tahun 2015 adalah pelaksanaan pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Komoditi Karet di 3 (tiga) kampung yaitu Kampung Pandan Sari, Kampung Merasa dan Kampung Suaran dengan jumlah peserta pelatihan 25 orang tiap kampung.

Adanya sisa anggaran kegiatan disebabkan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan teknis budidaya karet di Kampung Pandan Sari, Kampung Merasa dan Kampung Suaran karena tidak tersedianya anggaran untuk belanja sewa sarana

mobilitas yang menunjang kegiatan monitoring dan evaluasi pelatihan tersebut pada DPPA SKPD Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2015. Selain itu sisa anggaran kegiatan juga disebabkan karena adanya penyesuaian biaya perjalanan dalam daerah dan luar daerah dengan standarisasi perjalanan dinas untuk tahun 2015

Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan

Meningkatnya produksi komoditi unggulan perkebunan harus diimbangi pula dengan peningkatan mutu hasil perkebunan. Program Peningkatan Mutu Perkebunan merupakan Program baru dalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2016-2021 yang dimulai pada tahun 2017, dengan tujuan melakukan pembinaan petani/pekebun guna mendorong meningkatnya mutu hasil olahan komoditas perkebunan. Target Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan pada tahun 2017 adalah Jumlah sertifikasi hasil perkebunan yang sesuai Good Manufacture Product (GMP) sebanyak 3 sertifikat.

Dalam pelaksanaan program prioritas Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan pada RPJMD berupa Jumlah sertifikasi hasil perkebunan yang sesuai Good Manufacture Product (GMP), tidak terdapat kegiatan yang target kinerjanya mendukung program tersebut sehingga pada tahun 2017, target Program belum dapat tercapai.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
					FISIK	KEUANGAN (%)

5	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah unit teknologi tepat guna perkebunan yang tersedia	unit	16	16	86,48
---	--	---	------	----	----	-------

Salah satu usaha Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dalam menunjang meningkatnya mutu hasil olahan komoditas perkebunan melalui Program Peningkatan mutu hasil perkebunan adalah melalui Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna dengan indikator kinerja jumlah unit teknologi tepat guna perkebunan yang tersedia.

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna pada tahun 2017 dititik beratkan pada Pengadaan 4 unit lantai jemur lada untuk Kelompok Tani Berkah Setia Bersatu, Kampung Pesayan, 2 unit lantai jemur lada untuk Kelompok Tani Bina Tani Sejahtera I kampung Kasai, dan 5 unit lantai jemur untuk Kelompok Tani Sumber Jaya kampung Bukit Makmur Jaya. Selain itu dilaksanakan juga pengadaan 3 mesin pemotong rumput untuk Kelompok Tani Berkah Setia Bersatu Kampung Pesayan dan 2 unit mesin pemotong rumput untuk Kelompok Tani Rahmat Kampung Suaran.

Selain itu pelaksanaan Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna pada tahun 2017 adalah terlaksananya pembinaan penggunaan alat berat bagi PBS dan pembangunan perkebunan.

Pagu Anggaran Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), dengan realisasi kegiatan sebesar Rp. 259.430.800,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 86,48% sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp. 40.569.200,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).

Adanya sisa anggaran sebesar Rp. 40.569.200,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) disebabkan adanya sisa belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas, selain itu adanya selisih harga Mesin Pemotong Rumput di pasaran dengan anggaran yang tertuang dalam DPA Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna tahun 2017. Adapun perjalanan ke Kampung Tanjung Perepat, Kampung Merasa dan Kampung Merapun dalam rangka pembinaan peredaran ijin alat berat belum dapat dilaksanakan karena data dan arsip ijin alat berat tidak ada.

Jika dibandingkan, Pelaksanaan kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna pada tahun 2016 sebagian merupakan relisasi tidak lanjut pelaksanaan pengadaan mesin pengolahan hasil perkebunan yang akan diserahkan ke masyarakat yang tidak dapat dilaksanakan di tahun 2015, yaitu:

- Mesin Pencacah Buah Kakao dengan kapasitas 300 kg/jam dan Mesin Pengereng Biji Kakao dengan kapasitas 250-500 kg/jam, yang akan

diserahkan untuk KT. Bangkit Persada Kampung Bangun Bebanir, Kecamatan Sambaliung.

- Mesin Perontok Biji Lada yang akan diserahkan untuk Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan.

Selain itu, dilaksanakan pula pengadaan alat pengolahan hasil perkebunan yaitu:

- Lantai Jemur Lada untuk Poktan Mekar Jaya Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung sebanyak 5 unit, Poktan Bubuhan Kampung Sambakungan Kecamatan Gunung Tabur sebanyak 5 unit, dan Poktan Kampung Batu Rajang, Kecamatan Segah sebanyak 3 unit.
- Bak Fermentasi/Perendaman biji lada dengan ukuran 2m x 4 m x 1 m untuk Kampung Manunggal Jaya sebanyak 8 Unit, dan Poktan Bukit Makmur Jaya Kecamatan Biatan sebanyak 8 Unit.

Pada tahun 2016, ditargetkan pula pengadaan Kotak fermentasi biji kakao untuk Poktan Makasang Muara Kelurahan Gunung Tabur, Poktan Kampung Maluang Kecamatan Gunung Tabur dan Poktan Mekar Jaya Kampung Suaran Kecamatan Sambaliung yang direncanakan sebanyak 30 unit, namun karena petani/pekebun penerima bantuan tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 44 tahun 2014 tentang tata cara Pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial, maka proses pengadaan tidak dapat dilanjutkan.

Selain dalam Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna pada tahun 2016 dilaksanakan pula

Pembinaan Penggunaan Alat Berat Bagi Perusahaan Besar Swasta (PBS) yaitu PT. Inti Energi Kaltim (Kampung Ampean Medang), PT. Dwiwira Lestari Jaya (Kampung Biatan Lampake), PT. Anugrah Agung Prima Abadi (Kampung Merapun), PT. Berau Karetindo Lestari (Kampung Long Ayan), PT. Natura Pasific Nusantara (Kampung Punan Malinau) dan PT. Berau Agro Kesuma (Kampung Long Beliu). Pembinaan yang dilakukan dalam hal perijinan penggunaan alat berat untuk kepentingan operasional perusahaan yang ijin penggunaannya dikeluarkan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau.

Dengan pagu anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp. 930.000.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) realisasi pelaksanaan kegiatan adalah sebesar Rp. 843.267.210,- (Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah), dengan capaian kinerja sebesar 90,67% sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp. 86.732.790,- (Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Adanya sisa anggaran sebesar Rp.86.732.790,- (Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah), disebabkan karena pengadaan kotak fermentasi sebanyak 30 unit tidak dapat dilaksanakan maka kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Alsintan, dan monitoring alsintan untuk Kampung penerima Alsintan kotak fermentasi itupun tidak dapat dilaksanakan. Adanya penyesuaian biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah dengan standarisasi perjalanan dinas Kabupaten Berau Tahun 2016 dan efisiensi belanja langsung sebesar 5%.

Pada tahun 2015, Pagu Anggaran Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna adalah sebesar Rp. 1.000.850.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) realisasi penyerapan anggaran hanya mencapai Rp. 510.955.700,- (Lima Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau 51,05% sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp. 489.894.300,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah).

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
					FISIK	KEUANGAN (%)
6	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah penangkar bibit unggul yang difasilitasi untuk memperoleh sertifikat	komoditi / penangkar	1	1	35,90

Pada tahun anggaran 2017 terjadi perpindahan penempatan Kegiatan Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan dari Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan menjadi Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan, karena salah satu upaya dalam peningkatan mutu hasil komoditi perkebunan adalah dengan penggunaan bibit yang baik (bersertifikat).

Inti Kegiatan Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan adalah memfasilitasi penangkar bibit unggul dikabupaten Berau dengan cara mendatangkan tim teknis penilai sertifikasi dengan tujuan menghasilkan satu

penangkar yang pada tahun 2017 dititik beratkan pada bibit komoditi Lada di Kampung Pesayan.

Dengan pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), realisasi kegiatan hanya sebesar Rp. 30.650.375,- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) atau 32,26%.

Dalam pelaksanaan KegiatanSertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan, setelah dilaksanakan penilaian oleh tim teknis sertifikasi bibit unggul Pertanian/Perkebunan dari Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat serta Direktorat Jendral Perkebunan, kebun sumber benih lada yang disiapkan sebagai penangkar bibit komoditi lada dinyatakan tidak layak secara teknis sebagai calon kebun sumber benih lada.

Calon kebun sumber benih Lada adalah Kebun milik Bpk Ramli Tantu, seluas 1 (satu) hektar, di kampung pesayan dengan jenis varietas Malonan 1. Adapun kendala yang dihadapi sehingga tidak dapat dilaksanakannya Kegiatan Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan adalah:

- Umur tanaman didominasi lebih dari 3 (tiga) tahun,
- Kondisi pertanaman tidak seragam,
- Adanya serangan penyakit utama berupa penyakit Busuk Pangkal Batang Lada yang melebihi standar toleransi.
- Tidak adanya drainase dan batas kebun
- Tidak dilaksanakannya kegiatan pemangkasan sehingga kanopi tanaman berbentuk payung.

- Jumlah pohon terpilih yang dapat dijadikan sumber benih dalam satu blok sangat sedikit, tidak mencapai 10% dari total luasan.

Dengan memperhatikan sebab dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan pada tahun 2017 di Kampung Pesayan, diharapkan adanya koordinasi antara Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dengan Tim Penilai Sertifikasi bibit unggulan Pertanian/Perkebunan dari Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat serta Direktorat Jendral Perkebunan untuk mengetahui standar teknis yang ditetapkan guna terbentuknya kebun sumber benih lada di Kabupaten Berau sebelum kembali dilaksanakannya kegiatan Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan ditahun selanjutnya.

Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan pada tahun 2016, menitik beratkan pada pelaksanaan Sosialisasi penggunaan bibit sawit bersertifikat yang direncanakankan dilaksanakan di empat Kampung, yaitu Kampung Biduk-Biduk, Kampung Pantai Harapan, Kampung Teluk Sumbang dan Kampung Maluang. Dengan anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 195.120.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Dalam pelaksanaannya, setelah dilaksanakan proses pendataan untuk calon peserta sosialisasi (CP/CL), terjadi penolakan dari masyarakat Kampung Biduk-Biduk, Pantai Harapan dan Teluk Sumbang yang menyatakan bahwa mereka tidak bersedia membudidayakan komoditi kelapa sawit, sehingga pelaksanaan kegiatan Sosialisasi bibit sawit bersertifikat tidak dapat

dilaksanakan di ketiga kampung tersebut. Hal ini menyebabkan penyerapan anggaran kegiatan untuk tahun 2016 hanya sebesar Rp. 103.881.500,- (Seratus Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 53,24% sehingga menyisakan dana sebesar Rp. 91.238.500,- (Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah). Selain itu sisa anggaran juga disebabkan karena adanya efisiensi belanja langsung sebesar 5%.

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2015 adalah Sosialisasi penggunaan bibit kelapa sawit bersertifikat di perkebunan rakyat yang dilaksanakan di 3 (tiga) kampung, yaitu: Kampung Bukit Makmur, Kampung Long Ayan dan Kampung Tumbit Dayak. Selain itu diikuti pula pembelajaran pengelolaan kebun entres karet di Balit Getas Salatiga, Koordinasi dalam rangka pemurnian klon karet untuk kebun entres dinas serta orientasi teknis perbanyak bahan tanaman ke Puslit Koka Jember, Jawa Timur.

Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 267.070.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 161.989.169,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) atau 60,65% sehingga menyisakan dana sebesar Rp. 105.101.831,- (Seratus Lima Juta Seratus Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) yang disebabkan adanya penyesuaian belanja

perjalanan dinas luar daerah dengan standarisasi perjalanan dinas Kabupaten Berau Tahun 2015.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
					FISIK	KEUANGAN (%)
7	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah alat pengolahan yang tersedia dan petani yang terlatih	unit	1	1	35,90

Kegiatan Pembinaan Pasca Panen merupakan Kegiatan baru penunjang Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan. Pada tahun 2017, Kegiatan Pembinaan Pasca Panen dititik beratkan pada usaha peningkatan kualitas komoditi karet sehingga diharapkan dapat membantu petani pekebun karet dalam usaha meningkatkan harga jual komoditi karet.

Berdasarkan data statistik perkebunan Kabupaten Berau, pada komoditi karet terjadi penurunan produksi dari tahun 2015. Hal ini disebabkan karena keengganan petani pekebun karet untuk menyadap karet disebabkan karena rendahnya harga jual komoditi karet di tingkat petani. Sampai saat ini, petani pekebun karet masih menjual karet hasil sadapnya dalam bentuk *Lump*.

Untuk itu Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, melalui Kegiatan Pembinaan Pasca Panen, membantu masyarakat petani/pekebun karet

Kampung Sidobangen, sebagai salah satu kampung sentra komoditi karet dengan memberikan bantuan 1 (satu) unit mesin pengolahan *Rubber Creep* dengan kapasitas produksi antara 250 – 500 lembar per jam.

Pagu anggaran kegiatan Pembinaan Pasca Panen pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 233.344.139,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau 35,90% sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp. 416.655.861,- (Empat Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

Adanya sisa anggaran kegiatan disebabkan karena ketidak sesuaian dalam proses penyusunan anggaran dengan pihak Bappelitbang serta kurangnya informasi dalam survey harga pasar. Selain itu sisa anggaran juga disebabkan adanya sisa belanja Bahan Bakar Minyak /Gas untuk transportasi penunjang kegiatan identifikasi CP/CL dan Monev penyampaian bantuan mesin *Rubber Creep*, serta Honor Petugas Lapang yang tidak direalisasikan.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Perkembangan produktivitas hasil panen subsektor perkebunan ditunjang oleh usaha dalam mengelola dan manajemen sumber daya perkebunan tepat sasaran terutama dalam hal penambahan luas tanam, kualitas komoditas, optimalisasi pemanfaatan lahan, management/pengolahan kebun yang baik, pengendalian dan perlindungan terhadap serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan secara makro, Pembinaan dan

Pengendalian Pengembangan Perijinan bagi Perusahaan Besar Swasta yang mengelola Usaha Perkebunan. Target Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan sesuai Renstra 2016-2021 adalah pencapaian Produksi Perkebunan yang mencapai 2.134.997 Ton dengan luas tanam mencapai 200.000 Ha.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
					FISIK	KEUANGAN (%)
8	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Luas tanaman perkebunan yang terkendali dari serangan OPT	Hektar	10	7,5	81,04

Terkendalnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dapat diketahui dari menurunnya tingkat serangan OPT pada tanaman perkebunan sampai batas tidak merugikan petani pekebun secara financial. Perwujudan sasaran tersebut tercover dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Perlindungan Tanaman Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

Pada tahun 2017, inti pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Perlindungan Tanaman Perkebunan adalah Pendataan dan inventarisasi OPT serta pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan target Luas tanaman perkebunan yang terkendali dari serangan OPT seluas 10 Ha.

Dari pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Perlindungan Tanaman Perkebunan diketahui:

- Kampung Buyung-Buyung terserang Penyakit Busuk Pangkal Batang Lada, dan telah dilaksanakan pengendalian seluas $\pm 0,5$ Ha baik secara kimia dengan penyemprotan fungisida maupunantisipasi jangka panjang dengan pemberian Jamur Trichoderma. Untuk serangan penyakit busuk buah dan serangan hama PBK pada tanaman kakao, telah dilaksanakan pengendalian seluas $\pm 1,5$ Ha
- Kampung Manunggal Jaya, telah dilaksanakan tindakan pengendalian penyakit Busuk Pangkal Batang Lada seluas $\pm 0,5$ Ha dari ± 7 Ha luas tanaman lada yang terserang, dengan aplikasi jamur Trichoderma. Dari hasil pendataan, diketahui sekitar 3 Ha tanaman Lada terserang penyakit Jamur Upas dan Jamur Ekor Kuda, serta sekitar 2,7 Ha tanaman Kakao terserang Penyakit Buah. Tindakan pengendalian yang dilaksanakan adalah dengan pemberian fungisida dan sanitasi kebun.
- Kampung Tembudan, diketahui terserang penyakit busuk pangkal batang lada seluas 1,7 Ha, Jamur Marasmius dan Jamur Pirang seluas 2,3 Ha. Untuk Penyakit Busuk Pangkal Batang Lada telah dilakukan tindakan pengendalian dengan aplikasi jamur Trichoderma seluas 0,5 Ha. Untuk pencegahan petugas pengendali OPT menyarankan tindakan sanitasi kebun untuk mengurangi serangan jamur marasmius dan jamur pirang serta eradikasi pada serangan berat.
- Pada Kampung-Kampung dipesisir pantai (Kampung Giring-Giring, Pantai Harapan, Teluk Sumbang dan Pulau Derawan), Kelapa Dalam terserang Hama *Artona*, *Oryctes* dan *Plesispa*, yang terserang seluas ± 26 Ha, dan telah dilakukan tindakan pengendalian seluas sekitar 2,5 Ha

dengan aplikasi insektisida melalui injeksi batang setelah sebelumnya dilaksanakan tindakan pemanenan buah, karena selama 3 bulan pasca tindakan pengendalian, buah kelapa dalam tidak boleh dikonsumsi.

Dengan Pagu Anggaran Kegiatan Pengendalian dan Perlindungan Tanaman Perkebunan tahun 2017 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) realisasi Kegiatan sebesar Rp. 72.934.682,- (Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) atau 81,04%, sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp. 17.065.318,- (Tujuh Belas Juta Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah). Adanya sisa anggaran disebabkan karena sisa belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas untuk penunjang sarana transportasi pengendalian serta sisa belanja perjalanan luar daerah dalam rangka Workshop Perlindungan Perkebunan se Kaltim.

Mengingat besarnya luas serangan OPT Perkebunan yang belum terkendalikan maka diharapkan peran serta Pemerintah Kabupaten Berau dalam melalui Dinas Perkebunan dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD-P2TP) di Rinding, dalam usaha pengendalian dan pendampingan petani/pekebun dalam menekan tingkat serangan OPT sehingga tidak merugikan dari segi ekonomis bagi petani/pekebun dalam membudidayakan komoditi perkebunan.

Selain itu dirasakan perlu adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Berau untuk penunjang sarana dan prasana kegiatan pengendalian serangan OPT, mengingat masih terbatasnya sarana baik untuk identifikasi penyebab

jenis serangan (masih minimnya fasilitas laboratorium untuk identifikasi jenis serangan) maupun sarana pengendalian serangan OPT. Disamping itu perlu adanya fasilitasi pelatihan untuk menambah pengetahuan bagi petugas pengendali serangan OPT melalui kerjasama dengan Balai penelitian terkait.

Pagu anggaran Kegiatan Pengendalian dan Perlindungan Tanaman Perkebunan pada tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 292.514.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah), ditargetkan untuk pelaksanaan Pelatihan Pengendalian OPT tanaman perkebunan di Kampung Teluk Sumbang, Kapung Suaran, Kampung Tumbit Dayak, Kampung Tumbit Melayu, dan Kampung Bena Baru. Selain itu juga dilaksanakan Identifikasi OPT di Kampung Punan Malinau dan Kampung Tepian Buah, mengikuti pelaksanaan workshop perlindungan perkebunan se Kaltim dan belanja modal untuk pengadaan alat laboratorium.

Realisasi penyerapan anggaran kegiatan tahun 2016 sebesar Rp. 262.949.043,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah) atau 89,89% dan menyisakan dana sebesar Rp. 29.564.957,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) disebabkan karena adanya sisa belanja akan minum kegiatan pelatihan, sisa perjalanan dalam dan luar daerah, adanya kesalahan dalam penentuan kode rekening untuk pengadaan alat laboratorium, serta efisiensi anggaran belanja langsung kegiatan sebesar 5%.

Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Perlindungan Tanaman Perkebunan pada tahun Anggaran 2015, Inti Kegiatan dititik beratkan pada pelaksanaan kegiatan Workshop Perlindungan Perkebunan se Kaltim yang dilaksanakan di Hotel Cantika Swara, Tanjung Redeb dan dilanjutkan ke Pulau Derawan, dimana Dinas Perkebunan Kabupaten Berau sebagai tuan rumah. Selain itu dilaksanakan kegiatan Pelatihan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pala di Kampung Giring-Giring, Tanjung Perepat dan Teluk Sulaiman; Pelatihan pengendalian OPT Tanaman Kakao dan Kelapa sawit di Kampung Gunung Sari dan Tanjung Batu serta Pengamatan dan Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Perkebunan di Kampung Gunung Sari dan Harapan Jaya. Pelaksanaan Pelatihan Pengendalian OPT di Kampung Gunung Sari, Tanjung Batu dan Teluk Sulaiman merupakan realisasi pelaksanaan kegiatan pelatihan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2014 karena permasalahan biaya bantuan transport dan akomodasi untuk pelatih atau pemandu yang berasal dari PNS yang juga berasal dari Dinas Perkebunan Kabupaten Berau.

Pagu Anggaran Kegiatan Pengendalian dan Perlindungan Tanaman Perkebunan pada tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 400.070.000,- (Empat Ratus Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah), realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 342.579.100,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah) atau 85,63% dan menyisakan dana sebesar Rp. 57.490.900,- (Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
					FISIK	KEUANGAN (%)
9	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah Ijin Usaha Perkebunan yang dibina	PBS	11	11	89,34

Untuk Tertibnya pelaksanaan perijinan Usaha Perkebunan Besar di Kabupaten Berau dengan Indikator kinerja Terkendalinya Perijinan Usaha Perkebunan Besar terlaksana melalui Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Besar, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

Pada Tahun 2017, Pagu Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Besar adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Dua Puluh Juta Rupiah) dengan ralisasi kegiatan sebesar Rp.107.205.299,- (Seratus Tujuh Juta Dua Ratus Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) atau 89,34%.

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Besar pada tahun 2017 diarahkan pada Monitoring dan Evaluasi Perijinan 11 PBS yaitu

- PT. Dwi wira Lestari Jaya dan PT. Tanjung Buyu Perkasa Plantation di Biatan Lampake,
- PT. Buana Mudantara dan PT. Andalas Nusantara Permai di Biatan Bapinang,
- PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation di Talisayan
- PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di Dumaring,
- PT. Jabontara di Batu Putih,
- PT. Inti Energi Kaltim di Ampean Medang,
- PT. Tunas Alam Nusantara di Pantai Harapan,
- PT Berau Sawit Sejahtera di Merapun,
- PT. Hutan Hijau Mas di Gunung Sari,
- PT. Berau Karetindo di Long Ayan dan
- PT. Natura di Punan Malinau.

Selain itu dilaksanakan perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka:

- Menghadiri undangan pelatihan yang dilaksanakan oleh MCA-I di Samarinda,
- Menghadiri undangan Penetapan Harga TBS di Samarinda dan Balikpapan,
- Menghadiri undangan pelatihan Lanjutan yang dilaksanakan oleh MCA-I di Samarinda,

- Menghadiri undangan sidang panitia B oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Samarinda, serta
- Peningkatan Wawasan tentang perijinan perkebunan di Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur di Sangata.

. Sebagai perbandingan jalannya Kegiatan, Pada Tahun 2016, Pagu Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Besar adalah sebesar Rp. 235.050.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh LimaJuta Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan ralisasi kegiatan sebesar Rp.190.811.500,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 81,18%. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Besar pada tahun 2016 diarahkan kepada 12 PBS untuk dilakukan pembinaan yang terdiri dari Pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan (Klasifikasi Kebun) dan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Perijinan serta Pelatihan Amdal / Lingkungan Hidup.

Pada Tahun 2015, Pagu Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Besar adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan ralisasi kegiatan sebesar Rp. 209.022.388,- (Dua Ratus Sembilan Juta Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) atau 83,61% Pelaksanaan Kegiatan diarahkan kepada 23 PBS untuk dilakukan pembinaan yang terdiri dari Pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan (Klasifikasi Kebun)dan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Perijinan.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
----	---------	------------------	--------	--------	-----------

					FISIK	KEUANGAN (%)
10	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Terfasilitasinya pembibitan komoditas unggulan perkebunan.	komoditas	2	1	85,90

Kegiatan Fasilitasi Pembibitan Komoditi Unggulan merupakan kegiatan baru dalam Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan yang dimulai pada tahun anggaran 2017. Tujuan dari Kegiatan Fasilitasi Pembibitan Komoditi Perkebunan ini adalah terbentuknya 4 Kebun Sumber Benih Unggul (Kakao, Karet, Lada dan Kelapa Dalam) yang berfungsi sebagai tempat pembibitan 4 komoditi perkebunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan di UPTD Pengembangan Bahan Tanaman dan Penanganan Pasca Panen (UPTD-PBTP3) Tumbit Melayu.

Pada tahun 2017, Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembibitan Komoditi Perkebunan ditargetkan dengan menyiapkan bahan tanaman berupa bibit unggul Kakao sebanyak 1000 pohon dan bibit unggul lada sebanyak 1500 pohon yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber benih unggul di Kebun pembibitan yang akan dibangun.

Dengan pagu anggaran kegiatan pada tahun 2017 sebesar Rp. 235.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 201. 870.320,- (Dua ratus Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh atau 85,90%, sehingga menyisakan

anggaran sebesar Rp. 33.129.680,- (Tiga puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Dalam pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pembibitan Komoditi unggulan tahun 2017, Penyiapan pembangunan Kebun sumber benih yang dapat dilaksanakan hanya untuk komoditi Lada varietas Malonan 1 yang bersumber dari Kelompok Tani Mega Buana, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara sebanyak 1500 pohon. Sedangkan Penyiapan pembangunan Kebun Sumber Benih Kakao dengan menyediakan 1000 pohon bibit kakao sebagai bahan tanaman tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan, berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) di Jember, Jawa Timur sebagai penyedia benih kakao unggul, diketahui bahwa untuk pembangunan Kebun induk/sumber benih maka wajib didampingi dan diawasi langsung oleh tenaga ahli dari Puslitkoka.

Dengan memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dan persyaratan teknis dari Puslitkoka, maka Penyiapan Pembangunan Kebun Sumber Benih Komoditi Kakao akan dianggarkan kembali melalui Kegiatan Fasilitas Pembibitan Komoditi Unggulan di tahun 2018.

Program Pengembangan Perencanaan Perkebunan

Dalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2016-2021 pada Program Pengembangan Perencanaan Perkebunan, Pada tahun 2017, terjadi perpindahan penempatan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dari

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan ke Program Pengembangan Perencanaan Perkebunan. Demikian juga dengan Kegiatan Pengolahan Data Statistik Perkebunan dari Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan ke Program Pengembangan Perencanaan Perkebunan.

Dalam Program Pengembangan Perencanaan Perkebunan, Ketersediaan data dan informasi merupakan syarat penting dalam proses perencanaan baik dalam hal penyusunan rencana kerja kegiatan, proses pelaksanaan, maupun pada saat pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan subsektor perkebunan. Target Program Pengembangan Perencanaan Perkebunan dalam Renstra telah sesuai dengan pelaksanaan program pada tahun 2017 yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun sebanyak 4 Dokumen terdiri dari Dokumen pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Provinsi Tahun 2017 (Musrenbang), Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan se Kalimantan Timur Tahun 2017 (Rakoribun), Penyusunan Data Statistik Perkebunan Semester I dan II Tahun 2017, dan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
					FISIK	KEUANGAN (%)
11	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah dokumen rumusan pembangunan bidang perkebunan yang disusun	rumusan	2	2	87,43

--	--	--	--	--	--	--

Pada tahun 2017, pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi Pembangunan Perkebunan sesuai dengan target kegiatan menitikberatkan pada pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2017 se Kalimantan Timur di Samarinda dan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Provinsi Tahun 2017.

Pagu Anggaran Kegiatan Konsolidasi Pembangunan Perkebunan tahun 2017 adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 43.717.300,- (Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau 87,43%. Sisa anggaran sebesar Rp. 6.282.700,- (Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) disebabkan karena adanya sisa perjalanan dinas luar daerah untuk kegiatan Musrenbang Provinsi dan Rakorbun Tahun 2017, selain itu juga sisa dari belanja Alat Tulis Kantor.

Dari hasil pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Provinsi Tahun 2017 (Musrenbang) dan Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan se Kalimantan Timur Tahun 2017 (Rakorbun), diketahui sinkronisasi kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim dan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau tahun 2017 adalah:

- Kegiatan Ketersediaan dan Sertifikasi Benih Salur/Tanam untuk Plasma dengan tujuan untuk mengidentifikasi sumber benih kelapa sawit untuk

Plasma di Kabupaten Berau (dengan sampling di grup PT. Kuala Lumpur Klang (PT. KLK) yang dilaksanakan oleh tenaga Pengawas Benih Terpadu (PBT)

- Kegiatan Pengendalian OPT dititik beratkan pada pengendalian JAP, Ganoderma, Penyakit Busuk Pangkal Batang Lada, dan Hama Penggerek Buah Kakao (PBK)
- Kegiatan Monev Saprasi dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun
- Untuk Perencanaan Tahun 2018, sesuai Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 830/Kpts/RC.040/12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, prioritas komoditi yang akan dikembangkan di Kabupaten Berau yaitu Lada dan Kakao.

Pada Tahun 2016 untuk kegiatan Konsolidasi Pembangunan Perkebunan diarahkan pada kegiatan :

1. Mengikuti kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tahun 2016 di Biduk-Biduk
2. Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2016 se Kalimantan Timur di Samarinda
3. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi Tahun 2016 di Samarinda
4. Pelaksanaan Perencanaan Investasi Daerah (Pepida) tahun 2016 di Tenggarong, Kutai Kertanegara. Orientasi Lapangan dalam rangka Perencanaan Investasi Daerah (Pepida) ke Lampung

Dengan Pagu Anggaran Kegiatan untuk tahun 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), realisasi anggaran kegiatan hanya mencapai Rp. 115.897.000,- (Seratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau 77,26 %, sehingga menyisakan dana sebesar Rp. 34.103.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tiga Ribu Rupiah), disebabkan karena pelaksanaan Orientasi Lapang dalam rangka Perencanaan Investasi Daerah (Pepida) hanya diikuti oleh satu orang saja, selain itu sisa anggaran juga disebabkan karena adanya sisa perjalanan dalam dan luar daerah serta efisiensi belanja langsung sebesar 5%.

Pagu Anggaran Kegiatan untuk tahun 2015 sebesar Rp. 196.255.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), realisasi anggaran kegiatan hanya mencapai Rp. 110.851.400,- (Seratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 56,48%, sehingga menyisakan dana sebesar Rp. 85.403.600,- (Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) karena adanya penyesuaian belanja perjalanan dinas luar daerah Kabupaten Berau dengan Standarisasi Perjalanan Dinas Kabupaten Berau tahun 2015.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
					FISIK	KEUANGAN (%)
12	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pembuatan pelaporan program /	dokumen	1	1	75,52

		kegiatan				
--	--	----------	--	--	--	--

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan serta informasi capaian kinerja kegiatan pada tahun anggaran 2015/2016 serta menggambarkan hambatan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat Kampung untuk disampaikan kembali ke Dinas Perkebunan sebagai bahan evaluasi guna mendapatkansolusi pemecahannya.

Pagu Anggaran pada tahun 2017 untuk Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 37.758.150,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 75,52%, sehingga menyisakan anggaran kegiatan sebesar Rp.12.241.850,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada tahun 2017 dilaksanakan di 14 (empat belas) Kampung, yaitu Kampung Samburakat, Bangun Bebanir, Gurimbang, Pesayan, Pилanjau, Tembudan, Kayu Indah, Harapan Maju, Sumber Mulia, Biatan Lampake, Biatan Ilir, Bumi Jaya, Gunung Tabur dan Birang. Dari hasil Monev yang dilaksanakan di 14 Kampung tersebut, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kampung membutuhkan pendampingan berupa pelatihan budidaya dan pengendalian OPT dalam upaya

pengelolaan kebun sebagai tindak lanjut setelah menerima bantuan bibit dari proses hibah dari Dinas Perkebunan Kabupaten Berau.

Selain itu, untuk Kampung-kampung yang sebagian besar telah mengembangkan budidaya lada, hampir sebagian besar keluhan masyarakat adalah adanya serangan penyakit Busuk Pangkal Batang Lada. Sebagai tindak lanjut, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau melalui Bidang Perlindungan bekerjasama dengan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan melakukan usaha pengendalian baik secara kimiawi maupun secara biologis, dengan salah satu metodenya menggunakan *Trichoderma sp* sebagai agensi hayati.

Sebagai tindak lanjut pengembangan komoditi kelapa sawit yang merupakan komoditi perkebunan terbesar yang di kembangkan oleh masyarakat di Kabupaten Berau, maka perlu adanya pendampingan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Berau sebagai perantara untuk menghindari konflik atau gangguan usaha antara masyarakat sebagai pengelola secara swadaya dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang mengelola usaha pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Berau.

Adanya sisa serapan anggaran kegiatan sebesar Rp. 12.421.850,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) disebabkan karena adanya sisa belanja bahan bakar minyak atau oli, sisa biaya ATK, sisa biaya penggandaan dan sisa belanja perjalanan dinas dalam daerah.

Pelaksanaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, jika dibandingkan dengan Tahun 2016, dengan Pagu Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 188.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) realisasi kegiatan sebesar Rp. 168.519.800,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan belas Ribu Delapan Ratus Rupiah), capaian kinerja sebesar 89,11%, sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp. 20.480.200,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah).

Dengan target Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan di 16 (enam belas) kampung yaitu Kampung Eka Sapta, Ampean Medang, Bukit Makmur Jaya, Biatan Lampake, Biatan Ilir, Teluk Sumbang, Karangan, Pantai Harapan, Tembudan, Sumber Agung, Bangun Bebanir, Suka Muria, Tubaan, Sidobangen, dan Giring-Giring. Monitoring dan Evaluasi yang diadakan meliputi monev kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan tahun 2015, monev Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Tahun 2015, dan Monev Kegiatan Konservasi Lahan dengan komoditas perkebunan tahun 2015.

Dari hasil monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2014-2015, diperoleh hasil bahwa banyak ditemui bantuan bibit yang diserahkan ke masyarakat yang mati. Hal ini disebabkan karena proses serah terima bantuan ke masyarakat oleh pihak ke tiga dilaksanakan pada saat musim kemarau, sehingga rata-rata bibit yang diserahkan (terutama bibit pala dan nilam) kurang dapat beradaptasi dengan kondisi panas ekstrim di Kabupaten Berau. Selain itu rendahnya pengetahuan masyarakat dalam hal budidaya bibit yang akan dikembangkan,

sehingga diharapkan nantinya pemberian bantuan bibit ke masyarakat diimbangi pula dengan adanya pelatihan budidaya komoditi perkebunan yang akan dikembangkan tersebut. Demikian halnya untuk bantuan Alat dan Mesin Perkebunan, diharapkan dalam penyampaian ke masyarakat, dapat disertai dengan pelatihan tata cara penggunaan ataupun perawatan Alat dan mesin yang dimaksud, sehingga aplikasinya dapat dirasakan optimal bagi masyarakat.

Pada Tahun 2015 Kegiatan Moniotoring, Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan di 10 kampung yaitu Kampung Bukit Makmur Jaya, Kampung Bukit Makmur, Kampung Pandan Sari, Kampung Tabalar Ulu, Kampung Karangan, Kampung Tanjung Perepat, Kampung Ampean Medang, Kampung Siduung Indah, Kampung Biatan Ilir dan Kampung Batu Rajang. Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 122.090.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah), realisasi anggaran kegiatan hanya mencapai Rp. 74.163.300,- (Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp. 47.926.700,- (Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah)

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
					FISIK	KEUANGAN (%)
13	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah dokumen data statistik komoditi unggulan perkebunan	dokumen	2	2	92,32

Data Statistik Komoditi Unggulan Perkebunan terdiri dari 2 (dua) Semester yang menggambarkan pelaksanaan tugas pokok Dinas Perkebunan Kabupaten Berau yang secara garis besar berisi data tentang hasil-hasil yang dilaksanakan dan dicapai dalam pelaksanaan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Berau pada Semester I dan Semester II tiap tahun.

Pada tahun anggaran 2017, Pagu Anggaran Kegiatan Pengolahan data Statistik Perkebunan (Pembuatan Buku Data Statistik Komoditi Unggulan) adalah sebesar Rp. 83.042.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 76.661.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) atau sebesar 92,32%.

Akibat adanya pengurangan anggaran (defisit anggaran) kegiatan pada tahun 2017, menyebabkan pagu anggaran untuk kegiatan Pengolahan data Statistik Perkebunan tahun 2017 pada DPA murni Dinas Perkebunan Kabupaten Berau hanya mencukupi untuk pembayaran honorarium petugas lapangan pengamat kebun (Manbun) untuk 13 Kecamatan, 1 (satu) petugas pengelola data Perusahaan Besar Swasta (PBS) dan honorarium petugas pengelola data dan koordinator data statistik perkebunan kabupaten, sedangkan pembuatan buku statistik komoditi unggulan tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya ketersediaan anggaran. Sedangkan adanya sisa anggaran kegiatan sebesar Rp. 6.381.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu) merupakan sisa penganggaran biaya perjalanan

dinas luar daerah yang tertuang dalam DPPA Dinas Perkebunan dalam rangka Koordinasi dan Validasi Data Statistik Perkebunan Semester I tahun 2017.

Pada tahun anggaran 2016, Pagu Anggaran untuk Kegiatan Pengolahan data Statistik Perkebunan (Pembuatan Buku Data Statistik Komoditi Unggulan) adalah sebesar Rp. 207.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 165.617.500,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 80,01% sehingga masih menyisakan sisa anggaran sebesar Rp. 41.382.500,- (Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), disebabkan adanya sisa perjalanan luar daerah dan efisiensi belanja langsung kegiatan sebesar 5%.

Pada tahun anggaran 2015, Pagu Anggaran untuk Kegiatan Pengolahan data Statistik Perkebunan (Pembuatan Buku Data Statistik Komoditi Unggulan) adalah sebesar Rp. 188.220.000,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 134.984.500,- (Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 71,72% sehingga masih menyisakan sisa anggaran sebesar Rp. 53.235.500,- (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).

Adapun sisa dana kegiatan disebabkan karena tidak dilaksanakannya kegiatan pembahasan evaluasi dan validasi data statistik perkebunan tahun 2014, disebabkan waktu pelaksanaannya bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan Musrenbang. Selain itu sisa anggaran disebabkan adanya

penyesuaian biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tertuang dalam DPA SKPD dengan standarisasi perjalanan dinas Kabupaten Berau tahun 2015.

Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan

Dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan erat kaitannya dengan isu global dalam hubungannya dengan penyebab degradasi lingkungan, terutama dalam pengembangan komoditas kelapa sawit. Dimana komoditas tersebut dianggap tidak sesuai dengan asas perkebunan berkelanjutan dan tidak ramah lingkungan karena menyebabkan berkurangnya penangkapan air dan penggunaan pupuk yang berlebihan sehingga meracuni lingkungan di areal perkebunan.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, perlu adanya sistem pengelolaan perkebunan sehingga arah pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan dapat terealisasi tanpa mengorbankan pembangunan ekonomi pada umumnya dan khususnya pengembangan subsektor perkebunan. Target Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan dalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2016-2021 adalah Jumlah Pelaku Usaha yang menerapkan prinsip ramah lingkungan yang pada tahun 2017 ditetapkan 3 pelaku usaha.

Pelaksanaan Kegiatan guna menunjang Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan yang merupakan program baru di Dinas Perkebunan Kabupaten Berau adalah pelaksanaan Sosialisasi bagi pelaku

usaha perkebunan untuk menerapkan prinsip ramah lingkungan untuk pembangunan perkebunan berkelanjutan meliputi:

- Sosialisasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) pada beberapa kampung yang rawan terjadi kebakaran
- Pendataan Sarana dan Prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun
- Pembentukan KTPA pada kampung yang rawan terjadi kebakaran
- Sosialisasi penggunaan Jamur *Trichoderma sp* sebagai Agensi Hayati, mengurangi efek penggunaan peptisida berbahan kimia, dan
- Sosialisasi Pengelolaan Limbah Cair Kelapa sawit (POME) di 7 (tujuh) Perusahaan Kelapa Sawit

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
					FISIK	KEUANGAN (%)
14	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Lahan Kebun	kali	3	3	79,32

Dalam rangka antiipasi dan kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun, Telah terbentuk Brigade/Satgas Pengendalian Kebakaran

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau pada tahun 2015, sesuai dengan Permentan Nomor 47 tahun 2014 tentang Brigade dan Pedoman pelaksanaan pencegahan serta pengendalian kebakaran lahan dan kebun juga membentuk Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) ditingkat masyarakat.

Melalui Kegiatan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun pada tahun 2017, pelaksanaan kegiatan meliputi:

- ✓ Sosialisasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) pada beberapa kampung yang rawan terjadi kebakaran, yaitu: Kampung Talisayan, Kampung Biatan Lampake, Kampung Tubaan, Kampung Sidobangen dan Kampung Muara Lesan.
- ✓ Pendataan Sarana dan Prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun pada 6 PBS yaitu: PT Natura Pasific Nusantara di Kampung Punan Malinau, PT. Mulia Inti Perkasa di Kampung Long Ayan, PT. Anugrah Agung Prima Abadi dan Global Primatama Mandiri di Kampung Merapun, PT. Tunas Alam Nusantara di Kampung Biduk-Biduk, PT. Anugrah Energi Tama di Kampung Maluang, Gunung Tabur dan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di Kampung Biatan Lampake. Namun dari hasil pendataan, diketahui masih banyak perusahaan yang belum lengkap memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun sesuai standar yang ditetapkan Direktorat Jendral Perkebunan baik secara kualitas maupun kuantitasnya.
- ✓ Pembentukan KTPA pada kampung yang rawan terjadi kebakaranyaitu Kampung Merapun Kecamatan Kelay binaan dari PT. Yudha Wahana

Abadi dan PT. Gunta Samba Jaya, Kampung Batu Putih Kecamatan Batu Putih binaan PT. Jabontara Eka Karsa, dan Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan binaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya melalui anggran APBD II Kabupaten Berau serta 1 (satu) KTPA Mandiri/Swadaya di Kampung Tubaan Kecamatan Tabalar melalui swadaya masyarakat binaan langsung kecamatan Tabalar.

Dengan pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), serapan anggaran penunjang kegiatan hanya sebesar Rp. 99.146.570,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau 79,32%, sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp. 25.853.430,- (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah).

Adanya sisa anggaran pada Kegiatan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun Rakyat tersebut disebabkan adanya sisa belanja pembelian bahan bakar minyak dan pelumas untuk mobilitas ke kampung dan sisa belanja biaya perjalanan dinas dalam daerah, dimana jumlah lunsum yang tertuang dalam DPA SKPD Tahun 2017 lebih besar dari pada standart perjalanan dinas dalam daerah sehingga pembayaran lunsum harus menyesuaikan standart yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Berau tersebut.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
					FISIK	KEUANGAN (%)
15	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan	Jumlah Luasan Lahan Yang Terkonservasi	Ha	30	30	94,49

	Perkebunan					
--	------------	--	--	--	--	--

Meningkatkan Produktifitas Lahan Pertanian Non Produktif dilaksanakan melalui Kegiatan Konservasi lahan dengan komoditas perkebunan. Pada tahun 2017, sesuai dengan penyusunan Renstra 2016-2021, terjadi pengalihan Program pada Kegiatan Konservasi Lahan dengan Komoditas Perkebunan, dari Program Peningkatan Kesejahteraan Petani menjadi Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan.

Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Lahan dengan Komoditas Perkebunan pada tahun 2017, kembali menitik beratkan pada Pengadaan Bibit Pala sebanyak 3000 pohon untuk lahan terlantar seluas 30 Hektar di Kampung Pantai Harapan Kecamatan Biduk-Biduk.

Dengan pagu anggaran kegiatan pada tahun 2017 sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), serapan anggaran untuk realisasi kegiatan adalah sebesar Rp. 165.358.950,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 94,49% sehingga Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Pada tahun anggaran 2016 Peningkatan Produktifitas Lahan Pertanian Non Produktif dititik beratkan pada komoditi Kelapa Genjah, di Kampung Biduk-Biduk, karena karakteristik kelapa genjah yang memiliki batang lurus dan tidak terlalu tinggi, serta warna buahnya yang sangat menarik dari segi estetika

sehingga sesuai untuk wilayah kampung Biduk-Biduk sebagai penunjang pariwisata. Bantuan yang diberikan ke masyarakat ditargetkan sebanyak 4000 pohon bibit Kelapa Genjah beserta penyerahan pupuk organik dan pupuk kandang. Selain itu dilaksanakan pula pendataan lahan tidur/kebun terlantar dan Kegiatan Monitoring dan evaluasi di Kampung Batu Putih, Kampung Kasai, Kampung Tanjung Batu dan Kampung Payung-Payung.

Pagu anggaran yang disediakan untuk Kegiatan Konservasi lahan dengan komoditas perkebunan pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 392.818.500,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 82,70% dan menyisakan anggaran sebesar 82.181.500,- (Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).

Adanya sisa anggaran sebesar 82.181.500,- (Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), disebabkan karena adanya efisiensi anggaran sebesar 5%. Selain itu untuk Belanja Barang yang diserahkan ke masyarakat berupa Bibit Kelapa Genjah, dengan target awal sebanyak 4000 bibit, hanya dapat direalisasikan sebanyak 2.670 bibit atau 67%, disebabkan karena dari pemesanan sebanyak 4000 bibit tersebut, hanya 2.670 bibit saja yang memenuhi syarat atau sesuai dengan spec yang telah ditentukan karena dalam proses distribusi, bibit ada yang mati selain itu

disebabkan karena ketersediaan bibit di Balitka terbatas. Jika dikonversikan dengan standart teknis dari Dirjenbun, 2.670 bibit tersebut untuk 13,09 Ha.

Pelaksanaan kegiatan Konservasi lahan dengan komoditas perkebunan pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani sejak tahun 2013 sampai tahun 2015,menitik beratkan pada Pengadaan Bibit Pala untuk lahan terlantar Kecamatan Biduk-Biduk, terdiri dari Kampung Teluk Sulaiman sebanyak 10.000 bibit pala (pada tahun 2013 dan 2014), Kampung Giring-Giring sebanyak 11.000 bibit pala (pada tahun 2013 dan 2015), Kampung Teluk Sumbang sebanyak 11.000 bibit (pada tahun 2015) dan Kampung Tanjung Perepat sebanyak 5.600 bibit (pada tahun 2014). Dengan demikian pada tahun 2015, luas lahan yang terkonservasi dengan komoditi pala adalah seluas 165 Ha.

Pagu Anggaran Kegiatan Konservasi lahan dengan komoditas perkebunan untuk tahun 2015 sebesar Rp. 905.690.000,- (Sembilan Ratus Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) pelaksanaan kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 772.400.900,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau 85,28% dan menyisakan anggaran sebesar Rp. 133.289.100 (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah).

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
					FISIK	KEUANGAN (%)
16	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah Petani Kebun yang Menggunakan Bioteknologi	Petani / Ha	50 / 5	50 / 3,9	91,08

Kegiatan Pengembangan Teknologi Bioteknologi Bidang Perkebunan merupakan Kegiatan baru yang dilaksanakan ditahun 2017 dalam Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan. Tujuan Kegiatan adalah untuk menekan penggunaan pestisida kimiawi sebagai bahan pengendali serangan hama penyakit tanaman perkebunan, selanjutnya mengganti bahan pengendaliannya dengan penggunaan Agens Pengendali Hayati dan Pestisida Nabati yang ramah lingkungan berdasarkan Konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT).

Untuk pemenuhan kebutuhan petani/pekebun dalam mengendalikan serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan (OPT), Dinas Perkebunan Kabupaten Berau melalui UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD-P2TP) di Rinding mulai mengembangkan Agens Pengendali Hayati serta Pestisida ramah lingkungan lainnya.

Dengan pagu anggaranKegiatan Pengembangan Teknologi Bioteknologi Bidang Perkebunan di tahun 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 182.156.000,- (Seratus Delapan Puluh Dua Seratus Lima Pulh Enam Ribu Rupiah) atau 91,08%.

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Teknologi Bioteknologi Bidang Perkebunan di tahun 2017 adalah:

- Pelatihan bagi petugas ke Dinas Perkebunan Sulawesi Tengah dalam rangka pembelajaran mengembangkan Biopestisida *Trichoderma* menjadi Metabolit Sekunder,
- Pelatihan pembuatan Biopestisida untuk petani di Kampung Bukit Makmur Jaya dan Kampung Biatan Ilir.
- Pengadaan belanja barang modal untuk keperluan UPTDP2TP
- Pengembangan dan perbanyakkan biopestisida berupa Jamur *Trichoderma* serta bubur bordo untuk pemenuhan permintaan petani guna pengendalian OPT.

Hasil pengembangan/perbanyakkan jamur *Trichoderma sp* selama tahun 2017, baru sebatas dalam bentuk stater dan dalam bentuk perbanyakkan dengan media bekatul, hal ini disebabkan karena terbatasnya peralatan yang ada. Hasil tersebut didistribusikan untuk mengendalikan OPT tanaman Lada, meskipun sebenarnya jamur ini memiliki spektrum yang lebih luas fungsinya dalam mengendalikan OPT.

Pendistribusian *Trichoderma sp* selama periode tahun 2017 meliputi beberapa kampung, yaitu:

- Kampung Bukit Makmur Jaya, sebanyak 42 kg dalam bentuk stater,
- Kampung Biatan Ilir, sebanyak 32 kg dalam bentuk stater,
- Kampung Manunggal Jaya sebanyak 55 kg dalam bentuk perbanyakkan dengan media bekatul,
- Kampung Tembudan sebanyak 55 kg dalam bentuk perbanyakkan dengan media bekatul,

- Kelompok Tani Tumbit Makmur sebanyak 70 kg dalam bentuk perbanyakan dengan media bekatul.

Jumlah keseluruhan yang dibagikan, dilakukan untuk pengendalian Penyakit Busuk Pangkal Batang Lada (*Phytophthora capsici*) dari total luas serangan sekitar 38 Ha di wilayah Kampung tersebut diatas (Berdasarkan laporan dari petugas data statistik Dinas Perkebunan/Manbun yang bertugas diwilayah Kampung tersebut), Namun demikian dengan keterbatasan anggaran Kegiatan dan peralatan laboratorium penunjang UPTD-P2HP, Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Teknologi Bioteknologi Bidang Perkebunan di tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan target pengendalian pada tahun 2017 seluas 5 Ha, realisasi kegiatan dapat mengendalikan 3,9 Ha.

Dengan memperhatikan masih besarnya luas serangan OPT tanaman lada maka diharapkan dukungan pemerintah kabupaten Berau terutama dalam hal penunjang sarana dan prasarana kelengkapan Laboratorium UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD-P2TP) di Rinding untuk lebih mengembangkan *Trichoderma sp.* dan Agens hayati lainnya sebagai pengendali hayati bukan hanya untuk serangan OPT pada komoditi lada, namun juga pada komoditas tanaman perkebunan lainnya.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
					FISIK	KEUANGAN (%)
17	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan	Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengolahan	PKS	7	7	82,72

	Perkebunan	Limbah Cair Kelapa Sawit (POME) di Perusahaan Kelapa Sawit (PKS)				
--	------------	--	--	--	--	--

Seiring dengan pengembangan budidaya komoditas Kelapa Sawit di Kabupaten Berau, terdapat 8 PBS yang sudah mengelola unit pabrik pengolahan Kelapa Sawit di 7 kampung dan 7 kecamatan. Hasil samping yang dihasilkan dari pengolahan CPO Kelapa Sawit salah satunya adalah Limbah cair atau *Palm Oil Mill Effluent* (POME). Limbah cair yang dihasilkan harus mengikuti standart yang sudah ditetapkan dan tidak dapat dibuang/diaplikasikan secara langsung karena akan berdampak pada pencemaran lingkungan, sehingga perlu adanya langkah untuk pengolahan limbah (effluent treatment).

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau melaksanakan sosialisasi, inventarisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi PBS yang mengelola POME secara aktif dan bijaksana sehingga dapat bermanfaat sebagai energi terbarukan, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Melalui Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Biomassa sebagai Energi Terbarukan dari Perkebunan, pada tahun 2017, dilaksanakan kegiatan Inventarisasi dan Sosialisasi Pengelolaan Limbah Cair Kelapa sawit (POME) di 7 (tujuh) Perusahaan Kelapa Sawit yaitu:

- ✓ Talisayan Mill (TSM) pada PT. Tanjung Buyu Perkasa Plantation , di Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan

- ✓ Berau Palm Oil Mill (BPOM), pad PT. Hutan Hijau Mas, di Kampung Gung Sari Kecamatan Segah
- ✓ PKS PT. Gunta Samba Jaya, di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay
- ✓ PKS PT. Yudha Wahana Abadi , di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay
- ✓ Derawan Oil Mill (DOM) pada PT. Sentosa Kalimantan Jaya di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan
- ✓ Segah Palm Oil Mill pada PT. Satu Sembilan Delapan di Kampung Tasuk Kecamatan Gunung Tabur
- ✓ Jabon Palm Oil Mill (JPOM) pada PT. Jabontara Eka Karsa di Kampung Batu Putih Kecamatan Batu Putih.

Pagu anggaran Kegiatan Fasilitas Biomassa sebagai Energi Terbarukan dari Perkebunan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), Realisasi anggaran Rp. 57.906.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah) atau 82,72%, sehingga menyisakan anggaran kegiatan sebesar Rp. 12.094.000,- (Dua Belas Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) disebabkan karena ada sisa belanja bahan bakar minyak/pelumas serta sisa perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

Program Pengendalian Hama Terpadu

Salah satu penyebab menurunnya produktivitas usaha budidaya komoditas perkebunan adalah terjadinya serangan hama dan penyakit yang

menyerang tanaman perkebunan. Sesuai UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, pelaksanaan perlindungan tanaman dilakukan dengan Sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT).

Pelaksanaan Program Pengendalian Hama Terpadu dilaksanakan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dalam bentuk pelatihan mengenai sistem PHT melalui Sekolah Lapang Penerapan Teknologi Budidaya Tepat Guna (SL-PHT) dan Brigade Proteksi Perkebunan. Target Program Pengendalian Hama Terpadu dalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2016-2021 adalah Luasan Kawasan pengendalian hama yaitu sebesar 30 Ha.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
					FISIK	KEUANGAN (%)
18	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah Brigade Proteksi Perkebunan	regu	2	2	94,75

Kegiatan Fasilitasi Brigade Proteksi Perkebunan merupakan Kegiatan baru di tahun 2017, sebagai penunjang dalam Program Pengendalian Hama Terpadu. Tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Brigade Proteksi Perkebunan adalah petani /pekebun menyadari mau dan mampu melaksanakan sistem perlindungan tanaman secara efektif, efisien dan aman sehingga diharapkan dengan kemandirian petani/pekebun dapat menangani serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan di kebunnya sejak dini.

Adapun persyaratan penentuan daerah/kampung yang mendapatkan Fasilitasi Brigade Proteksi Perkebunan adalah:

- ✓ Kampung tersebut sebelumnya telah mendapatkan pelatihan SL-PHT,
- ✓ Kampung tersebut termasuk daerah sentra produksi komoditi perkebunan,
- ✓ Bukan merupakan kampung yang berdampingan dengan perusahaan sehingga persoalan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan sepenuhnya ditangani oleh masyarakat sendiri secara mandiri.

Pada tahun 2017, Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Brigade Proteksi Perkebunan dititik beratkan pada pembentukan 2 (dua) Regu Proteksi di Kampung Pesayan dan Kampung Pijanau Kecamatan Sambaliung dengan masing masing regu proteksi terdiri dari 15 orang. Sebagai perlengkapan kegiatan pelatihan, diserahkan pula sepatu lapangan, topi dan baju kaos untuk peserta pelatihan, selain itu diserahkan pula peralatan proteksi kepada masing-masing Regu proteksi berupa 1 (satu) unit fogging dan 3 (tiga) unit Hand sprayer.

Dengan pagu anggaran kegiatan Failitasi Brigade Proteksi Perkebunan pada tahun 2017 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pelaksanaan kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 142.126.100,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Ribu Seratus Rupiah) atau 94,75%.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
					FISIK	KEUANGAN (%)
19	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah Petani/Pekebun yang menerapkan Teknologi Budidaya Tepat Guna	petani	50	50	92,75

Pada tahun 2017 Kegiatan Sekolah Lapang Penerapan Teknologi Budi Daya Tepat Guna (SL-PHT) terjadi pergeseran Program yaitu dari Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan menjadi Program Pengendalian Hama Terpadu.

Jika dianalisa Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Lapang Penerapan Teknologi Budi Daya Tepat Guna (SL-PHT) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Lapang Penerapan Teknologi Budi Daya Tepat Guna (SL-PHT) pada tahun 2017 dilaksanakan di Kampung Tumbit Dayak dan Tumbit Melayu dengan kembali dititik beratkan pada komoditi Kakaomengingat kedua Kampung tersebut merupakan sentra pengembangan komoditas kakao. Sebelumnya pada tahun 2003, Kampung Tumbit Dayak dan

Tumbit Melayu telah mendapatkan pelatihan SL-PHT Kakao, namun seiring dengan semakin rendahnya minat petani/pekebun untuk mengembangkan budidaya komoditi kakao disebabkan semakin tingginya serangan OPT tanaman kakao, maka minat masyarakat di Kampung Tumbit Dayak dan Tumbit Melayu pun ikut menurun. Oleh karena itu Dinas Perkebunan melalui Bidang Perlindungan ingin membangkitkan kembali minat masyarakat di Kampung Tumbit Dayak dan Kampung Tumbit Melayu untuk mengembangkan kembali komoditi Kakao dengan Teknologi Tepat Guna terbaru melalui SL-PHT.

Dengan pagu anggaran kegiatan Sekolah Lapang Penerapan Teknologi Budi Daya Tepat Guna (SL-PHT) pada tahun 2017 sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), serapan realisasi kegiatan adalah sebesar Rp. 139.124.100,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah) atau 92,75%, sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp. 10.875.900,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) disebabkan adanya sisa pada belanja bahan bakar minyak dan belanja perlengkapan kerja lapangan sebagai perlengkapan kegiatan SL-PHT yang diserahkan untuk peserta pelatihan.

Pada Tahun Anggaran 2016, Pagu Anggaran yang disediakan untuk Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Lapang Penerapan Teknologi Budi Daya Tepat Guna (SL-PHT) Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 440.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah). Pelaksanaan Kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 428.081.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan capaian kinerja sebesar 97,29%, sehingga menyisakan

anggaran sebesar Rp. 11.919.000,- (Sebelas Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) disebabkan karena adanya kelebihan dalam menghitung jumlah petani sehingga uang saku non pegawai (untuk petani/pekebun peserta pelatihan SL-PHT) sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) harus dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Berau. Selain itu sisa anggaran disebabkan karena adanya sisa perjalanan dinas dan juga adanya efisiensi belanja langsung sebesar 5%.

Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Lapang Penerapan Teknologi Budi Daya Tepat Guna (SL-PHT) Tahun 2016 dilaksanakan di 5 (lima) Kampung yaitu: Kampung Pилanjau, Kecamatan Sambaliung, SL-PHT Lada (1 kelas), Kampung Long Lanuk, Kecamatan Sambaliung, SL-PHT Kakao (1 kelas), Kampung Melati Jaya, Kecamatan Gunung Tabur SL-PHT Lada (1 Kelas), Kampung Merasa, Kecamatan Kelay, SL-PHT Kakao, (1 kelas), dan Kampung Batu Rajang, Kecamatan Segah, SL-PHT Kakao (1 kelas).

Pada Tahun Anggaran 2015, Pagu Anggaran yang adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Dengan Realisasi Kegiatan sebesar Rp.479.920.200,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan capaian kinerja sebesar 95,98%.

Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Lapang Penerapan Teknologi Budi Daya Tepat Guna (SL-PHT) Tahun 2015 dilaksanakan di 4 (empat) Kampung yaitu: Kampung Bukit Makmur Jaya, Kecamatan Biatan, SL-PHT Karet (1 kelas), Kampung Long Beliu, Kecamatan Kelay, SL-PHT Karet (1 kelas), Kampung

Sidobangen, Kecamatan Kelay, SL-PHT Karet(2 Kelas), danKampung Tubaan, Kecamatan Tubaan, SL-PHT Kakao, (1 kelas).

Adanya sisa penyerapan anggaran disebabkan karena adanya perbedaan penganggaran dalam penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)dalam proses pengadaan barang jasa dengan DPA SKPD Tahun Anggaran 2015. Selain itu juga adanya efisiensi/penyesuaian dalam belanja perjalanan dinas dengan standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Berau Tahun 2015, namun secara garis besar kegiatan SL-PHT Tahun Anggaran 2015 dapat dilaksanakan dengan baik.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program ini bertujuan untuk memberdayakan petani dan kelompok tani dalam mengelola bantuan pemerintah baik sarana maupun prasarana pengolahan hasil perkebunan. Selama ini, untuk meningkatkan mutu hasil produk perkebunan telah dilakukan berbagai pelatihan dan bimbingan teknis, pemberian bantuan peralatan dan berbagai fasilitas lainnya. Meskipun begitu,

masih ditemukan kendala yakni sulitnya mengorganisasi kelompok-kelompok tani agar pemanfaatan bantuan pengolahan tersebut dapat optimal.

Dengan adanya program ini diharapkan optimalisasi pemanfaatan sarana pengolahan dapat tercapai sehingga secara perlahan kelompok tani dapat mengelola sumber daya organisasi secara mandiri dan ekonomis.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
					FISIK	KEUANGAN (%)
20	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Jumlah Petani dan Pelaku Agribisnis yang dilatih	orang	30	30	81,67

Tujuan kegiatan pada intinya adalah membuka dan menanamkan pemahaman pada petani dan pelaku agribisnis tentang peran penting kelompok tani dalam membentuk kualitas sumber daya manusia untuk lebih mandiri dan mampu berkompetisi dalam usahanya sehingga mampu berdaya saing secara lebih baik melalui Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE).

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis pada tahun 2017 dilaksanakan di Kampung Pesayan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), realisasi anggaran sebesar Rp. 81.672.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) atau 81,67%, sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp. 18.328.000,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah). Adanya sisa anggaran disebabkan karena sisa belanja ATK, sisa belanja bahan bakar minyak/pelumas dan sisa belanja perjalanan dinas dalam daerah.

Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis pada tahun 2016 dapat dilaksanakan sangat baik dengan capaian kinerja sebesar 94,87%. Target kinerja adalah pelaksanaan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis untuk tahun 2016 adalah di 5 (lima) kampung yaitu Kampung Campur Sari, Kampung Eka Sapta, Kampung Biatan Lampake, Kampung Biatan Baru dan Kampung Biatan Bapinang. Dengan pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 326.560.000,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 309.792.700,- (*Tiga ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*) sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp. 16.767.300,- (*Enam Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah*). Adanya sisa anggaran tersebut disebabkan karena adanya penyesuaian biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta belanja ATK yang telah tertuang dalam DPA SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2016 dengan Standarisasi Perjalanan Dinas Kabupaten Berau Tahun 2016, selain itu sisa anggaran disebabkan pula karena adanya efisiensi anggaran belanja langsung sebesar 5% pada triwulan III dan IV untuk semua kegiatan di tahun anggaran 2016.

Pada Tahun Anggaran 2015, Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis dilaksanakan di 6 (Enam) Kampung (180 orang peserta pelatihan/petani pekebun), yaitu Kampung Tembudan, Bukit Makmur Jaya, Tubaan, Kasai, Merancang Ilir dan Kayu Indah. Kampung Kayu Indah adalah realisasi pelatihan yang tidak dapat dilaksanakan di tahun 2014 karena terkendala biaya transportasi dan akomodasi bagi

narasumber/pemandu. Dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.350.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 251.151.550,- (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*) atau 71,76% yang menyisakan dana sebesar Rp. 98.848.450,- (*Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Adanya sisa anggaran sebesar Rp. 98.848.450,- (*Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*) disebabkan karena adanya penyesuaian biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang telah tertuang dalam DPA SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2015 dengan Standarisasi Perjalanan Dinas Kabupaten Berau Tahun 2015.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
					FISIK	KEUANGAN (%)
21	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Jumlah Kelompok Tani (Gapoktan) / Asosiasi yang dibina	Kelompok Tani	5	5	83,98

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani merupakan pengalihan dari Kegiatan Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi petani/kelompok tani, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan indicator kinerja jumlah Kelompok Tani (Gapoktan)/Asosiasi yang dibina.

Pada tahun 2017, Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dititik beratkan pada Pembinaan Penguatan Gapoktan Perkebunan di enam kampung yaitu:

- Kampung Sumber Agung, Gapoktan Ladang Sari, Ketua Ahmad Radi, terdiri dari 4 Kelompok Tani,
- Kampung Ampean Medang, Gapoktan Kapitan Bara, Ketua Kadri Ansyah, terdiri dari 4 Kelompok Tani,
- Kampung Dumaring, Gapoktan Karya Mandiri, Ketua Lukas Laga, terdiri dari 4 Kelompok Tani
- Kampung Pantai Harapan, Gapoktan Bumi Baru, Ketua Irwan, terdiri dari 6 Kelompok Tani
- Kampung Pesayan, terdiri dari 4 Kelompok Tani
- Kampung Tumbit Melayu, Gapoktan Karya Bakti, Ketua Rukiman, terdiri dari 15 Kelompok Tani.

Dengan pagu anggaran Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani pada tahun 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), realisasi anggaran sebesar Rp. 41.990.800,- (Empat puluh satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 83,98%, sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp. 8.009.200,- (Delapan Juta Sembilan Ribu

Dua Ratus Rupiah). Adanya sisa anggaran disebabkan karena sisa belanja BBM dan sisa perjalanan luar daerah.

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi petani/kelompok tani pada tahun 2016 menitik beratkan pada pelaksanaan kegiatan pelatihan/pembekalan pengelolaan koperasi plasma dan pembinaan penguatan kelompok tani perkebunan, selain itu dilaksanakan cros cek / kesesuaian data kelompok tani / Gapoktan dari Badan Ketahanan Pangan, pada tahun 2016 target pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di 16 (enam belas) Kampung, namun karena adanya penyesuaian anggaran maka realisasi pelaksanaan kegiatan hanya dapat dilaksanakan di 7 (tujuh) kampung.

Anggaran yang disediakan untuk Kegiatan Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi petani/kelompok tani pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 237.150.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 223.097.359,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau 94,07% sehingga menyisakan dana sebesar Rp. 14.052.641,- (Empat Belas Juta Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), disebabkan karena efisiensi anggaran belanja langsung sebesar 5% dan sisa sewa mobilitas dalam daerah untuk perjalanan dinas ke kampung dalam rangka pembinaan penguatan kelompok tani perkebunan.

Kegiatan Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi petani/kelompok tani pada tahun 2015 disediakan anggaran sebesar Rp. 243.640.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh

Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 187.503.400,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 76,96% sehingga menyisakan dana sebesar Rp. 56.136.600,- (Lima Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah)

Adanya sisa anggaran sebesar Rp. 56.136.600,- (Lima Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) disebabkan karena adanya penyesuaian biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang telah tertuang dalam DPA SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2015 dengan Standarisasi Perjalanan Dinas Kabupaten Berau Tahun 2015.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
					FISIK	KEUANGAN (%)
22	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Luas Kebun Kemitraan yang terbangun	Ha	300	397,14	85,85

Terwujudnya kesepakatan kerjasama kemitraan antara masyarakat dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) merupakan sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Berau untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pekebun dengan indicator kinerja tersusunnya naskah kesepakatan kerjasama kemitraan yang tertuang dalam Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan, Pembangunan Kebun Petani Kemitraan oleh PBS Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Berdasarkan Renstra awal Dinas Perkebunan Tahun 2016-2021, Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan, Pembangunan Kebun Petani Kemitraan oleh PBS pada tahun 2017, menetapkan target terwujudnya

kesepakatan kerjasama kemitraan antara masyarakat dan PBS dalam bentuk Luas Kebun kemitraan yang terbangun seluas 1000 Ha dengan dukungan anggaran yang ditargetkan dalam Renstra sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Namun akibat adanya devisa anggaran, pagu anggaran yang disediakan untuk Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan, Pembangunan Kebun Petani Kemitraan oleh PBS pada tahun 2017 hanya sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga target yang telah ditetapkan menyesuaikan anggaran yang tersedia yaitu sebesar 300 Ha. Serapan anggaran sebesar Rp. 64.385.942,- (Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) atau 85,85% sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp. 10.614.058 (Sepuluh Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah).

Realisasi pelaksanaan kegiatan adalah terbangunnya luas kebun kemitraan sebesar 397,14 Ha di Koperasi Tam'an Jaya (PT. Mulia Inti Perkasa) Kampung Long Ayan, Koperasi Tunas Muda (PT. Berau Karetindo Lestari) Kampung Long Ayan, Koperasi Daba Juna'di (PT. Global Primatama Mandiri) Kampung Merapun, dan Koperasi Bina Sejahtera (PT. Buana Mudantara) Kampung Biatan Bapinang.

Adanya sisa anggaran kegiatan disebabkan karena tidak dapat direalisasikan honor bendahara pengeluaran pembantu karena telah direalisasikan di kegiatan lain. Selain itu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan, Pembangunan Kebun

Petani Kemitraan oleh PBS adalah keterbatasan kendaraan dinas untuk mobilitas jalannya kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemitraan antara masyarakat dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS) pada tahun 2016, target yang ditetapkan adalah terwujudnya kesepakatan kerjasama kemitraan antara masyarakat dan PBS sebanyak 5 kesepakatan (MoU) dengan melakukan pembinaan kemitraan antara PBS dan masyarakat di Kampung Dumaring, Sumber Agung, Ampean Medang, Tembudan, Tanjung Perepat, Biatan Lampake, Tepian Buah, Batu Putih dan Lobang Klatak.

Kesepakatan yang terwujud (MoU) yang dapat direalisasikan adalah 1 (satu) Kesepakatan/MoU yaitu antara PT. Tunas Alam Nusantara dengan Koperasi Tanjung Perepat Harapan di Kampung Tanjung Perepat, sedangkan untuk kesepakatan di Kampung Ampean Medang dengan PT. Inti Energi Kaltim, Koperasi Kampung Tembudan dengan PT. Jabontara Eka Karsa, Koperasi Kampung Dumaring dengan PT. Kukar Commodities Worlwide dan Koperasi Kampung Lobang Klatak dengan PT. Jabontara Eka Karsa masih dalam penyelesaian terkait kepastian jumlah petani peserta plasma dan luas areal yang telah dialokasikan untuk plasma terkait kepastian kelayakan tanamnya, sedangkan untuk Koperasi Kampung yang telah terwujud kesepakatan kerjasama kemitraan dengan PBS, dilakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kebunnya agar pembangunan kebun plasma/kemitraan sesuai dengan standar teknis pembangunan kebun menurut ketentuan yang berlaku.

Dengan Pagu Anggaran Kegiatan Pembinaan Kemitraan antara masyarakat dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS) Tahun 2016 sebesar Rp. 186.050.000,- (Seratus Delapn Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), realisasi Kegiatan mencapai Rp. 140.553.320,- (Seratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) atau 75,55% sehingga menyisakan dana sebesar Rp. 45.496.680,- (EmpatPuluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Pagu Anggaran Kegiatan Pembinaan Kemitraan antara masyarakat dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS) Tahun 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), realisasi Kegiatan mencapai Rp. 154.262.030,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Rupiah) atau 77,13% sehingga menyisakan dana sebesar Rp. 45.737.970,- (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) disebabkan karena adanya penyesuaian biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tertuang dalam DPA SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2015 dengan standarisasi perjalanan Dinas Kabupaten Berau Tahun 2015.

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) petani bertujuan untuk membekali setiap individu pertanian khususnya subsektor perkebunan dalam melakukan budidaya dan pengolahan komoditi perkebunan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk mencapai keberhasilan pekebun dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupannya, maka dilaksanakan melalui program pemberdayaan penyuluh pertanian/pekebun lapangan dengan kegiatan berupa: Peningkatan Penyediaan bahan-bahan pelaksanaan metodologi sarana dan prasarana penyuluhan, Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan, dan Peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan penyuluhan.

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan dilaksanakan sebagai Program baru yang dilaksanakan pada tahun 2017 oleh OPD Dinas Perkebunan Kabupaten Berau sebagai pengalihan dari Badan Ketahanan Pangan (Dinas Pangan Kabupaten Berau) sesuai adanya perubahan struktur Dinas Perkebunan dari 3 bidang (Tipe B) menjadi 4 bidang (Tipe A) dengan penambahan 1 (satu) bidang yaitu Bidang Penyuluhan dalam arti luas yaitu meliputi penyuluhan pertanian, peternakan dan perkebunan.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
					FISIK	KEUANGAN (%)
23	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Terlaksananya Kaji Terap Teknologi Pertanian	demplot	3	4	73,45

Kegiatan Penyediaan Bahan-bahan pelaksanaan metodologi Sarana dan Prasarana Penyuluhan merupakan kegiatan yang bertujuan Mempercepat penyebaran informasi paket teknologi pertanian/perkebunan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani/pekebun dalam usaha budidaya tanaman perkebunan dengan menerapkan teknologi anjuran budidaya melalui pelaksanaan Demplot.

Target pelaksanaan Demplot pada tahun 2017 ditujukan pada 3 (Tiga) Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah), akan tetapi realisasinya mampu menyelesaikan 4 (empat) kegiatan Demplot yaitu:

- Demplot budidaya cabai keriting, di Kampung Campur Sari Kecamatan Talisayan
- Demplot Budidaya Cabai Tiung, di Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah
- Demplot Padi Sawah Non Organik Sistem Jajar Legowo 4.1 di Kampung Sei Bebanir Kecamatan Sambaliung
- Demplot Padi sawah organik sistem Jajar legowo 4.1 di Kampung Tasuk Kecamatan Gunung Tabur.

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bahan-bahan pelaksanaan metodologi Sarana dan Prasarana Penyuluhan menyerap anggaran sebesar Rp. 73.934.682,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) atau 73,45%.

Alokasi anggaran demplot sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dirasakan tidak mencukupi apabila digunakan untuk membiayai Demplot budidaya tanaman perkebunan, sehingga demplot yang dilaksanakan di tahun 2017 disesuaikan dengan alokasi anggaran yaitu demplot komoditi pertanian.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
					FISIK	KEUANGAN (%)
24	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Peningkatan Kapasitas Penyuluh	Orang	25	4	10,76

Pada tahun 2017, seiring perubahan struktur organisasi Dinas Perkebunan, dengan adanya penambahan Bidang Penyuluhan, yang merupakan pengalihan dari Badan Ketahanan Pangan, maka target yang ditetapkan pada Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan adalah melakukan Pembinaan dan Supervisi Penyuluh sebanyak 25 orang yang tersebar di wilayah Biduk-Biduk, Batu Putih, Talisayan, Biatan Lampake, Tabalar, Sambaliung, Teluk Bayur, Gunung Tabur, Tanjung Batu, Kelay dan Segah.

Namun pelaksanaan perubahan struktur Penyuluhan belum disertai dengan adanya kejelasan status legalitas pembentukan Balai Penyuluhan Kecamatan sebagaimana saat di Badan Ketahanan Pangan, dimana kedudukan kepala BPP berada di Dinas Pangan, Penyuluh ASN berada di

Dinas Perkebunan dan Penyuluh Tenaga Harian Lepas (THL) berada di Dinas Pertanian dan Peternakan sedangkan kepala BPP sebagai koordinator penyuluh berada di Dinas Pangan. Dalam struktur Penyuluhan, Kepala BPP merupakan koordinator pelaksana penyuluhan di wilayah binaannya sehingga dengan adanya pemisahan tersebut mempersulit proses koordinasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan.

Selain dari sebab diatas, kurangnya sarana mobilitas untuk operasional pelaksanaan kegiatan menyebabkan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan melalui Kegiatan Pembinaan dan Supervisi Penyuluh tidak dapat dilaksanakan.

Pagu anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan tahun 2017 adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), realisasi penyerapan anggaran hanya sebesar Rp. 10.762.100,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) atau 10,76%. Serapan anggaran dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan tersebut adalah dalam rangka mengikuti Penas-KTNA di Provinsi Aceh.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
					FISIK	KEUANGAN (%)
25	Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Peningkatan Sarana dan Prasarana	BPP	2	2	48,55

		Penyuluhan				
--	--	------------	--	--	--	--

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan pada tahun 2017, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dititik beratkan pada pengadaan sarana dan prasarana Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) meliputi:

- ❖ Belanja Modal pengadaan meja kerja dan kursi kerja pejabat BPP di BPK Gunung Tabur dan Segah.
- ❖ Belanja Modal pengadaan lemari arsip untuk BPK Talisayan,
- ❖ Belanja Pengadaan Konsultan Perencanaan Bangunan Kantor untuk BPK Batu Putih dan BPK Teluk Bayur,
- ❖ Belanja Modal untuk Pengadaan Sumur Bor Kantor BPK Kecamatan Segah.

Realisasi anggaran yang terserap untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan hanya sebesar Rp. 48.546.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) atau 48,55%, sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp. 51.454.000,- (Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).

Adanya sisa anggaran kegiatan disebabkan:

- ❖ Pengadaan Konsultan Perencanaan Bangunan Kantor untuk BPK Batu Putih dan BPK Teluk Bayur tidak dapat dilaksanakan karena ketidak jelasan pengadaan fisik bangunan Kantor BPK Batu Putih dan BPK Teluk Bayur.

- ❖ Pengadaan Sumur Bor Kantor BPK Kecamatan Segah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi kontur tanah yang cukup keras sehingga peralatan sumur bor tidak dapat menembus tanah.

B. REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2018, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPPA-SKPD) mendapat Alokasi Dana sebesar Rp. 10.742.968.002,- dengan rinciannya, terdiri dari :

1. Belanja Tak Langsung	=	Rp.	6.581.579.002,00
- Belanja Pegawai	=	Rp.	6.581.579.002,00
2. Belanja Langsung	=	Rp.	4.161.389.000,00
- Belanja Pegawai	=	Rp.	586.394.000,00
- Belanja Barang dan Jasa	=	Rp.	3.158.925.000,00
- Belanja Modal	=	Rp.	56.070.000,00
Total (1+2)	=	Rp.	10.742.968.002,00

Sampai Tanggal 31 Desember 2018 Pagu Dana sebesar Rp. 10.742.968.002,- direalisasikan sebesar Rp. 9.663.995.994,- atau 89,95%. Sehingga ada sisa dana yang disetorkan ke Kas Daerah melalui Dinas PPKK Kabupaten Berau sebesar Rp. 1.078.972.008,- atau 10,05%.

Adapun rincian Penggunaan Alokasi Dana tersebut, dapat dilihat pada Tabel 9 dan Tabel 10 sebagai berikut :

TABEL 6
BELANJA TIDAK LANGSUNG DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REKEN ING	URAIAN	ANGGARAN (DPPA-SKPD) (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	SISA ANGGARAN (DPPA-SKPD) (Rp)
5.1.1	BELANJA PEGAWAI				
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.849.200.000,00	2.489.835.000,00	87,39	359.365.000,00
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	3.732.379.002,00	3.445.334.609,00	92,31	287.044.393,00
TOTAL		6.581.579.002,00	5.935.169.609,00		

Sumber Data : Subbagian Keuangan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

TABEL 7
BELANJA LANGSUNG DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (DPPA-SKPD) (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	SISA ANGGARAN (DPPA- SKPD) (Rp)
I	PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000	1,499,000	99.93	1,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA, dan Listrik	150,000,000	121,444,201	80.96	28,555,799
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	169,000,000	107,602,414	63.67	61,397,586
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	113,818,000	111,443,000	97.91	2,375,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10,000,000	9,758,000	97.58	242,000
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15,000,000	14,014,000	93.43	986,000
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	20,000,000	19,910,200	99.55	89,800
8	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	20,000,000	15,636,500	78.18	4,363,500
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	4,913,000	98.26	87,000
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36,070,000	35,570,000	0.00	500,000
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	6,102,000	6,091,200	99.82	10,800
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	35,000,000	31,759,100	90.74	3,240,900
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	245,000,000	242,182,740	98.85	2,817,260
14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	75,000,000	64,446,508	85.93	10,553,492
15	Penyediaan Jasa Administrasi /Teknis Perkantoran	170,436,000	169,271,820	99.32	1,164,180
JUMLAH (I)		1,071,926,000	955,541,683	89.14	116,384,317

II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	31.000.000	25.379.000	81,87	5.621.000
JUMLAH (II)		31.000.000	25.379.000	81,87	5.621.000
III	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	5.000.000	3.455.000	69,10	1.545.000
JUMLAH (IV)		5.000.000	3.455.000	69,10	1.545.000
IV	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI				
1	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	100.000.000	81.672.000	81,67	18.328.000
2	Peningkatan kemampuan lembaga petani	50.000.000	41.990.800	83,98	8.009.200
3	Pengawalan dan pembinaan, pembangunan kebun petani kemitraan oleh PBS	75.000.000	64.385.942	85,85	10.614.058
JUMLAH (V)		225.000.000	188.048.742	83,58	36.951.258
V	PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN				
1	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	500.000.000	394.237.400	78,85	105.762.600
2	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	100.000.000	90.562.676	90,56	9.437.324
3	Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	100.000.000	75.434.300	75,43	24.565.700
4	Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam	100.000.000	67.857.000	67,86	32.143.000
JUMLAH (V)		800.000.000	628.091.376	78,51	171.908.624

VI	PENINGKATAN MUTU HASIL PERKEBUNAN				
1	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna	300.000.000	259.425.314	86,48	40.574.686
2	Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	95.000.000	30.650.375	32,26	64.349.625
3	Pembinaan Pasca Panen	650.000.000	233.344.139	35,90	416.655.861
JUMLAH (VI)		1.045.000.000	523.419.828	50,09	521.580.172
VII	PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN				
1	Pengendalian dan perlindungan tanaman perkebunan	90.000.000	72.934.682	81,04	17.065.318
2	Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Besar	120.000.000	107.205.299	89,34	12.794.701
3	Fasilitasi Pembibitan Komoditas Unggulan	235.000.000	201.870.320	85,90	33.129.680
JUMLAH (VII)		445.000.000	382.010.301	85,85	62.989.699
VIII	PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN				
1	Peningkatan penyediaan bahan-bahan pelaksanaan Metedologi Sarana dan Prasarana Penyuluhan	100.000.000	73.452.800	73,45	26.547.200
2	Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan	100.000.000	10.762.100	10,76	89.237.900
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluh	100.000.000	48.546.000	48,55	51.454.000
JUMLAH (VIII)		300.000.000	132.760.900	44,25	167.239.100

IX	PENGEMBANAGAN PERENCANAAN PERKEBUNAN				
1	Konsolidasi pembangunan perkebunan	50.000.000	43.717.300	87,43	6.282.700
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	50.000.000	37.758.150	75,52	12.241.850
3	Pengolahan data statistik perkebunan (Pembuatan Buku Statistik Komoditi Unggulan)	83.042.000	76.661.000	92,32	6.381.000
JUMLAH (IX)		183.042.000	158.136.450	86,39	24.905.550
X	PEMBINAAN PERKEBUNAN RAMAH LINGKUNGAN				
1	Pengendalian Kebakaran Lahan Kebun Rakyat	125.000.000	99.145.570	79,32	25.854.430
2	Konservasi Lahan dengan Komoditas Perkebunan	175.000.000	165.358.950	94,49	9.641.050
3	Pengembangan Teknologi Bioteknologi Bidang Perkebunan	200.000.000	182.156.000	91,08	17.844.000
4	Fasilitasi Biomassa sebagai Energi terbarukan dari Perkebunan	70.000.000	57.906.000	82,72	12.094.000
JUMLAH (IX)		570.000.000	504.566.520	88,52	65.433.480
XI	PENGENDALIAN HAMA TERPADU				
1	Fasilitasi Brigade Proteksi Perkebunan	150.000.000	142.126.100	94,75	7.873.900
2	Sekolah Lapang Penerapan Teknologi Budi Daya Tepat Guna (SL-PHT)	150.000.000	139.124.100	92,75	10.875.900
JUMLAH (XI)		300.000.000	281.250.200	93,75	18.749.800
XII	PENGEMBANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN				
1	Pembuatan Kebun Bibit Desa (DBH-DR)	23.897.500.000	0	0,00	23.897.500.000
2	Pengembangan Perbenihan Karet (DBH-DR)	5.500.000.000	0	0,00	5.500.000.000
JUMLAH (XII)		29.697.500.000	281.250.200	0,95	29.416.249.800
TOTAL (I S/D XII)		34.300.111.000	3.743.177.984	10,91	30.556.933.016
Sumber Data : Subbagian Keuangan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau					

1. Analisis Akuntabilitas Kinerja SKPD Dinas Perkebunan

Memperhatikan Hasil Evaluasi Kinerja SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017, yaitu DPPA-SKPD untuk Belanja Tidak Langsung berupa Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Berau tersedia Dana sebesar Rp.9.672.960.000,- dengan tingkat Prosentase Capaian Kinerja 93%. Kemudian untuk Belanja Langsung Dinas Perkebunan dengan 12 (Dua Belas) Program dan 43 (Empat puluh tiga) kegiatan disediakan dana sebesar Rp.12.082.569.000,- dengan prosentase Capaian Kinerja mencapai hanya 91,44%.

Hasil Evaluasi Kinerja SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung total mencapai Rp. 43.973.071.000,- dengan realisasi Capaian Kinerja sebesar Rp. 12.514.991.463,- atau 28,46 %.

Jika kita memperhatikan Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD Dinas Perkebunan Tahun 2017 dari 2 Sasaran dan 25 Indikator Kinerja. Maka, tidak semua sasaran yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan dengan baik, adanya kendala atau permasalahan tersebut dapat diketahui sebagaimana penjelasan yang tertuang dalam analisa capaian kinerja indikator.

Namun secara umum dimana 12 Program dan 43 Kegiatan tersebut, berdasarkan Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, bahwa ada beberapa faktor penghambatnya, yaitu :

1. Adanya perubahan struktur organisasi Dinas Perkebunan, dengan adanya penambahan Bidang Penyuluhan, yang merupakan pengalihan dari Badan Ketahanan Pangan, Namun pelaksanaan perubahan struktur Penyuluhan tidak ditempatkan dalam satu kesatuan OPD sebagaimana saat di Badan Ketahanan Pangan, dimana kedudukan kepala BPP berada di Dinas Pangan, Penyuluh ASN berada di Dinas Perkebunan dan Penyuluh Tenaga Harian Lepas (THL) berada di Dinas Pertanian dan Peternakan. Dalam struktur Penyuluhan, Kepala BPP merupakan koordinator pelaksana penyuluhan di wilayah binaannya sehingga dengan adanya pemisahan tersebut mempersulit proses koordinasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan.
2. Adanya keterbatasan operasional kendaraan dinas sebagai penunjang perjalanan dinas dalam daerah, sehingga terhambatnya pelaksanaan kegiatan yang telah terjadwal.
3. Kurang tepatnya penentuan penganggaran mesin pengolahan *Rubber creep*, sehingga menyebabkan penganggaran yang kurang efisien.
4. Kurangnya informasi dalam menentukan persyaratan pelaksanaan kegiatan Sertifikasi bibit unggul pada proses pembentukan sumber benih/kebun induk komoditi lada di Kampung Pesayan sehingga dinyatakan tidak layak secara teknis oleh Tim Penilai Sertifikasi bibit

unggulan Pertanian/Perkebunan dari Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat serta Direktorat Jendral Perkebunan.

5. Adanya penambahan anggaran pada Program Pengembangan Pertanian/Perkebunan sebesar Rp. 29.397.500.000,- melalui Kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Desa (DBH-DR) dan Pengembangan Pembenihan Karet (DBH-DR), Namun tidak dapat dilaksanakan karena dana tersebut hanya diperuntukkan untuk kegiatan pengembangan kehutanan sehingga menyebabkan rendahnya persentase penyerapan anggaran.

Berdasarkan point 1 s/d 5 inilah yang merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017, sehingga mempengaruhi Kinerja SKPD Dinas Perkebunan.

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut, maka perlu dilakukan pemecahan persoalan sehingga kedepan tidak ada lagi faktor-faktor penghambat tersebut. Diantaranya sebagai berikut :

1. Perlu adanya kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Berau, mengenai keberadaan Bidang Penyuluhan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tenaga penyuluh/pendamping petani/pekebun Kabupaten Berau.
2. Perlu adanya pengaturan penjadwalan penggunaan mobil dinas sebagai sarana mobilitas darat perjalanan dinas dalam daerah serta perlu adanya penambahan kendaraan operasional lapangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan.

3. Perlu adanya survey harga pasar sebelum penentuan besarnya penganggaran untuk menentukan kisaran harga batang/mesin sehingga tidak terlalu selisih perbedaan harga dengan pasaran.
4. Perlu adanya koordinasi antara Pejabat Pelaksana Kegiatan dengan instansi terkait baik (Dirjenbun dan Balitro sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikasi maupun Dinas Perkebunan Provinsi, dalam hal persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhi agar proses sertifikasi dapat dilaksanakan di tahun selanjutnya.
5. Perlu adanya pengarahan dari Depatemen terkait (Depatemen Kehutanan) tentang kajian teknis yang berhubungan dengan penggunaan dana tersebut, karena sampai saat ini petunjuk teknis penggunaan dana tersebut di Kementrian/Depatemen terkait belum turun.

BAB IV

P E N U T U P

Kesimpulan

Penyusunan LAKIP Tahun 2017 ini masih belum sepenuhnya sempurna, hal ini tercermin dari Kondisi sebagai berikut :

1. Belum ada Benchhmarking yang jelas untuk kegiatan – kegiatan yang bisa di bandingkan dengan Instansi sejenis di Pemerintah Kabupaten Berau. Hal ini akan terbaiki di masa-masa yang akan datang dengan cara study banding dengan instansi Pemerintah lain yang sejenis, sehingga menghasilkan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan;
2. Beberapa Elemen Indikator Input seperti SDM, Sarana dan Prasarana masih belum terinci dengan jelas, sehingga masih belum informatif bagi yang membacanya. Untuk yang akan datang hal ini hendaknya dijadikan perhatian;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Perkebunan Kabupaten Berau ini diharapkan dapat memacu Pelaksanaan CLEAN GOVERMENT dalam rangka mewujudkan GOOD GOVERMENT, sehingga kedepan akan terwujud sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan atau Akuntabel secara transparansi, kemudian menjadi umpan balik bagi Stake Holder.

Akhirnya berkat kerja keras serta dukungan penuh oleh Bidang-bidang dan terlebih lagi dukungan Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) terhadap Subbagian Penyusunan Program, maka Laporan Akuntabilitas KINerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Berau ini dapat disusun sekalipun agak terlambat dari batas waktu yang telah ditetapkan oleh Bagian Ortal Setda Kabupaten Berau, dengan harapan dapat dipergunakan sebagai bentuk Transparansi terhadap masyarakat. Terima Kasih.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dalam pelaksanaan peran Dinas Perkebunan sebagai koordinator pelaksanaan teknis pada pembangunan subsektor perkebunan, setiap potensi baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam sebagai pendukung utama subsektor perkebunan perlu ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas terutama dalam hal penerapan teknologi terhadap teknis perkebunan. . Di samping itu, Dinas Perkebunan terus melakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dengan anggaran yang ditujukan untuk pembangunan subsektor perkebunan melalui peningkatan sinkronisasi antara sasaran dalam dokumen rencana strategis dengan penganggaran setiap program/kegiatan.

Secara umum, untuk mengetahui setiap permasalahan yang mengiringi proses pembangunan subsektor perkebunan maka perlu dilakukan suatu kajian dan analisis terhadap hambatan, tantangan, hingga isu-isu strategis baik yang memiliki efek positif maupun negatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan. Dari telaahan permasalahan yang telah dikaji dan dianalisis, maka dapat disusun suatu tujuan sasaran pembangunan yang berujung pada perumusan visi dan misi dari Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Berau.

B. Tugas dan Fungsi

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau, yang membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian untuk membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang perkebunan, maka disusunlah Peraturan Bupati Berau Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Berau yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pertanian pada sektor perkebunan. Seiring perjalanan waktu Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 kembali diubah dan digantikan dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Berau. Hal ini dilakukan karena terjadi perubahan struktur pada Dinas Perkebunan Kabupaten Berau. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

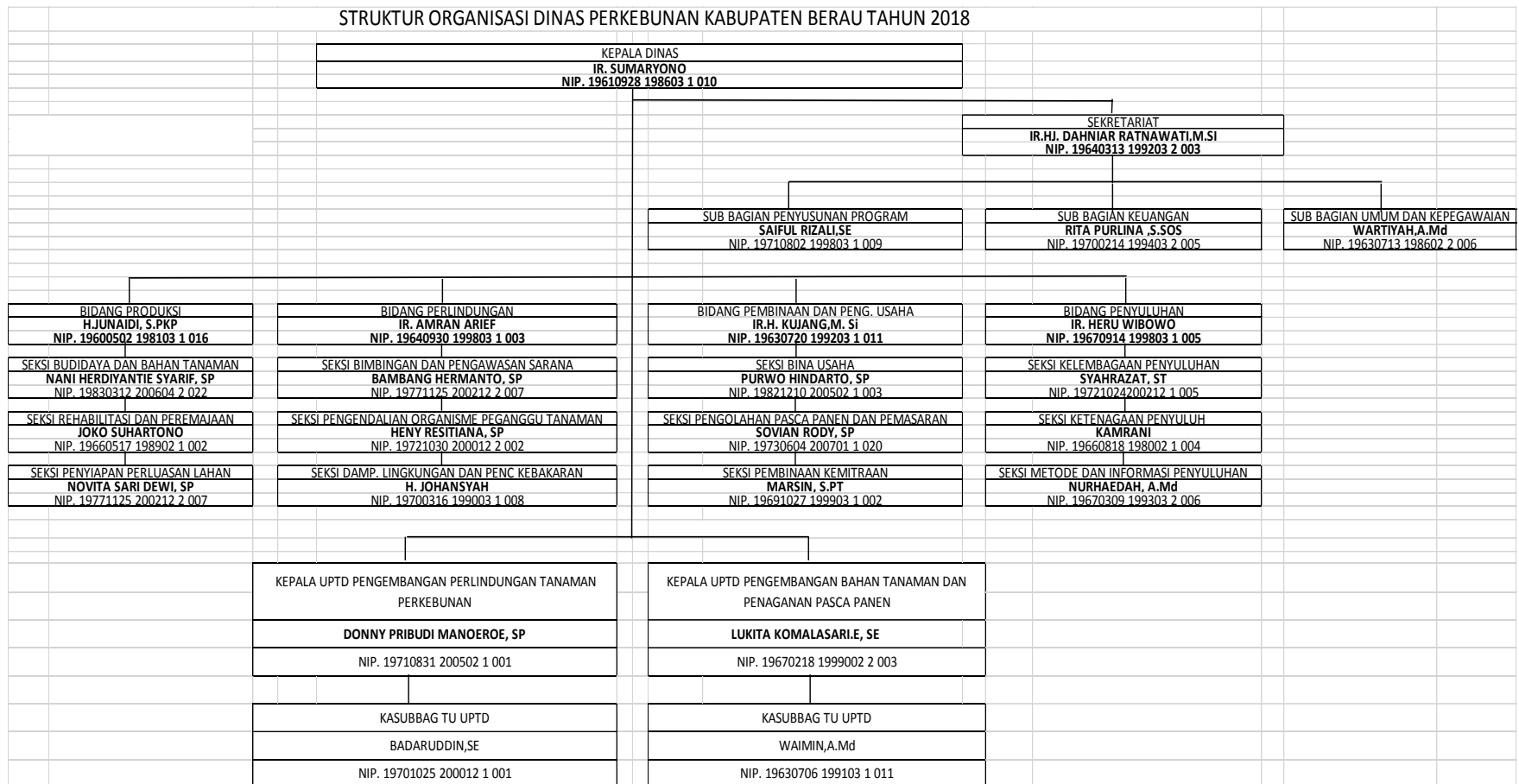
C. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Produksi, membawahi :
 - 1. Seksi Budidaya dan Bahan Tanaman
 - 2. Seksi Rehabilitasi dan Peremajaan
 - 3. Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan
- d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha, membawahi :
 - 1. Seksi Bina Usaha
 - 2. Seksi Pengolahan Pasca Panen dan Pemasaran
 - 3. Seksi Pembinaan Kemitraan

- e. Bidang Perlindungan Perkebunan, membawahi :
 - 1. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Sarana Perlindungan Perkebunan
 - 2. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
 - 3. Seksi Dampak Lingkungan dan Pencegahan Kebakaran
- f. Bidang Penyuluhan yang selanjutnya menjadi Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan
 - 1. Seksi Kelembagaan Perkebunan
 - 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 3. Seksi Fasilitasi Permodalan
- g. UPTD
 - 1. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD-P2TP) di Rinding
 - 2. UPTD Pengembangan Bahan Tanaman dan Penanganan Pasca Panen (UPTD-PBTP3) di Tumbit Melayu.

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK) DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BERAU PER 31 DESEMBER 2018



Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

BAB I - Pendahuluan

D. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, secara umum menyampaikan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum ber peradaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan Unsur Aparatur Negara yang bertugas sebagai Abdi Masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan pegawai negeri yang profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan, serta bersih KKN. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan Aparatur Negara khususnya Pegawai Negeri.

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan perkebunan khususnya Sumber daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Berikut ini rekapitulasi data mengenai Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau sampai dengan 31 Desember 2018:

Tabel 2

**SUMBER DAYA APARATUR DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BERAU**

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1		1					1				
Sekretaris		1	1				1					
Kepala Bidang	3		3				1	2				
Kasubbag	1	2		3				2	1			
Kasi	11	5		16				11	3	2		
Staf	17	13		18	11	1	1	9	6	13	1	
Honor	9	3						5	2	4		1
<i>Jumlah</i>	42	24	5	37	11	1	3	30	12	19	1	1

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

E. Aspek Strategis Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dalam perumusan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, Dinas Perkebunan sebagai unsur staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan di bidang perkebunan berdasarkan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, Dinas Perkebunan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerja sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan “GOOD GOVERNANCE”. Dalam lima tahun kedepan, Dinas Perkebunan memprioritaskan pada peningkatan Kapasitas, Kecepatan dan Mutu Pelayanan serta merumuskan Kebijakan dan Koordinasi di bidang Pembangunan Perkebunan. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil program pembangunan perkebunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis Internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang Dinas Perkebunan

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian strategis pembangunan perkebunan, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun

penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh Insan Dinas Perkebunan terus dipacu mengingat produk yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur pelaksanaannya.

Terlaksananya kebijakan teknis pembangunan bidang perkebunan yang dapat mewujudkan pelayanan umum di bidang perkebunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Dinas Perkebunan mampu memberikan pelayanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan, penerapan teknologi, pemasaran hasil produksi dan peningkatan produksi. Dinas Perkebunan akan terus melakukan segala upaya untuk menjamin tidak saja berdaya guna dan berhasil guna bagi penentu kebijakan juga dapat dimanfaatkan oleh Stakeholders.

Dasar utama penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, namun tidak berarti setiap penanganan urusan daerah harus dibentuk dalam suatu organisasi sendiri. Besaran organisasi perangkat daerah harus mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa faktor, yaitu :

1. Kemampuan keuangan daerah ;
2. Kebutuhan daerah dan ketersediaan SDA;
3. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan;
4. Jenis dan banyaknya tugas;
5. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis;
6. Jumlah kepadatan pendudukan, dan;

7. Potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tugas;

Dari cakupan berbagai faktor diatas diharapkan Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah menganut prinsip “Hemat Struktur dan Kaya Fungsi” yang berarti bahwa walaupun Struktur Organisasi Minimal namun secara fungsional dapat melaksanakan tugas secara maksimal.

F. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Isu strategis merupakan permasalahan pokok maupun tantangan yang berkaitan dengan fenomena global baik regional, nasional, maupun internasional baik yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya maupun situasi baru yang muncul akibat perubahan era. Fenomena dalam isu strategis tersebut memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga perlu diantisipasi dan diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan subsektor perkebunan oleh Dinas Perkebunan, meliputi:

1. Pembangunan Sejuta Hektar Kelapa Sawit Tahap Kedua

Dalam isu strategis terkait perluasan areal tanam komoditas kelapa sawit, telah ditetapkan program “pembangunan perkebunan sejuta hektar kelapa sawit” pada perencanaan pembangunan subsektor perkebunan periode sebelumnya. Pada periode kali ini, sebagai lanjutan periode sebelumnya akan

dilaksanakan pembangunan sejuta hektar perkebunan kelapa sawit tahap kedua yang merupakan:

1. Keberlanjutan dari program pembangunan perkebunan sejuta hektar kelapa sawit tahap pertama;
2. Kondisi agroekosistem dimana kondisi geografis Kabupaten Berau sesuai untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit;
3. Mempunyai prospek sangat baik sebagai sumber devisa, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan wilayah bagi pembangunan Kabupaten Berau dimasa mendatang; dan
4. Program yang telah ditetapkan lahan dan perijinannya oleh bupati Kabupaten Berau.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Timur, target program pengembangan dua juta hektar kelapa sawit (sejuta hektar tahap pertama dan sejuta hektar tahap kedua) diproyeksikan dapat direalisasikan pada tahun 2018. Dari hasil Rapat Koordinasi Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 24-25 April 2014 di Samarinda, telah disepakati kontribusi kabupaten Berau untuk mewujudkan pengembangan dua juta hektar kelapa sawit (sejuta hektar tahap kedua) adalah seluas 130.000 hektar (PBS 110.000 ha dan Perkebunan Rakyat seluas 20.000 ha).

2. Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan

Persepsi negatif mengenai perluasan perkebunan kelapa sawit sebagai penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap perubahan iklim dan pemanasan global, semakin berkembang luas di kalangan masyarakat. Kampanye negatif yang merugikan perencanaan pengembangan perkebunan kelapa sawit kemungkinan akan terus berkembang di dalam usaha perluasan perkebunan kelapa sawit. Hal ini dikarenakan isu ini cukup sensitif terutama bagi pelaku usaha mengingat hasil yang “menggiurkan” bagi yang berhasil mengelola lahan kelapa sawit. Berkenaan dengan hal tersebut, selain melanjutkan kampanye positif bersama seluruh pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri, pemerintah harus terus berupaya menghindari praktek yang dapat mengundang kritik dari berbagai pihak. Perlu adanya rencana aksi untuk mensosialisasikan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit sudah dilaksanakan dengan berkelanjutan sehingga meminimalisir dampak degradasi lingkungan, bahkan dalam program ini terkandung berbagai peluang potensial yang dapat dimanfaatkan bagi masa depan pertanian dan perekonomian Kabupaten Berau dan Indonesia pada umumnya.

Sesuai ciri budidaya tanaman kelapa sawit yang dikenal sebagai pohon industri, kelapa sawit memiliki manfaat besar dan luas bahkan termasuk limbah dan hasil sampingan yang sangat melimpah. Seiring dengan menipisnya cadangan energi fosil, maka limbah dan hasil sampingan tersebut dapat menjadi alternatif sumber energi baru dan terbarukan yang dapat menjadi sumber dan kekuatan andalan masa depan perekonomian bangsa. Limbah dan hasil sampingan yang dimaksud merupakan bagian dari hasil proses produksi

industri kelapa sawit yang sudah ada, terus berlanjut, dan masih terus berkembang. Demikian pula ketersediaan limbah dan hasil sampingan juga akan terus berlanjut dan semakin bertambah pula.

Pada konsep ekonomi hijau, limbah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan sehingga perlu dilakukan pengelolaan limbah agar menjadi ramah lingkungan walaupun memerlukan tambahan biaya. Dalam rangka mendukung ekonomi hijau maka diadakan program dan kegiatan yang dilaksanakan **REDD+** (Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan dan lahan gambut plus) dan **RAD GRK** (Rencana Aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca) bekerjasama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada setiap kegiatan pembangunan perkebunan besar maupun rakyat. Pelaksanaan program ramah lingkungan ini berkepentingan untuk menekan laju pemanasan global dengan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penerapan prinsip **3R** (Reduce, Recycle, dan Reused) dalam setiap proses pembangunan perkebunan menuju ekonomi hijau.

Dalam setiap tahapan pembangunan perkebunan dilaksanakan kegiatan **mitigasi** sebagai upaya penurunan emisi dari degradasi hutan dan/atau degradasi lahan. Upaya pencegahan kerusakan lingkungan ini meliputi:

1. Pengendalian Kebakaran Lahan Kebun Rakyat.
2. Konservasi Lahan Komoditas Unggulan
3. Penggunaan pupuk secara berimbang dan pengembangan pembuatan kompos/pupuk organik;

4. Rehabilitasi kebun dan penyesuaian tanaman pelindung bagi komoditi yang membutuhkan; dan
5. Penerapan teknik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP).

Sedangkan upaya yang dilaksanakan untuk menciptakan manfaat tambahan bersamaan dengan peningkatan manfaat dari karbon, dilaksanakan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, peningkatan kelestarian keanekaragaman hayati, dan peningkatan kelestarian produksi jasa ekosistem. Secara aplikatifnya, kegiatan mitigasi meliputi:

1. Pengembangan Teknologi dan Bioteknologi bidang Perkebunan
2. Fasilitasi Biomassa sebagai energy terbarukan
3. Penerapan teknologi budidaya PHT dan penanggulangan dampak anomali iklim yang pada dasarnya dilakukan dengan pendekatan kelestarian lingkungan hidup baik biotik maupun abiotik;
4. Membangun embung-embung/tangkapan air;
5. Mengembangkan teknologi konservasi lahan dan budidaya lorong;
6. Peningkatan produktivitas lahan melalui pemanfaatan BIOCHAR;
7. Kebijakan penggunaan limbah biomasa/cair untuk energi baru terbarukan (POME/Palm Oil Mill Effluent); dan
8. Meng-inclave area bernilai konservasi tinggi (HCV-A) pada usaha perkebunan.

Khusus terhadap pembangunan perkebunan kelapa sawit, Indonesia sejak tahun 2012 menjadi negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia yakni sebesar 44 persen dari produksi minyak nabati dunia dan menggeser

malaysia (41%). Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban jika Negara Indonesia memiliki standar dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan (sustainable) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011. Selain itu, harga minyak dunia (crude oil) yang selalu meningkat juga menjadi topik pembicaraan hangat level internasional bahkan terdapat dugaan mengenai kemungkinan penggunaan minyak kelapa sawit sebagai biofuel.

Beberapa tahun terakhir ini minyak sawit sedang menjadi sorotan dunia termasuk isu-isu yang berkembang di pasar Internasional mengenai permasalahan lingkungan sebagai dampak dari perluasan perkebunan kelapa sawit dimana salah satunya perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang dianggap tidak berkelanjutan dan tidak ramah lingkungan. Bahkan ada yang menuduh bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebelumnya berasal dari kawasan hutan, selain itu banyak pula yang menuding kelapa sawit di Indonesia menyebabkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh berkurangnya penangkapan air ekosistem sekitar dan terlalu banyaknya penggunaan pupuk yang meracuni lingkungan di areal perkebunan. Isu-isu yang berkembang tersebut menjadi tantangan bagi Negara Indonesia pada umumnya dan khususnya Provinsi Kalimantan timur dan terlebih lagi Kabupaten Berau untuk membuktikan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia memiliki sifat yang berkelanjutan dan ramah lingkungan agar produk kelapa sawit Indonesia dapat diterima oleh pasar Internasional.

Beberapa tahun sebelumnya telah terdapat standar pengelolaan kebun dan pengolahan kelapa sawit yang berkelanjutan yakni RSPO (*Roundtable*

Sustainable Palm Oil) yang secara sukarela (*voluntary*) dapat di terapkan di Indonesia. Standar RSPO merupakan standar yang dibuat berdasarkan kesepakatan/roundtable para pemangku kepentingan dalam industri kelapa sawit seperti konsumen, produsen, hingga LSM lingkungan internasional. RSPO menjadi wadah komunikasi para pihak yang berkepentingan untuk menyamakan persepsi tentang konsep berkelanjutan terutama pada pembangunan perkebunan kelapa sawit (*sustainability*).

Kemudian muncul **ISPO** sebagai inisiatif Pemerintah Negara Indonesia terutama Kementerian Pertanian atas kesadaran/deklarasi bahwa pengelolaan sumber daya alam termasuk perkebunan kelapa sawit harus di lakukan secara berkelanjutan (*sustainable*). Sertifikasi ISPO bukan untuk mengganti atau menyaingi sertifikasi RSPO yang sebelumnya sudah ada terlebih dahulu karena penerapan ISPO bersifat mandatory (harus/wajib) dalam artian semua ketentuan terkait yang berlaku di Indonesia wajib dipatuhi dan diterapkan oleh seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit bahkan ada ketentuan akan ditindak bagi yang melanggar ISPO.

Adapun tujuan mengembangkan dan menerapkan ISPO bagi pemerintah Indonesia adalah untuk:

1. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya memproduksi minyak sawit yang lestari;
2. Meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global;
3. Mendukung komitmen Indonesia untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK);

4. Mendukung komitmen unilateral Pemerintah Indonesia di Kopenhagen (2009) dan Program Based Line on LOI Indonesia dan Norwegia (2010);
5. Memposisikan pembangunan kelapa sawit sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi Indonesia;
6. Memantapkan sikap dasar bangsa Indonesia untuk memproduksi minyak kelapa sawit berkelanjutan sesuai tuntutan masyarakat global; dan
7. Mendukung komitmen Indonesia dalam pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.

Menteri Pertanian dalam rangka penerbitan standar/pedoman ISPO menyatakan bahwa sebagai amanat konstitusi UUD pasal 33 ayat 3, bahwa perekonomian nasional di selenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, dengan menerapkan ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) secara konsisten, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi industri kelapa sawit, yakni:

1. Meningkatkan posisi tawar produk kelapa sawit di mata pelanggan;
2. Memperbaiki citra perusahaan;
3. Mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem;
4. Meningkatkan mutu produk dan pelayanan;
5. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, masyarakat, serta kesejahteraan sosial;
6. Menciptakan keunggulan comparative; serta
7. Menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis.

3. Hilirisasi Produk Turunan Komoditi Unggulan Perkebunan

Pengembangan usahatani tanaman perkebunan (khususnya tanaman perkebunan rakyat seperti Kakao), pada umumnya masih sebagai usaha monokultur sehingga belum disertai pengembangan cabang usahatani yang sesuai lainnya, baik dari kelompok tanaman perkebunan maupun jenis pertanian yang masuk dalam ruang lingkup kelompok tanaman pangan, hortikultura, maupun ternak. Disatu pihak, dengan usaha monokultur maka tingkat produktivitas usaha budidaya tanaman dapat tercapai sesuai dengan potensi normalnya secara berkelanjutan apabila dilakukan program yang mendukung hilirisasi produk perkebunan. Tanaman kakao merupakan komoditi unggulan perkebunan namun belum bisa meningkatkan taraf hidup dan pendapatan petani dikarenakan nilai jual ditingkat petani masih relative rendah. Sehingga memungkinkan para petani untuk beralih kepada komoditi lain. Hal ini juga akan dapat mengurangi tingkat produktifitas dan pendapatan petani. Guna mendukung program tersebut akan dilakukan kegiatan pembukaan pusat-pusat pengembangan komoditi unggulan yaitu kakao.

Selain pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian, pengentasan kemiskinan di Kabupaten Berau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, hingga pembangunan sarana dan prasarana publik.

Angka kemiskinan di Kabupaten Berau ± 363.887 jiwa (6.38%) dimana sebagian besar berada pada daerah pedesaan, pedalaman, dan daerah tertinggal. Minimnya infrastruktur baik sarana maupun prasarana publik menjadi salah satu penyebab awal dari munculnya kemiskinan di suatu wilayah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya pembukaan aksesibilitas menuju ke wilayah-wilayah pedesaan, pedalaman, maupun tertinggal agar pembangunan kewilayahan secara merata dapat terealisasi sehingga secara otomatis terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dinas Perkebunan sebagai instansi yang juga memiliki andil dalam program pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan yang berada pada masyarakat sektor pertanian, harus berupaya optimal dalam memberikan kesempatan bagi petani perkebunan untuk memajukan kualitas hidupnya dengan cara memberikan berbagai pelatihan keterampilan teknis perkebunan, memfasilitasi sistem perkebunan modern, mendampingi dalam penerapan teknologi perkebunan, hingga memberikan wadah kelembagaan agar masyarakat tani dapat melakukan kemitraan dengan swasta. Dengan adanya usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia maupun kelembagaan di bidang perkebunan, diharapkan masyarakat di pedesaan, pedalaman, maupun wilayah tertinggal mulai dapat melakukan usaha perkebunan berkualitas dengan harapan peningkatan kesejahteraan hidupnya.

G. Sarana dan Prasarana

Kemajuan teknologi membuka konsekuensi dengan tuntutan perubahan untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut, bilamana sarana dan prasarana tidak dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut berakibat mengalami ketertinggalan atau keterbelakangan disegala bidang.

Untuk menjamin terlaksananya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan sekaligus untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Berau diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan data dari Subbagian Umum dan Kepegawaian sampai 31 Desember 2018, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1.	Tanah dan Bangunan Kantor Disbun	8.066	m ²
2.	Bangunan Kantor Semi Permanen (UPTD PBTP3)	30	m ²
3.	Rumah Negara Golongan III Type C, Semi Permanen (UPTD PBTP3)	36	m ²
4.	Bangunan Gedung Kantor permanen Disbun	1.224	m ²
5.	Tanah Kebun dll	100.000	m ²
6.	Kendaraan Roda 4 (Mobil)	4	unit
7.	Kendaraan Roda 2 (Motor)	5	unit
8.	Sarana (Kursi, Meja, Lemari, Sofa, Band Kas, Gorden)	210	buah

9.	Alat Tulis Kantor (Mesin Ketik, Mesin Hitung dan White Board)	9	buah
10	Alat Komunikasi (Megaphone, Telephone dan Faximilie)	4	buah
11.	Alat Elektronik (Handycam, Proyektor, Sound system dll)	24	buah
12.	Komputer (PC Unit, Laptop, Printer, Note Book, UPS dll)	100	buah
13.	Peralatan Lapangan (GPS, Teropong, Chain Saw, Genset, Kakao Tester, Vacum Press, Freezer, Penyangrai, dll)	75	buah
14.	Peralatan Laboratorium (Tabung Reaksi, Gelas Ukur, Termometer, Mikroskop, Erlenmeyer dll)	161	buah
<i>Hibah dari Disbun Provinsi Kaltim</i>			
15	Peralatan Lapangan (Gergaji, Kampak, Garpu pacul, dll)	36	buah
16	Peralatan Satgas Karlabun (Pakaian Panas lengkap, HT, Ransel, Helm savety, Sepatu savety, kacamata savety, dll)	106	buah
17	Aset Bergerak (Sepeda Motor, Traktor Tangan dan traktor impement)	3	unit

Sumber Data : Subbagian Keuangan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perumusan kebijakan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya seefektif dan seefisien mungkin guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tantangan yang dihadapi, rencana pembangunan dijabarkan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan oleh pemerintah pusat dan daerah yang masing-masing diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 263 ayat 3 (tiga), RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menaungi segala macam program pengelolaan subsector perkebunan dari hulu ke hilir. Sebagai organisasi yang memiliki manajemen dengan orientasi pada hasil dan capaian, maka memerlukan sebuah

perencanaan yang taktis dan aplikatif dilaksanakan di lapangan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, Dinas Perkebunan berupaya untuk menyusun Perencanaan Strategis dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi pembangunan subsektor perkebunan. Dengan disusunnya Perencanaan Strategis Dinas Perkebunan, diharapkan kinerja setiap elemen Dinas Perkebunan lebih terarah, efektif, dan efisien sesuai dengan tujuan utama pembangunan daerah.

Dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, Dinas Perkebunan mendapatkan mandat untuk Program Prioritas sebagai berikut:

1. Untuk Tujuan/Sasaran Menurunnya intensitas emisi, dengan arah kebijakan Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) berbasis lahan perkebunan melalui Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan dengan indikator kinerja (outcome) Jumlah pelaku usaha yang menerapkan prinsip ramah lingkungan, dengan target awal pada tahun 2017 sebanyak 3 pelaku usaha dan target di tahun 2021 sebanyak 10 pelaku usaha yang menerapkan prinsip ramah lingkungan.
2. Untuk Tujuan/Sasaran Menurunkan tingkat kemiskinan, pada strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan arah kebijakan Optimalisasi Pengelolaan Lahan, melalui Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan, indikator kinerja (outcome) Jumlah sertifikasi produk Hasil Perkebunan yang sesuai *Good Manufacture Product* (Sertifikat GMP), dengan target awal tahun 2017 sebanyak 3 sertifikat dan target akhir tahun 2021 sebanyak 15 sertifikat.

3. Untuk Tujuan/Sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian pada strategi Pengembangan agribisnis, dengan arah kebijakan Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melalui Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan, dengan indikator kinerja Jumlah Produk yang dipasarkan (produk). Target awal tahun 2017 sebanyak 5 produk dan target di tahun 2021 sebanyak 7 produk.

Selanjutnya penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Berau untuk Dinas Perkebunan adalah:

- ❖ Luas Tanam dalam satuan Hektar,
- ❖ Jumlah Produksi dalam satuan Ton,
- ❖ Dan Jumlah Tenaga Kerja

Berdasarkan penetapan Program Prioritas dan Indikator Kinerja Dinas Perkebunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016-2021 tersebut, maka Dinas Perkebunan Kabupaten Berau menjabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, untuk selanjutnya disusun langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah sub sektor perkebunan kurun waktu lima tahun kedepan (2016-2021) sebagai tolak ukur pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian sdtahun 2016	Target Kinerja Sasaran Tahun	
					2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Produksi Perkebunan	Meningkatnya produksi komoditi unggulan perkebunan	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan	Ton	1.288.711	1.503.375	1.718.039
Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan Rakyat	Meningkatnya Pendapatan Petani/Pekebun	Jumlah Pendapatan Petani Per Bulan diatas UMK (Rp)	Rupiah	0	0	2.935.000,-

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategi pada rencana strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, maka disusun langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah subsektor perkebunan kurun waktu lima tahun kedepan (2016-2021) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Berikut ini disampaikan Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau untuk menunjang Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

Program / Kegiatan untuk Mencapai Tujuan / Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Produksi Perkebunan	Meningkatnya produksi komoditi unggulan perkebunan	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan	Ton	1. Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	1. Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan 2. Intensifikasi Komoditi Perkebunan 3. Rehabilitasi dan Peremajaan Komoditi Perkebunan 4. Perluasan kebun komoditi unggulan 5. Sertifikasi Bibit Unggul Perkebunan 6. Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Besar
					2. Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan	1. Pengendalian Kebakaran Lahan Kebun Rakyat 2. Konservasi Lahan dengan Komoditas Perkebunan 3. Pengembangan Teknologi Bioteknologi Bidang Perkebunan

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						4. Fasilitasi Biomassa sebagai Energi Terbarukan dari Perkebunan
						5. Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perlindungan
					3. Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	1. Fasilitasi Regu Proteksi
						2. Sekolah Lapang Penerapan Teknologi Budidaya Tepat Guna
						3. Pengendalian dan Perlindungan Tanaman Perkebunan
					4. Pengembanagan Perencanaan Perkebunan	1. Konsolidasi Pembangunan Perkebunan
						2. Pengolahan Data Statistik Perkebunan
						3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
						4. Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan Rakyat	Meningkatnya pendapatan petani / pekebun	Jumlah Pendapatan Petani Per Bulan di atas UMK	Rupiah	1. Peningkatan Kesejahteraan Petani	1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 2. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 3. Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi petani/ Kelompok Tani 4. Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Kebun petani Kemitraan PBS 5. Pengembangan Modal Usaha Perkebunan 6. Pelatihan dan Pemberdayaan SDM Perkebunan
					2. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	1. Promosi atas hasil produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 2. Pengolahan informasi Permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/ perkebunan masyarakat

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						3. Pendampingan Pekebun dan Pelaku Agribisnis (Pekan Daerah Kontak Tani Pekebun Andalan)
						4. Pendampingan Pekebun dan Pelaku Agribisnis (Pekan Nasional Kontak Tani Pekebun Andalan)
						5. Pelatihan Penerapan Teknologi Perkebunan Modern Bercocok Tanam
					3. Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	1. Pembinaan Pasca Panen
						2. Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
						3. Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Rakyat
						4. Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana prasarana teknologi Perkebunan Tepat Guna

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						5. Pelatihan dan Bimbingan
						Pengoperasian Alat dan
						Mesin Teknologi Perkebuna

B. Indikator Kinerja Utama

Tabel : Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Kabupaten Berau.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	PenanggungJawab
1	Meningkatnya Produksi komoditi unggulan perkebunan	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan	Jumlah Luas, Produksi danTenagaKerja Perkebunan sampai akhir tahun pelaporan	• Data Statistik Perkebunan • Data SebaranBibitKomoditi Perkebunan • Data OPT Perkebunan	• Subbag Penyusunan Program • Bidang Produksi • Bidang Perlindungan
2	Meningkatnya Pendapatan Petani/Pekebun	Jumlah Pendapatan Petani Per Bulan diatas UMK (Rp)	Jumlah Luas, Produksi danTenagaKerja Perkebunan sampai akhir tahun pelaporan	• Data KelompokTani Perkebunan	• Bidang Penyuluhan • Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pada tahun anggaran 2018, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau menetapkan 2 sasaran beserta targetnya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang telah disetujui oleh Bupati Kabupaten Berau, Bpk H. Muharram, S.Pd, M.M dan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Bpk Ir. Sumaryono pada tanggal 22 Januari 2018. Perjanjian Kinerja tersebut sesuai tabel 4 berikut ini :

PERJANJIAN KINERJA

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2018**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Perkebunan
Tahun : 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Produksi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit	Ton	1.707.997
		Produksi Hasil Perkebunan Kelapa Dalam	Ton	4.828
		Produksi Hasil Perkebunan Kakao	Ton	832
		Produksi Hasil Perkebunan Karet	Ton	761
		Produksi Hasil Perkebunan Lada	Ton	1.142
2	Meningkatnya Pendapatan Petani / Pekebun	Pendapatan Petani/Pekebun diatas UMK	Rupiah	2.935.000,-

1. Rencana Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 9.969.035.002,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2018 menjadi Rp. 10.742.968.002,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.581.579.002,- dan Belanja Langsung Rp. 4.161.389.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 9.663.995.994,- atau 89,95%, dengan rincian untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.935.169.609,- (90,18%) dan belanja langsung sebesar Rp. 3.728.826.385,- (89,61%).

2. Target Belanja Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	
1	Belanja Tidak Langsung	6,581,579,002	5,935,169,609	90.18
2	Belanja Langsung	4,161,389,000	3,728,826,385	89.61
	Jumlah	10,742,968,002	9,663,995,994	89.96

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Untuk menunjang pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Berau sebagaimana tertuang dalam perjanjian Kinerja Tahun 2018 antara Bupati Berau dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, maka dilaksanakan pengalokasian Anggaran Belanja Langsung Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Tahun 2018 sesuai table Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis berikut:

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	1.919.463.000	46,13	
2	Meningkatnya Pendapatan Petani / Pekebun	2.241.926.000	53,87	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Dalam rangka Akuntabilitas Instansi Pemerintah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan maka untuk mengetahui Capaian Kinerja Organisasi dilakukan dengan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai salah satu bentuk instrument pertanggungjawabandalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan juga merupakan bentuk mekanisme memberikan umpan balik guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah. Evaluasi Kinerja menjadi sangat penting bagi Instansi Pemerintah untuk memperbaiki kinerja organisasinya.

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting dalam pelaporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi sehingga dapat mengetahui apakah suatu tujuan, sasaran, program dan kegiatan itu berhasil atau tidak. Dalam hal ini setiap tahun dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Berau pengukuran dilakukan beberapa item, dan Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Berau untuk tahun 2016 dan 2017 yaitu :

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2016	Nilai 2017
1	Perencanaan Kinerja	30	25.85	29.45
2	Pengukuran Kinerja	25	23.47	20.94
3	Pelaporan Kinerja	15	11.75	13.11
4	Evaluasi Kinerja	10	7.83	4.83
5	Capaian Kinerja	20	6.00	11.08
	Nilai Hasil Evaluasi	100	74.90	79.39
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	BB

Catatan : tingkat akuntabilitas kategorinya antara lain : D,C,CC,B,BB dan A

2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Berau atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, No. 700/37/LHE-LKIP/ltkab.IV/XI/2018, Tanggal 12 November 2018, diperoleh rekomendasi sebagai berikut:

- Perlu penyelarasan Indikator tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD dan Renstra Dinas Perkebunan, dengan indikator hasil/capaian program yang ada dalam rencana kerja tahunan.
- Target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan harus menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran.
- Menyelaraskan target kinerja dalam perjanjian kinerja tahunan dijabarkan lebih lanjut menjadi target kinerja eselon III dan IV.

- Memanfaatkan hasil pengukuran Rencana Aksi untuk pengendalian dan pemantauan.

Berdasarkan hasil Rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Berau diatas, maka Dinas Perkebunan Kabupaten Berau telah melaksanakan tindak lanjut sesuai arahan/rekomendasi yang telah disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Berau. Namun demikian disebabkan adanya review pada RPJMD Kabupaten Berau yang berdampak pada Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, menyebabkan harus diadakan penyesuaian terutama target kinerja, sehingga pada tahun anggaran 2018, yang dijadikan patokan capaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Berau adalah Rencana Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Berau sebagaimana telah dilakukan Evaluasi Rencana Kinerja secara berkala tiap triwulan uang dilaporkan ke Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan.

Pengukuran Capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja mencakup target dan realisasi dari masing-masing kelompok sasaran yang telah ditetapkan.

C. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2018 antara Bupati Kabupaten Berau, Bpk H. Muharram,S.Pd, M.M dan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Bpk Ir. Sumaryono pada tanggal 22 Januari 2018, dapat diketahui upaya Dinas Perkebunan dalam memenuhi Indikator Kinerja Utama sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagaimana penjabaran berikut ini,

BAB III – Analisis Capaian Kinerja

BAB III – Analisis Capaian Kinerja

BAB III – Analisis Capaian Kinerja

BAB III – Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan Analisis terhadap Sasaran Strategis Dinas Perkebunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Berau tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam 10 (Sepuluh) Program dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, Pada tahun 2018 secara keseluruhan telah dievaluasi. Evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan diarahkan terhadap kesesuaian antara target dari indikator kinerja kegiatan dan sasaran strategis dengan hasil realisasi kinerja yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi terhadap kesesuaian antara target dari indikator kinerja kegiatan dan sasaran strategis dengan hasil realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dapat diketahui dari analisis capaian kinerja sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1. Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan, Pembangunan Kebun Petani Kemitraan Oleh PBS.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI (%)		
					Volume Fisik	% Fisik	% Keuangan
1.	Meningkatnya Pendapatan Petani/ Pekebun	Luas Kebun Kemitraan yang terbangun	Ha	500	500	100	91.07

Terwujudnya kesepakatan kerjasama kemitraan antara masyarakat dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) merupakan sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Berau untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pekebun dengan indikator kinerja tersusunnya naskah kesepakatan kerjasama kemitraan yang tertuang dalam Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan, Pembangunan Kebun Petani Kemitraan oleh PBS Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan, Pembangunan Kebun Petani Kemitraan Oleh PBS pada tahun 2018 dilaksanakan di Kampung Pesayan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), realisasi anggaran sebesar Rp. 68.300.152,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu seratus lima puluh dua rupiah) atau 91.07%, sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp. 6.699.848,- (enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah). Adanya sisa anggaran disebabkan karena sisa belanja ATK, sisa belanja bahan bakar minyak/pelumas, tidak dapat

direalisasikannya honor bendahara pengeluaran pembantu karena telah direalisasikan di kegiatan lain dan sisa belanja perjalanan dinas dalam daerah. Selain itu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan, Pembangunan Kebun Petani Kemitraan oleh PBS adalah keterbatasan kendaraan dinas untuk mobilitas jalannya kegiatan.

Realisasi pelaksanaan kegiatan adalah terbangunnya luas kebun kemitraan sebesar 500 Ha di Koperasi Tam'an Jaya (PT. Mulia Inti Perkasa) Kampung Long Ayan, Koperasi Tunas Muda (PT. Berau Karetindo Lestari) Kampung Long Ayan, Koperasi Daba Juna'di (PT. Global Primatama Mandiri) Kampung Merapun, dan Koperasi Bina Sejahtera (PT. Buana Mudantara) Kampung Biatan Bapinang.

B. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Pada Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan ini pada tahun anggaran 2018, terdapat 3 (tiga) yaitu kegiatan Pengelolaan Informasi Permintaan Pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat, Kegiatan Pendampingan Pekebun dan Pelaku Agribisnis (PEDA KTNA) dan Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna.

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi Permintaan Pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan hasil yang diinginkan adalah **“tersebar luasnya informasi harga pasar komoditas perkebunan secara kontinyu”** (setiap bulan) sehingga petani/pekebun mendapatkan informasi harga yang

menguntungkan sesuai dengan perkembangan harga saat menjual hasil panennya.

Pada tahun 2018 untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dukungan pendanaan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan target keluaran sebanyak 12 kali informasi data harga pasar komoditas perkebunan. Capaian sampai dengan akhir tahun 2018, realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan sebesar 91,61 % atau Rp. 54.966.634,-, sehingga terdapat sisa anggaran sebanyak Rp. 5.033.366,-. Sisa anggaran karena pembelian bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional ke lapangan, sisa perjalanan dinas dalam daerah tidak terserap secara keseluruhan.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
					Volume Fisik	% Fisik	% Keuangan
20	Meningkatnya Pendapatan Petani/Pekebun	Jumlah Data Informasi Pasar Komoditi Perkebunan	Data	12	12	100	91.61

2. Kegiatan Pendampingan Pekebun dan Pelaku Agribisnis (PEDA KTNA)

Kegiatan pendampingan pekebun dan pelaku agribisnis ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan percontohan/demplot komoditas perkebunan sebagai bentuk promosi komoditas unggulan di Kabupaten Berau pada saat momentum Pekan

Daerah (PEDA) Kontak Tani Dan Nelayan Andalan (KTNA) ke X Kalimantan Timur Tahun 2019, yang pelaksanaannya di Kampung Labanan Jaya, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Dalam rangka mempersiapkan Peda X KTNA Kaltim Tahun 2019 tersebut, maka telah dialokasi dukungan kegiatan pembuatan demplot komoditas perkebunan dan pelatihan petugas Fasilitator Daerah (Fasda) bidang perkebunan dalam proses pengolahan minyak nilam dan pengolahan pasta kakao. Hasil yang diinginkan adalah **“tersedianya lokasi demonstrasi plot (demplot) dan 4 (empat) contoh komoditas perkebunan dan meningkatnya SDM Fasda”**, sehingga pada saatnya Ajang Peda X KTNA Kaltim digelar pada Tahun 2019 lokasi Demplot telah siap dan petugas Fasda siap untuk mendampingi para peserta.

Pada tahun 2018 untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dukungan pendanaan sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dengan target keluaran tersedianya lokasi percontohan (Demplot) komoditas perkebunan dan meningkatnya petugas Fasda sebanyak 15 Orang. Capaian sampai dengan akhir tahun 2018, realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan sebesar 88,39 % atau Rp. 618.763.850,-, sehingga terdapat sisa anggaran sebanyak Rp. 81.236.150,-. Sisa anggaran karena honor petugas teknis lapangan, pembelian bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional ke lapangan, sisa belanja pengadaan bahan demplot, sisa perjalanan dinas dalam daerah tidak terserap secara keseluruhan.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
					Volume Fisik	% Fisik	% Keuangan

20	Meningkatnya Pendapatan Petani/Pekebun	Tersedianya lokasi Demplot komoditas perkebunan	Paket	1	1	100	88,39
		Jumlah peserta pelatihan pasca panen	Orang	15	15	100	

3. Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna.

Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna, dalam upaya meningkatkan pemahaman petani/pekebun tentang penerapan pemupukan yang benar terkait dengan dosis pupuk, cara pemupukan dan saat pemberian pupuk terhadap tanaman perkebunan.

Hasil yang diinginkan adalah **“meningkatnya motivasi petani/pekebun dalam penerapan pemupukan tanaman perkebunan sesuai dengan anjuran rekomendasi yang ditentukan”**, sehingga pada gilirannya produktivitas tanaman semakin meningkat.

Pada tahun 2018 untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dukungan pendanaan sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan target keluaran terlaksananya penyuluhan teknologi tepat guna bagi petani/pekebun tentang aplikasi pemupukan yang baik dan benar di 3 (tiga) lokasi. Capaian sampai dengan akhir tahun 2018, realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan sebesar 82,27 % atau Rp. 205.679.700,-, sehingga terdapat sisa anggaran sebanyak Rp. 44.320.300,-. Sisa anggaran karena honor petugas , pembelian bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional ke lapangan, sisa belanja pengadaan makan/minum peserta penyuluhan, sisa perjalanan dinas dalam daerah tidak terserap secara keseluruhan.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
					Volume Fisik	% Fisik	% Keuangan
20	Meningkatnya Pendapatan Petani/Pekebun	Terlaksananya penyuluhan penerapan teknologi pemupukan	lokasi	3	3	100	82,27

C. Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan

Program ini bertujuan untuk memberdayakan petani dan kelompok tani dalam mengelola usaha perkebunannya dalam rangka meningkatkan mutu/kualitas produksi yang dihasilkannya.

Pada tahun 2018 melalui kegiatan identifikasi/inventarisasi kebun masyarakat untuk selanjutnya dalam rangka penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STDB) dengan tujuan untuk:

- menghimpun data kepemilikan kebun rakyat dan informasi pendukung lainnya sehingga dapat digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan;
- membantu mempermudah Kementerian Pertanian dalam penyaluran program pemerintah, seperti: program subsidi pupuk, benih, peremajaan supaya tepat sasaran;
- mewujudkan tata kelola usaha budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan milik Pekebun;

- d. membantu Kelembagaan Petani dan/Kelembagaan Desa untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan Pekebun;
- e. mendorong terwujudnya praktek pengelolaan perkebunan yang baik (*good agriculture practices*) di level Pekebun;
- f. memastikan pengelolaan SDA yang berbasis perkebunan dikelola secara berkelanjutan.

Pada tahun 2018 untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dukungan pendanaan sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan target keluaran terdatanya perkebunan masyarakat sebanyak 30 (tiga puluh) lokasi kebun. Capaian sampai dengan akhir tahun 2018, realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan sebesar 92,30 % atau Rp. 69.225.920,-, sehingga terdapat sisa anggaran sebanyak Rp. 5.774.080,-. Sisa anggaran karena honor petugas, pembelian bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional ke lapangan, sisa perjalanan dinas dalam daerah tidak terserap secara keseluruhan.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
					Volume Fisik	% Fisik	% Keuangan
20	Meningkatnya Pendapatan Petani/Pekebun	Data lokasi kebun rakyat yg diidentifikasi	lokasi	30	30	100	92,30

D. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Pada Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan ini pada tahun anggaran 2018, terdapat 5 (lima) yaitu kegiatan Penyediaan Sarana produksi pertanian/perkebunan, Kegiatan Pengendalian dan Perlindungan Tanaman Perkebunan,

Fasilitasi Pembibitan Komoditas Unggulan, Rehabilitasi dan Peremajaan Komoditi Perkebunan dan Fasilitasi GEMARI KAKAO.

1. Kegiatan Penyediaan Sarana produksi pertanian/perkebunan

Kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan ini dilaksanakan dengan keluaran berupa ketersediaan pupuk dan obat-obatan untuk pemeliharaan komoditi perkebunan, sedangkan hasil yang diinginkan adalah **“meningkatnya penerapan pemupukan dan obat-obatan untuk pengendalian pengganggu tanaman sesuai dengan anjuran”** (setiap bulan) sehingga petani/pekebun mendapatkan hasil produksi yang meningkat.

Pada tahun 2018 untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dukungan pendanaan sebesar Rp. 373.500.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan target keluaran pengadaan pupuk kimia sebanyak 4.400 Kg, Herbisida sebanyak 110 liter dan Fungsida sebanyak 110 liter serta mesin potong rumput 16 buah. Capaian sampai dengan akhir tahun 2018, realisasi fisik 79,07 % dan realisasi keuangan sebesar 72,72 % atau Rp. 271.703.816,-, sehingga terdapat sisa anggaran sebanyak Rp. 101.796.184,-. Sisa anggaran karena pembelian bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional ke lapangan, sisa perjalanan dinas dalam daerah tidak terserap secara keseluruhan dan pengadaan sarana berupa mesin rumput tidak dapat direalisasikan.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
					Volume Fisik	% Fisik	% Keuangan
20	Meningkatnya Pendapatan	Jumlah jenis sarana produksi					72,72

	Petani/Pekebun	yang tersedia	Paket	2	2	100	
--	----------------	---------------	-------	---	---	-----	--

2. Kegiatan Pengendalian dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Kegiatan pengendalian dan perlindungan tanaman perkebunan ini dilaksanakan dengan keluaran berupa luas tanaman perkebunan petani/pekebun yang dapat dikendalikan dari serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), sedangkan hasil yang diinginkan adalah **“meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan”**.

Pada tahun 2018 untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dukungan pendanaan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan target keluaran luas tanaman perkebunan yang dapat dikendalikan dari serangan OPT 20 Ha. Capaian sampai dengan akhir tahun 2018, realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan sebesar 98,31 % atau Rp. 88.481.200,-, sehingga terdapat sisa anggaran sebanyak Rp. 1.518.800,-. Sisa anggaran karena belanja cuci cetak dan sisa perjalanan dinas dalam daerah tidak terserap secara keseluruhan.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
					Volume Fisik	% Fisik	% Keuangan
20	Meningkatnya produksi komoditi unggulan perkebunan	Luas tanaman perkebunan yang terkendali dari serangan OPT	Ha	20	20	100	98,31

3. Kegiatan Fasilitas Pembibitan Komoditas Unggulan

Kegiatan Fasilitasi Pembibitan Komoditi Unggulan merupakan dengan tujuan terbentuknya Kebun Sumber Benih Unggul untuk komoditas Kakao untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan dan rehabilitasi kebun kakao masyarakat. Pembangunan kebun sumber benih unggul komoditas kakao ini dilaksanakan di UPTD Pengembangan Bahan Tanaman dan Penanganan Pasca Panen (UPTD-PBTP3) Tumbit Melayu.

Pada tahun 2018, Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembibitan Komoditi Perkebunan ditargetkan dengan menyiapkan bahan tanaman berupa bibit unggul Kakao sebanyak 500 pohon yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber benih unggul di Kebun pembibitan yang akan dibangun.

Dengan pagu anggaran kegiatan pada tahun 2018 sebesar Rp. 261.900.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 253.779.960,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) atau 96,09 %, sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp. 8.120.040,- (Delapan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Empat Puluh Rupiah).

Dalam pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembibitan Komoditi unggulan tahun 2018, Penyiapan pembangunan Kebun sumber benih kakao dapat dilaksanakan dengan realisasi fisik 100 % yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) di Jember, Jawa Timur sebagai penyedia benih kakao unggul,

yang sekaligus melakukan pendampingan dan pengawasan langsung oleh tenaga ahli dari Puslitkoka.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
					Volume Fisik	% Fisik	% Keuangan
10	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Terfasilitasinya pembibitan komoditas unggulan perkebunan.	komoditas	1	1	100	96,09

4. Kegiatan Rehabilitasi dan Peremajaan Komoditi Perkebunan

Kegiatan rehabilitasi dan peremajaan komoditi perkebunan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan perbaikan kebun masyarakat yang produktivitasnya sudah menurun dikarenakan usia tanaman yang sudah tua dan pada tanaman yang rusak. Keluaran kegiatan ini berupa luas kebun masyarakat yang berhasil direhabilitasi/diperbaiki kondisi fisik tanamannya, dengan harapan pada saatnya produktivitasnya dapat meningkat.

Pada tahun 2018 untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dukungan pendanaan sebesar Rp. 83.273.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan target keluaran kebun masyarakat yang direhabilitasi tanamannya seluas 1 (satu) Ha. Capaian sampai dengan akhir tahun 2018, realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan sebesar 84,36 % atau Rp. 70.247.500,- (Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus

Rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sebanyak Rp. 13.025.500,- (Tiga Belas Juta Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).

Kebun masyarakat yang telah direhabilitasi pada tahun 2018 di lokasi Gunung Tabur seluas $\pm$ 0,50 Ha (500 pokok) dan Tumbit Melayu seluas $\pm$ 0,50 Ha (500 pokok) dengan komoditas Kakao.

Bahan sambung samping berupa entres diperoleh dari Sumber Entres dari Pohon Kakao terpilih milik petani yang telah dilakukan pemurnian pada tahun 2012 yaitu milik Saudara Hasanuddin Kampung Mera'ang, Saudara Bandu Kampung Mera'ang dan Saudara Jupri lokasi di Long Pikat.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
					Volume Fisik	% Fisik	% Keuangan
20	Meningkatnya produksi komoditi unggulan perkebunan	Luas tanaman perkebunan yang direhabilitasi	Ha	1	1	100	84,36

5. Kegiatan Fasilitas GEMARI KAKAO

Kegiatan fasilitas Gerakan Mengembangkan Agribisnis Kakao ini merupakan inovasi dalam upaya mengembangkan kembali komoditas kakao di Kabupaten Berau, dimana pada masa tahun 1990-an komoditas kakao ini pernah memberikan hasil produksi dan kualitas terbaik di Kalimantan Timur. Kondisi terakhir kebun-kebun masyarakat komoditas kakao ini telah banyak beralih komoditas menjadi perkebunan kelapa sawit monokultur. Kondisi demikian tidak terlalu menguntungkan bagi pekebun apabila terjadi permasalahan gangguan OPT dan/atau harga TBS dilapangan. Oleh

karena itu petani/pekebun sangat dianjurkan untuk melakukan diversifikasi (penganekaragaman) komoditas sehingga sumber alternative pendapatan semakin beragam pula dari hasil panen berbagai komoditas yang diusahakan.

Fasilitasi Gemari Kakao ini merupakan upaya pendampingan petani/pekebun untuk komoditas kakao oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang Tim-nya dibentuk melalui Keputusan Bupati yang terdiri dari berbagai OPD terkait, NGO dan Perusahaan.

Pada tahun 2018 untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dukungan pendanaan sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan target keluaran meningkatnya luas tanam komoditas kakao kebun masyarakat. Capaian sampai dengan akhir tahun 2018, realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan sebesar 90,92 % atau Rp. 68.193.250,- (Enam Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sebanyak Rp. 6.806.750,- (Enam Juta Delapan Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). Hal ini dikarenakan terdapat honor anggota kelompok kerja yang tidak diserap.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
					Volume Fisik	% Fisik	% Keuangan
20	Meningkatnya produksi komoditi unggulan perkebunan	Jumlah produksi kakao yang meningkat	Ton	2,30	2,30	100	90,92

E. Program Pengembangan Perencanaan Perkebunan

Pada Program pengembangan perencanaan perkebunan ini pada tahun anggaran 2018, terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Konsolidasi Pembangunan Perkebunan dan

Kegiatan Pengolahan Data Statistik Perkebunan (Pembuatan Buku Data Statistik Komoditi Unggulan)

1. Konsolidasi Pembangunan Perkebunan

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
					Volume Fisik	% Fisik	% Keuangan
11	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah dokumen rumusan pembangunan bidang perkebunan yang disusun	Dokumen Rumusan	1	1	100	98,76

Pada tahun 2018, pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi Pembangunan Perkebunan sesuai dengan target kegiatan menitikberatkan pada pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2018 se Kalimantan Timur di Samarinda dan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Provinsi Tahun 2018.

Pagu Anggaran Kegiatan Konsolidasi Pembangunan Perkebunan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 74.068.880,- (Tujuh Puluh Empat Juta Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau 98,76 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 931.120,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) disebabkan karena

adanya sisa perjalanan dinas luar daerah untuk kegiatan Musrenbang Provinsi dan Rakorbun Tahun 2017, selain itu juga sisa dari belanja Alat Tulis Kantor.

Dari hasil pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Provinsi Tahun 2018 (Musrenbang) dan Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan se Kalimantan Timur Tahun 2018 (Rakorbun), diketahui sinkronisasi kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim dan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau tahun 2018 adalah:

- Kegiatan Pengendalian OPT dititik beratkan pada pengendalian JAP, Ganoderma, Penyakit Busuk Pangkal Batang Lada, dan Hama Penggerek Buah Kakao (PBK)
- Kegiatan Monev Sapras dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun
- Untuk Perencanaan Tahun 2019, sesuai Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, prioritas komoditi yang akan dikembangkan di Kabupaten Berau yaitu Lada dan Kakao.

2. Pengolahan Data Statistik Perkebunan (Pembuatan Buku Data Statistik Komoditi Unggulan)

Data Statistik Komoditi Unggulan Perkebunan terdiri dari 2 (dua Semester yang menggambarkan pelaksanaan tugas pokok Dinas Perkebunan Kabupaten Berau yang secara garis besar berisi data tentang hasil-hasil yang dilaksanakan dan dicapai dalam pelaksanaan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Berau pada Semester I dan Semester II tiap tahun.

Pada tahun anggaran 2018, Pagu Anggaran Kegiatan Pengolahan data Statistik Perkebunan (Pembuatan Buku Data Statistik Komoditi Unggulan) adalah sebesar Rp. 74.000.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) dengan realisasi penyerapan anggran sebesar Rp. 73.726.500,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sebesar 99,63 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 273,500,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah), merupakan sisa penganggaran biaya perjalanan dinas luar daerah yang tertuang dalam DPPA Dinas Perkebunan dalam rangka Koordinasi dan Validasi Data Statistik Perkebunan.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
					Fisik	Keuangan (%)
13	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah dokumen data statistik komoditi unggulan perkebunan	dokumen	2	2	92,32

F. Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan

Pada Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan ini pada tahun anggaran 2018, terdapat 3 (Tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian Kebakaran Lahan Kebun Rakyat, Kegiatan Konservasi Lahan Dengan Komoditas Perkebunan dan Pengembangan Teknologi Bioteknologi Bidang Perkebunan.

1. Kegiatan Pengendalian Kebakaran Lahan Kebun Rakyat

Dalam rangka antipasi dan kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun, telah terbentuk Brigade/Satgas Pengendalian Kebakaran Dinas Perkebunan Kabupaten Berau pada tahun 2015, sesuai dengan Permentan Nomor 47 tahun 2014

tentang Brigade dan Pedoman pelaksanaan pencegahan serta pengendalian kebakaran lahan dan kebun juga membentuk Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) ditingkat masyarakat.

Melalui Kegiatan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun pada tahun 2018, pelaksanaan kegiatan meliputi:

- ✓ Pembinaan dan Monitoring Kelompok Peduli Api yang sudah terbentuk di 6 (enam) Kampung, yaitu: Kampung Tepian Buah, Kampung Merapun, Kampung Kasai, Kampung Pesayan, Kampung Capuak dan Kampung Batu Putih.
- ✓ Pembentukan KTPA pada kampung yang rawan terjadi kebakaran di 9 (Sembilan) lokasi yaitu : Kampung Muara Lesan binaan PT. Anugrah Agung Prima Abadi, Kampung Biatan Lempake binaan PT. Dwi Wira Lestari Jaya, Kampung Biatan Ulu binaan PT. Dwi Wira Lestari Jaya, Kampung Tanjung Perepat Kecamatan Batu Putih Binaan PT. Tunas Alam Nusantara, Kampung Ampen Medang Kecamatan Batu Putih binaan PT. Inti Energi Kaltim, Kampung Tasuk Kecamatan Gunung Tabur binaan PT. Satu Sembilan Delapan, Kampung Semanting binaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya, Kampung Long Ayan binaan PT. Natura Pasific Nusantara dan Kampung Punan Malinau binaan PT. Natura Pasific Nusantara.

Pagu anggaran kegiatan yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 129.000.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah), serapan anggaran penunjang kegiatan hanya sebesar Rp. 115.173.950,- (Seratus Lima Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 89,28 %, sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp. 13.826.050,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah).

Adanya sisa anggaran pada Kegiatan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun Rakyat tersebut disebabkan adanya sisa belanja pembelian bahan bakar minyak dan pelumas untuk mobilitas ke kampung dan sisa belanja biaya perjalanan dinas dalam daerah, dimana jumlah lunsum yang tertuang dalam DPA SKPD Tahun 2018 lebih besar dari pada standart perjalanan dinas dalam daerah sehingga pembayaran lunsum harus menyesuaikan standart yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Berau tersebut.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TAR GET	REALISASI		
					Volume Fisik	% Fisik	% Keuangan
14	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Lahan Kebun	kali	3	3	100	89,28

2. Kegiatan Konservasi Lahan Dengan Komoditas Perkebunan

Kegiatan ini dengan tujuan untuk meningkatkan Produktifitas Lahan Pertanian Non Produktif dilaksanakan melalui Kegiatan Konservasi lahan dengan komoditas perkebunan dalam mendukung Program Peningkatan Kesejahteraan Petani menjadi Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan.

Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Lahan dengan Komoditas Perkebunan pada tahun 2018, kembali menitik beratkan pada Pengadaan Bibit Pala sebanyak 8.600 pohon

untuk lahan terlantar seluas 70 Hektar di Kampung Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk-Biduk dan Kampung Ampen Medang Kecamatan Batu Putih.

Pagu anggaran kegiatan yang dialokasi pada tahun 2018 sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), serapan anggaran untuk realisasi kegiatan adalah sebesar Rp. 430.384.750,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 95,64 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 19.615.250,- merupakan anggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah dan sisa kontrak pengadaan bibit.

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TAR GET	REALISASI		
					Volume Fisik	% Fisik	% Keuangan
15	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah Luasan Lahan Yang Terkonservasi	Ha	70	70	100	95,64

3. Kegiatan Pengembangan Teknologi Bioteknologi Bidang Perkebunan

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TAR GET	REALISASI		
					Volume Fisik	% Fisik	% Keuangan
16	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah Petani Kebun yang Menggunakan Bioteknologi	Petani	50	50	100	97,30

Kegiatan Pengembangan Teknologi Bioteknologi Bidang Perkebunan merupakan yang ditujukan untuk menekan penggunaan pestisida kimiawi sebagai bahan

pengendali serangan hama penyakit tanaman perkebunan, selanjutnya mengganti bahan pengendaliannya dengan penggunaan Agens Pengendali Hayati dan Pestisida Nabati yang ramah lingkungan berdasarkan Konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT).

Untuk pemenuhan kebutuhan petani/pekebun dalam mengendalikan serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan (OPT), Dinas Perkebunan Kabupaten Berau melalui UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD-P2TP) di Rinding mulai mengembangkan Agens Pengendali Hayati serta Pestisida ramah lingkungan lainnya.

Dengan pagu anggaranKegiatan Pengembangan Teknologi Bioteknologi Bidang Perkebunan di tahun 2018 sebesar Rp. 168.790.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 164.224.620,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) atau 97,30 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 4.565.380,- (Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah), merupakan sisa belanja perjalanan dinas yang tidak terpakai.

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Teknologi Bioteknologi Bidang Perkebunan di tahun 2018 adalah:

- Pelatihan pembuatan Biopestisida untuk petani di Kampung Tembudan, Kecamatan Batu Putih sebanyak 50 orang.
- Pengadaan belanja barang Shaker untuk keperluan UPTD P2TP
- Pengembangan dan perbanyakkan biopestisida berupa Jamur Trichoderma untuk pemenuhan permintaan petani guna pengendalian OPT.

Hasil pengembangan/perbanyak jamur *Trichoderma sp* selama tahun 2018 baru sebatas dalam bentuk stater dan dalam bentuk perbanyak dengan media bekatul, hal ini disebabkan karena terbatasnya peralatan yang ada. Hasil tersebut didistribusikan untuk mengendalikan OPT tanaman Lada, meskipun sebenarnya jamur ini memiliki spektrum yang lebih luas fungsinya dalam mengendalikan OPT.

Pendistribusian *Trichoderma sp* selama periode tahun 2018 meliputi beberapa kampung, yaitu:

- Kampung Melati Jaya, sebanyak 12,5 kg dalam bentuk stater atau setara 125 Kg apabila sudah diperbanyak dengan campuran bekatul berupa *Trichoderma sp*, bentuk padat. Sedangkan *Trichoderma sp*, bentuk cair sebanyak 2 liter.
- Kampung Tembudan, sebanyak 68 kg dalam bentuk stater, atau setara 680 Kg apabila sudah diperbanyak dengan campuran bekatul, berupa *Trichoderma sp*, bentuk padat. Sedangkan *Trichoderma sp*, bentuk cair sebanyak 12 liter.
- Kampung Teluk Semating, sebanyak 200 kg perbanyak dengan campuran bekatul, berupa *Trichoderma sp*, bentuk padat.

Jumlah keseluruhan yang dibagikan, dilakukan untuk pengendalian Penyakit Busuk Pangkal Batang Lada (*Phytophthora capsici*) dari total luas serangan sekitar $\pm$ 6 Ha di wilayah Kampung tersebut diatas (Berdasarkan laporan dari petugas data statistik Dinas Perkebunan/Manbun yang bertugas diwilayah Kampung tersebut),

Dengan memperhatikan masih besarnya luas serangan OPT tanaman lada maka diharapkan dukungan pemerintah kabupaten Berau terutama dalam hal penunjang sarana dan prasarana kelengkapan Laboratorium UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD-P2TP) di Rinding untuk lebih

mengembangkan *Trichoderma sp.* dan Agens hayati lainnya sebagai pengendali hayati bukan hanya untuk serangan OPT pada komoditi lada, namun juga pada komoditas tanaman perkebunan lainnya.

G. Program Pengendalian Hama Terpadu

Salah satu penyebab menurunnya produktivitas usaha budidaya komoditas perkebunan adalah terjadinya serangan hama dan penyakit yang menyerang tanaman perkebunan. Sesuai UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, pelaksanaan perlindungan tanaman dilakukan dengan Sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT).

Pelaksanaan Program Pengendalian Hama Terpadu dilaksanakan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dalam bentuk pelatihan mengenai sistem PHT melalui Sekolah Lapang Penerapan Teknologi Budidaya Tepat Guna (SL-PHT) dan Brigade Proteksi Perkebunan. Target Program Pengendalian Hama Terpadu dalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2016-2021 adalah Luasan Kawasan pengendalian hama yaitu sebesar 30 Ha.

1. Kegiatan Fasilitasi Brigade Proteksi Perkebunan

No	SASARAN	INDKATOR KINERJA	SATUAN	TAR GET	REALISASI		
					Volume Fisik	% Fisik	% Keuangan
18	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Jumlah Brigade Proteksi Perkebunan	regu	1	1	100	94,75

Kegiatan Fasilitasi Brigade Proteksi Perkebunan merupakan Kegiatan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan motivasi petani /pekebun agar menyadari, mau dan mampu melaksanakan sistem perlindungan tanaman secara efektif, efisien dan aman sehingga diharapkan dengan kemandirian petani/pekebun dapat menangani serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan di kebunnya sejak dini.

Adapun persyaratan penentuan daerah/kampung yang mendapatkan Fasilitasi Brigade Proteksi Perkebunan adalah:

- ✓ Kampung tersebut sebelumnya telah mendapatkan pelatihan SL-PHT,
- ✓ Kampung tersebut termasuk daerah sentra produksi komoditi perkebunan,
- ✓ Bukan merupakan kampung yang berdampingan dengan perusahaan sehingga persoalan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan sepenuhnya ditangani oleh masyarakat sendiri secara mandiri.

Pada tahun 2018, Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Brigade Proteksi Perkebunan dilaksanakan focus pada pembentukan Regu Proteksi di Kampung Batu Rajang Kecamatan Segah dengan anggota terdiri dari 15 orang.

Sebagai perlengkapan kegiatan pelatihan, diserahkan pula sepatu lapangan, topi dan baju kaos untuk peserta pelatihan, selain itu diserahkan pula peralatan proteksi 3 (tiga) unit Hand sprayer.

Dengan pagu anggaran kegiatan Fasilitasi Brigade Proteksi Perkebunan pada tahun 2018 sebesar Rp. 139.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah)

pelaksanaan kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 135.730.020,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Puluh Rupiah) atau 97,65%.

1. Realisasi Pelaksanaan Program Prioritas OPD Tahun 2018 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

Pada Sub Bab ini disajikan uraian lebih detail terkait capaian kinerja per Program Prioritas yang dilaksanakan baik capaian kinerja berupa realisasi fisik, keuangan dan persentase Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

1) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dengan kegiatan Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat

Capaian target kinerja terhadap RPJM sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 90.56 %

Program Prioritas ini dicapai dengan melalui Tiga Kegiatan yang menjadi tolok ukur Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan Tahun 2018 yaitu : Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat, Pendampingan Pekebun dan Pelaku Agribisnis (PEDA KTNA) dan Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna.

a. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan hasil yang diinginkan adalah **“tersebar luasnya informasi harga pasar komoditas perkebunan secara kontinyu”** (setiap bulan) sehingga petani/pekebun mendapatkan informasi harga yang menguntungkan sesuai dengan perkembangan harga saat menjual hasil panenannya.

Pada tahun 2018 untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dukungan pendanaan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan target keluaran sebanyak 12 kali informasi data harga pasar komoditas perkebunan. Capaian sampai dengan akhir tahun 2018, realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan sebesar 91,61 % atau Rp. 54.966.634,-, sehingga terdapat sisa anggaran sebanyak Rp. 5.033.366,-. Sisa anggaran karena pembelian bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional ke lapangan, sisa perjalanan dinas dalam daerah tidak terserap secara keseluruhan.

b. Kegiatan Pendampingan Pekebun dan Pelaku Agribisnis (PEDA KTNA)

Kegiatan pendampingan pekebun dan pelaku agribisnis ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan percontohan/demplot komoditas perkebunan sebagai bentuk promosi komoditas unggulan di Kabupaten Berau pada saat momentum Pekan Daerah (PEDA) Kontak Tani Dan Nelayan Andalan (KTNA) ke X Kalimantan Timur Tahun 2019, yang pelaksanaannya di Kampung Labanan Jaya, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Dalam rangka mempersiapkan Peda X KTNA Kaltim Tahun 2019 tersebut, maka telah dialokasi dukungan kegiatan pembuatan demplot komoditas perkebunan dan pelatihan petugas Fasilitator Daerah (Fasda) bidang perkebunan dalam proses pengolahan minyak nilam dan pengolahan pasta kakao.

Hasil yang diinginkan adalah **“tersedianya lokasi demonstrasi plot (demplot) dan 4 (empat) contoh komoditas perkebunan dan meningkatnya SDM Fasda”**, sehingga pada saatnya Ajang Peda X KTNA Kaltim digelar pada Tahun 2019 lokasi Demplot telah siap dan petugas Fasda siap untuk mendampingi para peserta.

Pada tahun 2018 untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dukungan pendanaan sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dengan target

keluaran tersedianya lokasi percontohan (Demplot) komoditas perkebunan dan meningkatnya petugas Fasda sebanyak 15 Orang. Capaian sampai dengan akhir tahun 2018, realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan sebesar 88,39 % atau Rp. 618.763.850,-, sehingga terdapat sisa anggaran sebanyak Rp. 81.236.150,-. Sisa anggaran karena honor petugas teknis lapangan, pembelian bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional ke lapangan, sisa belanja pengadaan bahan demplot, sisa perjalanan dinas dalam daerah tidak terserap secara keseluruhan.

c. Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna.

Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna, dalam upaya meningkatkan pemahaman petani/pekebun tentang penerapan pemupukan yang benar terkait dengan dosis pupuk, cara pemupukan dan saat pemberian pupuk terhadap tanaman perkebunan.

Hasil yang diinginkan adalah **“meningkatnya motivasi petani/pekebun dalam penerapan pemupukan tanaman perkebunan sesuai dengan anjuran rekomendasi yang ditentukan”**, sehingga pada gilirannya produktivitas tanaman semakin meningkat.

Pada tahun 2018 untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dukungan pendanaan sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan target keluaran terlaksananya penyuluhan teknologi tepat guna bagi petani/pekebun tentang aplikasi pemupukan yang baik dan benar di 3 (tiga) lokasi. Capaian sampai dengan akhir tahun 2018, realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan sebesar 82,27 % atau Rp. 205.679.700,-, sehingga terdapat sisa anggaran sebanyak Rp. 44.320.300,-. Sisa anggaran karena honor petugas , pembelian bahan bakar minyak

untuk kendaraan operasional ke lapangan, sisa belanja pengadaan makan/minum peserta penyuluhan, sisa perjalanan dinas dalam daerah tidak terserap secara keseluruhan.

2) Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan

Sesuai dengan Target Kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu jumlah pelaku usaha yang menerapkan prinsip ramah lingkungan maka program prioritas ini dicapai melalui tiga kegiatan sebagai tolok ukur yang ada pada Kegiatan Dinas Perkebunan tahun 2018 yaitu :Kegiatan Pengendalian Kebakaran Lahan Kebun Rakyat, Kegiatan Konservasi Lahan Dengan Komoditas Perkebunan dan Pengembangan Teknologi Bioteknologi Bidang Perkebunan.

a. Kegiatan Pengendalian Kebakaran Lahan Kebun Rakyat

Dalam rangka antipasi dan kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun, telah terbentuk Brigade/Satgas Pengendalian Kebakaran Dinas Perkebunan Kabupaten Berau pada tahun 2015, sesuai dengan Permentan Nomor 47 tahun 2014 tentang Brigade dan Pedoman pelaksanaan pencegahan serta pengendalian kebakaran lahan dan kebun juga membentuk Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) ditingkat masyarakat.

Kegiatan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun pada tahun 2018, dilaksanakan kegiatan meliputi:

- ✓ Pembinaan dan Monitoring Kelompok Peduli Api yang sudah terbentuk di 6 (enam) Kampung, yaitu: Kampung Tepian Buah, Kampung Merapun, Kampung Kasai, Kampung Pesayan, Kampung Capuak dan Kampung Batu Putih.

- ✓ Pembentukan KTPA pada kampung yang rawan terjadi kebakaran di 9 (Sembilan) lokasi yaitu : Kampung Muara Lesan binaan PT. Anugrah Agung Prima Abadi, Kampung Biatan Lempake binaan PT. Dwi Wira Lestari Jaya, Kampung Biatan Ulu binaan PT. Dwi Wira Lestari Jaya, Kampung Tanjung Perepat Kecamatan Batu Putih Binaan PT. Tunas Alam Nusantara, Kampung Ampen Medang Kecamatan Batu Putih binaan PT. Inti Energi Kaltim, Kampung Tasuk Kecamatan Gunung Tabur binaan PT. Satu Sembilan Delapan, Kampung Semanting binaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya, Kampung Long Ayan binaan PT. Natura Pasific Nusantara dan Kampung Punan Malinau binaan PT. Natura Pasific Nusantara.

Pagu anggaran kegiatan yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 129.000.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah), serapan anggaran penunjang kegiatan hanya sebesar Rp. 115.173.950,- (Seratus Lima Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 89,28 %, sehingga menyisakan anggaran sebesar Rp. 13.826.050,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah).

Adanya sisa anggaran pada Kegiatan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun Rakyat tersebut disebabkan adanya sisa belanja pembelian bahan bakar minyak dan pelumas untuk mobilitas ke kampung dan sisa belanja biaya perjalanan dinas dalam daerah, dimana jumlah lunsum yang tertuang dalam DPA SKPD Tahun 2018 lebih besar dari pada standart perjalanan

dinas dalam daerah sehingga pembayaran lunsum harus menyesuaikan standart yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Berau tersebut.

b. Kegiatan Konservasi Lahan Dengan Komoditas Perkebunan

Kegiatan ini dengan tujuan untuk meningkatkan Produktifitas Lahan Pertanian Non Produktif dilaksanakan melalui Kegiatan Konservasi lahan dengan komoditas perkebunan dalam mendukung Program Peningkatan Kesejahteraan Petani menjadi Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan.

Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Lahan dengan Komoditas Perkebunan pada tahun 2018, kembali menitik beratkan pada Pengadaan Bibit Pala sebanyak 8.600 pohon untuk lahan terlantar seluas 70 Hektar di Kampung Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk-Biduk dan Kampung Ampen Medang Kecamatan Batu Putih.

Pagu anggaran kegiatan yang dialokasi pada tahun 2018 sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), serapan anggaran untuk realisasi kegiatan adalah sebesar Rp. 430.384.750,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 95,64 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 19.615.250,- merupakan anggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah dan sisa kontrak pengadaan bibit.

c. Kegiatan Pengembangan Teknologi Bioteknologi Bidang Perkebunan

Kegiatan Pengembangan Teknologi Bioteknologi Bidang Perkebunan merupakan yang ditujukan untuk menekan penggunaan pestisida kimiawi sebagai bahan pengendali serangan hama penyakit tanaman perkebunan, selanjutnya mengganti bahan pengendaliannya dengan penggunaan Agens Pengendali Hayati dan Pestisida Nabati yang ramah lingkungan berdasarkan Konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT).

Untuk pemenuhan kebutuhan petani/pekebun dalam mengendalikan serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan (OPT), Dinas Perkebunan Kabupaten Berau melalui UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD-P2TP) di Rinding mulai mengembangkan Agens Pengendali Hayati serta Pestisida ramah lingkungan lainnya.

Dengan pagu anggaran Kegiatan Pengembangan Teknologi Bioteknologi Bidang Perkebunan di tahun 2018 sebesar Rp. 168.790.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 164.224.620,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) atau 97,30 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 4.565.380,- (Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah), merupakan sisa belanja perjalanan dinas yang tidak terpakai.

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Teknologi Bioteknologi Bidang Perkebunan di tahun 2018 adalah:

- Pelatihan pembuatan Biopestisida untuk petani di Kampung Tembudan, Kecamatan Batu Putih sebanyak 50 orang.
- Pengadaan belanja barang Shaker untuk keperluan UPTD P2TP

- Pengembangan dan perbanyakkan biopestisida berupa Jamur *Trichoderma* untuk pemenuhan permintaan petani guna pengendalian OPT.

Hasil pengembangan/perbanyakkan jamur *Trichoderma sp* selama tahun 2018 baru sebatas dalam bentuk stater dan dalam bentuk perbanyakkan dengan media bekatul, hal ini disebabkan karena terbatasnya peralatan yang ada. Hasil tersebut didistribusikan untuk mengendalikan OPT tanaman Lada, meskipun sebenarnya jamur ini memiliki spektrum yang lebih luas fungsinya dalam mengendalikan OPT.

Pendistribusian *Trichoderma sp* selama periode tahun 2018 meliputi beberapa kampung, yaitu:

- Kampung Melati Jaya, sebanyak 12,5 kg dalam bentuk stater atau setara 125 Kg apabila sudah diperbanyak dengan campuran bekatul berupa *Trichoderma sp*, bentuk padat. Sedangkan *Trichoderma sp*, bentuk cair sebanyak 2 liter.
- Kampung Tembudan, sebanyak 68 kg dalam bentuk stater, atau setara 680 Kg apabila sudah diperbanyak dengan campuran bekatul, berupa *Trichoderma sp*, bentuk padat. Sedangkan *Trichoderma sp*, bentuk cair sebanyak 12 liter.
- Kampung Teluk Semating, sebanyak 200 kg perbanyakkan dengan campuran bekatul, berupa *Trichoderma sp*, bentuk padat.

Jumlah keseluruhan yang dibagikan, dilakukan untuk pengendalian Penyakit Busuk Pangkal Batang Lada (*Phytophthora capsici*) dari total luas serangan sekitar ± 6 Ha di wilayah Kampung tersebut diatas (Berdasarkan laporan dari petugas data statistik Dinas Perkebunan/Manbun yang bertugas diwilayah Kampung tersebut),

3) Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan

Pada Tahun 2018 kegiatan pada Dinas Perkebunan dengan target kinerja yang mendukung Program prioritas Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan pada RPJMD berupa Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Rakyat.

Program ini bertujuan untuk memberdayakan petani dan kelompok tani dalam mengelola usaha perkebunannya dalam rangka meningkatkan mutu/kualitas produksi yang dihasilkannya.

Pada tahun 2018 melalui kegiatan identifikasi/inventarisasi kebun masyarakat untuk selanjutnya dalam rangka penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STDB) dengan tujuan untuk:

- a. menghimpun data kepemilikan kebun rakyat dan informasi pendukung lainnya sehingga dapat digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan;
- b. membantu mempermudah Kementerian Pertanian dalam penyaluran program pemerintah, seperti: program subsidi pupuk, benih, peremajaan supaya tepat sasaran;
- c. mewujudkan tata kelola usaha budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan milik Pekebun;
- d. membantu Kelembagaan Petani dan/Kelembagaan Desa untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan Pekebun;
- e. mendorong terwujudnya praktek pengelolaan perkebunan yang baik (*good agriculture practices*) di level Pekebun;
- f. memastikan pengelolaan SDA yang berbasis perkebunan dikelola secara berkelanjutan.

Pada tahun 2018 untuk melaksanakan kegiatan ini telah dialokasikan dukungan pendanaan sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan target keluaran terdatanya perkebunan masyarakat sebanyak 30 (tiga puluh) lokasi kebun. Capaian sampai dengan akhir tahun 2018, realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan sebesar 92,30 % atau Rp. 69.225.920,-, sehingga terdapat sisa anggaran sebanyak Rp. 5.774.080,-. Sisa anggaran karena honor petugas , pembelian bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional ke lapangan, sisa perjalanan dinas dalam daerah tidak terserap secara keseluruhan.

2. Permasalahan dan Solusi Program dan Kegiatan berdasarkan DPPA OPD Tahun 2018

Secara umum dimana 10 Program dan 33 Kegiatan tersebut, terdapat beberapa masalah yang menjadi factor penghambat, yaitu :

1. Adanya keterbatasan operasional kendaraan dinas sebagai penunjang perjalanan dinas dalam daerah, sehingga terhambatnya pelaksanaan kegiatan yang telah terjadwal, karena harus bergiliran untuk pemakaian kendaraan operasional tersebut.
2. Adanya peraturan terkait dengan persyaratan penerbitan surat tanda daftar budidaya (STDB) perkebunan bagi masyarakat, dimana salah satu untuk keanggotaan Tim Verifikasi Data Lapangan kewenangannya berada di Provinsi.

Berdasarkan hal tersebut diatas inilah yang merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018, sehingga mempengaruhi Kinerja SKPD Dinas Perkebunan. Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut, maka perlu dilakukan pemecahan persoalan sehingga kedepan tidak ada lagi faktor-faktor penghambat tersebut. Diantaranya sebagai berikut :

1. Perlu adanya pengaturan penjadwalan penggunaan mobil dinas sebagai sarana mobilitas darat perjalanan dinas dalam daerah serta perlu adanya penambahan

kendaraan operasional lapangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan.

2. Perlu adanya pendelegasian kewenangan terkait keanggotaan Tim Verifikasi Data Lapangan kepada UPTD/Cabang di Kabupaten Berau dalam rangka penerbitan STDB bagi pekebun masyarakat.

6. Permasalahan dan Solusi Program Prioritas berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

- 1) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan pada Tahun Anggaran 2018 tidak mempunyai permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari target kinerja pada RPJMD sebanyak 3 kegiatan yaitu *Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat, Pendampingan Pekebun dan Pelaku Agribisnis (PEDA KTNA) dan Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna* pada Tahun Anggaran 2018 pelaksanaan kegiatan capaian fisiknya dapat direalisasikan 100 % dan keuangan rata-rata 90 %.
- 2) Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan
Hasil pengembangan/perbanyak jamur *Trichoderma sp* sampai dengan tahun 2018, baru sebatas dalam bentuk stater dan dalam bentuk perbanyak dengan media bekatul, hal ini disebabkan karena terbatasnya peralatan yang ada. Hasil tersebut didistribusikan untuk mengendalikan OPT tanaman Lada, meskipun sebenarnya jamur ini memiliki spektrum yang lebih luas fungsinya dalam mengendalikan OPT.
- 3) Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan
Belum adanya penganggaran kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja program

Pemecahan Masalah Program Prioritas berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

1. Tidak ada solusi yang diberikan Karena tidak terjadi permasalahan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang ditargetkan pada RPJMD dan target telah tercapai sesuai yang dibebankan pada RPJMD
2. Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan
Dengan memperhatikan masih besarnya luas serangan OPT tanaman lada maka diharapkan dukungan pemerintah kabupaten Berau terutama dalam hal penunjang sarana dan prasarana kelengkapan Laboratorium UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD-P2TP) di Rinding untuk lebih mengembangkan *Trichoderma sp.* dan Agens hayati lainnya sebagai pengendali hayati bukan hanya untuk serangan OPT pada komoditi lada, namun juga pada komoditas tanaman perkebunan lainnya.
3. Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan
Perlu penganggaran kegiatan penunjang program prioritas.

D. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 9.969.035.002,- Melalui mekanisme perubahan APBD 2018 menjadi Rp. 10.742.968.002,-sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dengan rinciannya, terdiri dari :

1. Belanja Tak Langsung	=	Rp.	6.581.579.002,00
- Belanja Pegawai	=	Rp.	6.581.579.002,00
2. Belanja Langsung	=	Rp.	4.161.389.000,00
- Belanja Pegawai	=	Rp.	586.394.000,00
- Belanja Barang dan Jasa	=	Rp.	3.158.925.000,00
- Belanja Modal	=	Rp.	56.070.000,00
Total (1+2)	=	Rp.	10.742.968.002,00

Sampai Tanggal 31 Desember 2018 Pagu Dana sebesar Rp. 10.742.968.002,- realisasi anggaran sebesar Rp. 9.663.995.994,- atau 89,95%, dengan rincian untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.935.169.609,- (90,18%) dan belanja langsung sebesar Rp. 3.728.826.385,- (89,61%). Dengan demikian ada sisa dana yang disetorkan ke Kas Daerah melalui Dinas PPKK Kabupaten Berau sebesar Rp. 1.078.972.008,- atau 10,05%.

Adapun rincian Penggunaan Alokasi Dana tersebut, dapat dilihat pada Tabel 9 dan Tabel 10 sebagai berikut :

TABEL 6

**BELANJA TIDAK LANGSUNG DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REKEN ING	URAIAN	ANGGARAN (DPPA-SKPD) (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	SISA ANGGARAN (DPPA-SKPD) (Rp)
5.1.1	BELANJA PEGAWAI				
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.849.200.000,00	2.489.835.000,00	87,39	359.365.000,00
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	3.732.379.002,00	3.445.334.609,00	92,31	287.044.393,00
	TOTAL	6.581.579.002,00	5.935.169.609,00		646.409.393,00

Sumber Data : Subbagian Keuangan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

TABEL 7
BELANJA LANGSUNG DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (DPPA-SKPD) (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)	SISA ANGGARAN (DPPA- SKPD) (Rp)
I	PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000	1,499,000	99.93	1,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik	150,000,000	121,444,201	80.96	28,555,799
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	169,000,000	107,602,414	63.67	61,397,586
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	113,818,000	111,443,000	97.91	2,375,000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10,000,000	9,758,000	97.58	242,000
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15,000,000	14,014,000	93.43	986,000
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	20,000,000	19,910,200	99.55	89,800
8	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	20,000,000	15,636,500	78.18	4,363,500
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	4,913,000	98.26	87,000
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36,070,000	35,570,000	0.00	500,000
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	6,102,000	6,091,200	99.82	10,800
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	35,000,000	31,759,100	90.74	3,240,900
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	245,000,000	242,182,740	98.85	2,817,260
14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	75,000,000	64,446,508	85.93	10,553,492
15	Penyediaan Jasa Administrasi /Teknis Perkantoran	170,436,000	169,271,820	99.32	1,164,180
JUMLAH (I)		1,071,926,000	955,541,683	89.14	116,384,317

II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5,000,000	4,990,000	99.80	10,000
JUMLAH (II)		5,000,000	4,990,000	99.80	10,000
III	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN				
	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	5,000,000	4,550,000	91.00	450,000
JUMLAH (IV)		5,000,000	4,550,000	91.00	450,000
IV	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI				
1	Pengawasan dan pembinaan, pembangunan kebun petani kemitraan oleh PBS	75,000,000	68,300,152	91.07	6,699,848
JUMLAH (V)		75,000,000	68,300,152	91.07	6,699,848
V	PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN				
1	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	60,000,000	54,966,634	91.61	5,033,366
2	Pendampingan pekebun dan pelaku Agribisnis (Pekan Daerah Kontak Tani Pekebun Andalan)	700,000,000	618,763,850	88.39	81,236,150
3	Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	250,000,000	205,679,700	82.27	44,320,300
JUMLAH (V)		1,010,000,000	879,410,184	87.07	130,589,816
VI	PENINGKATAN MUTU HASIL PERKEBUNAN				
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Rakyat	75,000,000	69,225,920	92.30	5,774,080
JUMLAH (V)		75,000,000	69,225,920	92.30	5,774,080

VII	PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN				
1	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	373,500,000	271,703,816	72.75	101,796,184
2	Pengendalian dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	90,000,000	88,481,200	98.31	1,518,800
3	Fasilitasi Pembibitan Kooditi Unggulan	261,900,000	254,873,960	97.32	7,026,040
4	Rehabilitasi dan Peremajaan Komoditi Perkebunan	83,273,000	70,247,500	84.36	13,025,500
5	Fasilitasi Gemari Kakao	75,000,000	68,193,250	90.92	6,806,750
JUMLAH (VII)		883,673,000	753,499,726	85.27	130,173,274
VIII	PENGEMBANGAN PERENCANAAN PERKEBUNAN				
1	Konsolidasi Pembangunan Perkebunan	75,000,000	74,068,880	98.76	931,120
2	Pengolahan Data Statistik Perkebunan (Pembuatan Buku Data Statistik Komoditi Unggulan)	74,000,000	73,726,500	99.63	273,500
JUMLAH (VIII)		149,000,000	147,795,380	99.19	1,204,620
IX	PEMBINAAN PERKEBUNAN RAMAH LINGKUNGAN				
1	Pengendalian Kebakaran Lahan Kebun Rakyat	129,000,000	115,173,950	89.28	13,826,050
2	Konservasi Lahan dengan Komoditas Perkebunan	450,000,000	430,384,750	95.64	19,615,250
3	Pengembangan Teknologi Bioteknologi Bidang Perkebunan	168,790,000	164,224,620	97.30	4,565,380
JUMLAH (IX)		747,790,000	709,783,320	94.92	38,006,680
X	Pengendalian Hama Terpadu				
	Fasilitasi Brigade Proteksi Perkebunan	139,000,000	135,730,020	97.65	3,269,980
JUMLAH (X)		139,000,000	135,730,020	97.65	3,269,980
TOTAL (I S/D X)		4,161,389,000	3,728,826,385	89.61	432,562,615
Sumber Data : Subbagian Keuangan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau					

LAKIP

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

BAB IV

P E N U T U P

Kesimpulan

Penyusunan LAKIP Tahun 2017 ini masih belum sepenuhnya sempurna, hal ini tercermin dari Kondisi sebagai berikut :

1. Belum ada Benchhmarking yang jelas untuk kegiatan – kegiatan yang bisa di bandingkan dengan Instansi sejenis di Pemerintah Kabupaten Berau. Hal ini akan terbaiki di masa-masa yang akan datang dengan cara study banding dengan instansi Pemerintah lain yang sejenis, sehingga menghasilkan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan;
2. Beberapa Elemen Indikator Input seperti SDM, Sarana dan Prasarana masih belum terinci dengan jelas, sehingga masih belum informatif bagi yang membacanya. Untuk yang akan datang hal ini hendaknya dijadikan perhatian;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Perkebunan Kabupaten Berau ini diharapkan dapat memacu Pelaksanaan CLEAN GOVERMENT dalam rangka mewujudkan GOOD GOVERNMENT, sehingga kedepan akan terwujud sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan atau Akuntabel secara transparansi, kemudian menjadi umpan balik bagi Stake Holder.

Akhirnya berkat kerja keras serta dukungan penuh oleh Bidang-bidang dan terlebih lagi dukungan Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) terhadap Subbagian Penyusunan Program, maka Laporan Akuntabilitas KINerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Berau ini dapat disusun sekalipun agak terlambat dari batas waktu yang telah ditetapkan oleh Bagian Ortal Setda Kabupaten Berau, dengan harapan dapat dipergunakan sebagai bentuk Transparansi terhadap masyarakat. Terima Kasih.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Sumaryono

Jabatan : Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :H. Muharram,S.Pd, M.M

Jabatan : Bupati Berau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Redeb, 23 Januari 2019

Pihak Kedua,
BupatiBerau,

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perkebunan

H. Muharram, S.Pd, M.M

Ir. Sumaryono
Pembina UtamaMuda
NIP. 19610928 198603 1 010

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Agus Tantomo, S.Tek, M. Bus	Wakil Bupati	
2.	Ir. M Gazali, SIP, MM	Sekretaris Daerah	
3.	Drs.H.Mansyah Kelana	Asisten II	
4.	Ir. Sumaryono	Kepala Dinas Perkebunan	

PERJANJIAN KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Perkebunan
Tahun : 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Produksi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit	1.850.000 Ton
		Produksi Hasil Perkebunan Kelapa Dalam	3.400 Ton
		Produksi Hasil Perkebunan Kakao	650 Ton
		Produksi Hasil Perkebunan Karet	180 Ton
		Produksi Hasil Perkebunan Lada	1.200 Ton
2	Meningkatnya Pendapatan Petani / Pekebun	Presentase Kenaikan Pendapatan Petani per bulan diatas UMK	5-10

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.100.012.000	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	295.650.000	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	75.000.000	
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	200.000.000	
5	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp.	600.000.000	
6	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp.	766.000.000	
7	Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Rp.	75.000.000	
8	Peningkatan Peroduksi Pertanian/ Perkebunan	Rp.	3.412.156.000	
9	Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan	Rp.	1.200.000.000	
10	Pengendalian Hama Terpadu	Rp.	316.000.000	
JUMLAH		Rp.	8.039.818.000	

Menyetujui :

Bupati Kab. Berau,

Tanjung Redeb, 23 Januari 2019

Kepala Dinas Perkebunan

H. Muharram, S.Pd, M.M

**Ir. Sumaryono
Pembina Utama Muda
NIP. 19610928 198603 1 010**

KINERJA TAHUNAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Perkebunan
Tahun : 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	Produksi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit	1.707.997 Ton
		Produksi Hasil Perkebunan Kelapa Dalam	4.828 Ton
		Produksi Hasil Perkebunan Kakao	832 Ton
		Produksi Hasil Perkebunan Karet	761Ton
		Produksi Hasil Perkebunan Lada	1.142 Ton
2	Meningkatnya Pendapatan Petani / Pekebun	Pendapatan Petani/Pekebun diatas UMK	Rp. 2.935.000,-

Nama SKPD : DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BERAU

Tahun : 2018

PENGUKURAN KINERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BERAU

TAHUN ANGGARAN : 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALIASI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	1. Produksi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit	Ton	1.850.000	2.086.961,7	1. Berdasarkan Permentan RI. No.11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), bahwa setiap perusahaan perkebunan wajib menerapkan sertifikasi ISPO, dimana perusahaan yang berhak mengajukan permohonan penilaian audit adalah perusahaan yang telah mendapat penilaian kelas kebun hasil pelaksanaan PUP. 2. Perkebunan Sawit di Kab. Berau rata-rata telah memasuki usia tanaman menghasilkan sehingga perlu pengawasan suplay TBS dengan pabrik pengolahan CPO yang ada di Kab. Berau	1. Pada tahun 2018, Dinas Perkebunan Kab. Berau telah melaksanakan kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan sesuai dengan SK. Bupati Berau No. 466 Tahun 2018 terhadap 1 (satu) PBS dan SK. Bupati Berau No. 784 Tahun 2018 terhadap 10 (sepuluh) PBS pada tahap operasional dan 1 (satu) PBS pada tahap pembangunan 2. Dinas Perkebunan Kab. Berau Melakukan Pengawasan dan Pendampingan dengan PBS Sawit, untuk melakukan pengaturan agar seluruh TBS terutama milik masyarakat Berau dapat diolah di pabrik pengolahan CPO yang ada di kab. Berau.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALIASI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	2. Produksi Hasil Perkebunan Kelapa Dalam	Ton	4.828	5.995,19	1. Saat ini kondisi komoditi kelapa dalam di kab. Berau, terutama di wilayah pesisir telah banyak yang tergolong Tanaman Tua dan Rusak 2. Adanya siklus Arthona sp. yang menyerang wilayah pulau derawan dan Kec. Biduk-biduk	1. Melalui kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), dilakukan sosialisasi ke masyarakat untuk mulai membibitkan tanaman baru dengan swadaya masyarakat, mengingat pentingnya peran kelapa dalam untuk wilayah pesisir terutama menunjang sektor pariwisata. 2. Pemberian Pelatihan pengendalian OPT
		3. Produksi Hasil Perkebunan Kakao	Ton	832	661,14	1. Berdasarkan Data Statistik Perkebunan, Produksi Kakao di Kab. Berau mengalami penurunan sejak tahun 2015, disebabkan karena tanaman Kakao tergolong dalam tanaman yang rentan terserang OPT 2. Alih fungsi ke Kelapa Sawit	1. Pemberian Pelatihan pengendalian OPT 2. Sejak Tahun 2017, Dinas Perkebunan Kab. Berau telah bekerjasama dengan PT. Berau Coal, dan OPD terkait sesuai SK Bupati Berau No. 571 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pokja Gemari Kakao untuk membangkitkan kembali minat masyarakat terhadap Kakao

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALIASI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	3.Produksi Hasil Perkebunan Kakao					3. Memfasilitasi terbitnya SK Penunjukan Kawasan Agribisnis Kakao sesuai SK Bupati No. 530 Tahun 2018
							4. Bekerja sama dengan BPTP Sepaja yang difasilitasi PT. Berau Coal dalam rangka penyaluran bantuan bibit kakao sebanyak 25.000 bibit untuk masyarakat.
		4.Produksi Hasil Perkebunan Karet	Ton	761	211,29	1. Berdasarkan data Statistik perkebunan, tanaman karet di Kab. Berau rata-rata telah termasuk Tanaman Menghasilkan, namun sejak tahun 2015, terjadi penurunan produksi karet disebabkan keenganan petani untuk menyadap karena rendahnya harga jual.	1. Untuk meningkatkan kualitas dan harga jual hasil olahan karet, pada tahun 2017, Dinas Perkebunan Kab. Berau telah memberikan bantuan Alsin Pengolahan <i>Rubber Crap</i> , untuk Kampung Sidobangen. Pada tahun 2018, Sosialisasi yang dilakukan Dinas Perkebunan antara lain memberikan harga pasar dan lokasi pembeli kepada petani/pekebun karet sehingga diharapkan dapat meningkatkan kembali semangat petani karet untuk menyadap.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALIASI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan	5.Produksi Hasil Perkebunan Lada	Ton	1.142	1.029,4	1. Masih tingginya serangan penyakit Busuk Pangkal Batang Lada	1. Dinas Perkebunan Kab. Berau bersama dengan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan melakukan pendampingan dan pelatihan pengendalian OPT, serta melakukan sosialisasi aplikasi penggunaan <i>Trichoderma sp</i> sebagai agensi hayati pengendali jamur penyebab penyakit Busuk Pangkal Batang Lada.
						2. Turunnya harga jual Lada	2. Sebagaimana yang dilaksanakan pada komoditi Kakao, Dinas Perkebunan Kab. Berau mulai menyiapkan penetapan Kawasan Agribisnis Lada di Kab. Berau
2.	Meningkatnya Pendapatan Petani/Pekebun	Pendapatan Petani/Pekebun diatas UMK	Rupiah	2.935.000	3.156.158	Harga Jual komoditi Perkebunan sangat dipengaruhi oleh pasar global	Dinas Perkebunan mengupayakan untuk dapat menjaga kualitas produk komoditi perkebunan di Kab. Berau memenuhi permintaan pasar, demikian juga dalam hal kuantitasnya, melalui pendampingan pelatihan, survey harga pasar dan pembelajaran petugas ASN Disbun dalam hal alih teknologi komoditi perkebunan.

[illegible]

